

**ANALISIS KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN DESA (IPD) DAN INDEKS DESA
MEMBANGUN (IDM)
DI KABUPATEN LANGKAT KECAMATAN BRANDAN BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Mendapat Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Ekonomi Pembangunan**



OLEH

**Nama : M. Fariz Al Azhari Rokan
NPM : 1805180001
Program Studi : Ekonomi Pembangunan**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Srata-I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, pukul 09.00 Wib sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama Lengkap : M. FARIZ AL – AZHARI ROKAN
NPM : 1805180001
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Konsentrasi : RISET EKONOMI DAN BISNIS
Judul Skripsi : ANALISIS KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN DESA (IPD) DAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DI KABUPATEN LANGKAT KECAMATAN BRANDAN BARAT
Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

Penguji I

Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si

Penguji II

SRI ENDANG RAHAYU, SE., M.Si

Pembimbing


Dr. PRAWIDYA HARIANI RS
PANITIA UJIAN

Ketua


H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris


Assoc.Prof.Dr. ADE CUSAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : M. FARIZ AL AZHARI ROKAN
NPM : 1805180001
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Konsentrasi : RISET EKONOMI DAN BISNIS
Judul Skripsi : ANALISIS KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN DESA DAN INDEKS DESA MEMBANGUN DI
KABUPATEN LANGKAT KECAMATAN BRANDAN BARAT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 2 September 2022

Pembimbing Skripsi

(Dr. Prawidya Hariani RS S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. Prawidya Hariani RS S.E., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Unggul | Cerdas | Terpercaya



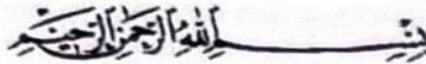
UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. FARIZ AL – AZHARI ROKAN
Npm : 1805180001
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Riset Ekonomi Dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Kebijakan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Langkat Kecamatan Brandan Barat**” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Medan, Oktober 2022

yang menyatakan



M. FARIZ AL – AZHARI ROKAN

ABSTRAK

M. Fariz Al Azhari Rokan (1805180001)

Analisis Kebijakan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Langkat Kecamatan Brandan Barat

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang berkembang. Sebagai Negara yang sedang berkembang Indonesia masih mengalami tahap atau proses untuk membangun perekonomian yang lebih baik agar menjadi sebuah Negara yang maju. Pembangunan ekonomi ini bertujuan untuk tercapainya suatu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Negara tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dana desa terhadap indeks pembangunan desa dan indeks desa membangun di Kabuapten Langkat Kecamatan Brandan Barat. Indeks desa membangun (Y) sebagai variabel terikat. Dana desa, alokasi dana desa, dana alokasi khusus, dan indeks pembangunan manusia (X) sebagai variabel bebas di dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan estimasi dan membuktikan bagaimana variabel-variabel dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dana alokasi khusus (DAK), dan indeks pembangunan manusia (IPM) dalam mempengaruhi indeks desa membangun (IDM) di Kabupaten Langkat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *timeseries* pada tahun 2014-2021 dan menggunakan software *E-views 12* untuk menganalisis data menggunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Langkat, sedangkan dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Langkat.

Kata Kunci: *indeks desa membangun, dana desa, alokasi dana desa, dana alokasi khusus dan indeks pembangunan manusia*

ABSTRACT

M. Fariz Al Azhari Rokan (1805180001)

Analisis Kebijakan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Langkat Kecamatan Brandan Barat

Indonesia is one of the developing countries. As a developing country, Indonesia is still undergoing stages or processes to build a better economy in order to become a developed country. This economic development aims to achieve a welfare for all people residing in the country.

This study aims to analyze the village fund policy on the village development index and the village development index in Langkat Regency, West Brandan District. The village index constructs (Y) as the dependent variable. Village funds, village fund allocations, special allocation funds, and the human development index (X) as independent variables in this study.

This study uses estimates and proves how the variables of village funds (VF), village fund allocations (VFA), special allocation funds (SAF), and human development index (HDI) affect the developing village index (DVI) in Langkat Regency. The data used in this study is time series data in 2014-2021 and using E-views 12 software to analyze the data using multiple linear regression.

The results of this study indicate that the human development index (HDI) has a positive and significant effect on the rural development index in Langkat Regency, while village funds (VD), village fund allocations (VFA), and special allocation funds (SAF) have negative and insignificant effects on index of developing villages in Langkat Regency.

Keywords: *building village index, village fund, village fund allocation, special allocation fund and human development index*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Analisis Kebijakan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Langkat Kecamatan Brandan Barat**”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikut Beliau yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak, Amin. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan Skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu menjadi orang hebat dan kuat selama hidup saya, yang memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam menghadapi segala proses yang saya jalani dan membuat saya kuat dalam menghadapi segala situasi.
2. Bapak Dr. H. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri S.E., M.M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.

4. Ibu Dr Prawidya Hariani RS, Selaku Ketua Jurusan dan Dosen Pembimbing Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Seluruh Dosen mata kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat, semoga menjadi amalan di akhirat kelak.
7. Bapak / Ibu Biro Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam Akademik .
8. Kepada seluruh saudara saya (bg aan, bg zaki, bg alfin, bg dilla, bg danu, bg onok, bg khodri) yang selalu memberi semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada abang saya sekaligus teman saya (bang fuady syihabuddin rangkuti) yang sangat amat dekat dengan saya tidak pernah berhenti membantu dan menghibur saya selama mengerjakan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan saya (Fildza, Salsa, Alfira, Dara, Lila) serta rekan sekelas masa perkuliahan, dan teman-teman dekat saya yang telah memberi informasi mengenai perkuliahan, dan memberi semangat kepada saya.
11. Kepada teman dekat saya (Febri, Melva, Ajeng, Dhea, Liza, Farras, Rifep, Ribok, sofia, sakil dan Suci) yang telah memberikan semangat dan menemani saya ketika skripsian .

12. Kepada grup seperjuangan saya Anak Sholeh, Senggol Dong, F3ID, Tim Bar-Bar yang telah memberikan semangat dan menemani saya ketika skripsian dari via online.

Akhir kata penulis berharap semoga proposal ini dapat berguna bagi semua pihak dalam menerapkan ilmu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini jauh dari kata kesempurnaan. Maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih , Wassamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, September 2022
Penulis

M. Fariz Al Azhari Rokan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTARCT	ii
KATA	
PENGANTAR	
.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	26
1.3 Batasan dan Rumusan Masalah	27
1.3.1 Batasan Masalah	27
1.3.2 Rumusan Masalah	27
1.4 Tujuan Penelitian.....	27
1.5 Manfaat Penelitian.....	28
1.5.1 Manfaat Akademik.....	28
1.5.2 Manfaat Non-akademik	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
2.1 Landasan Teoritis	29
2.1.1 Pembangunan Ekonomi	29
2.1.2 Kebijakan Fiskal	40
2.1.3Desentralisasi Fiskal	46
2.1.4 Kebijakan Pengeluaran Pemerintah	47
2.1.5 Indikator Kemajuan Desa	54
2.3 Regulasi / Kebijakan Dana Desa	61
2.3.1 Dana Desa	61

2.3.2	Kebijakan Dana Desa	63
2.4	Kerangka Penelitian	64
2.4.1	Tahap Penelitian.....	64
2.4.2	Kerangka Analisis Penelitian.....	64
2.4.3	Kerangka Konseptual Model Estimasi.....	65
BAB III METODE PENELITIAN		66
3.1	Pendekatan Penelitian.....	66
3.2	Definisi Operasional.....	66
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian	67
3.4	Jenis dan Sumber Data	68
3.5	Teknik Pengumpulan Data	68
3.6	Teknik Analisis Tujuan Penelitian	69
3.6.1	Analisis Ekonomi Deskriptif Perkembangan Kebijakan Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Desa Di Kabupaten Langkat Sumatra Utara.....	69
3.6.2	Analisis Ekonomi Deskriptif Perkembangan Kebijakan Dana Desa terhadap Indeks Desa Membanguna Di Kabupaten Langkat Sumatra Utara	69
3.6.3	Analisis Model Ekonometrika	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		79
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Langkat.....	79
4.1.1	Kondisi Geografi.....	79
4.1.2	Kondisi Pemerintahan	79
4.1.3	Kondisi Demografi.....	81
4.1.4	Kondisi Ekonomi	85
4.1.5	Kondisi Sosial	94
4.2	Dana Desa.....	100
4.2.1	Anggaran Dana Desa Menurut Tingkat Nasional	104
4.2.2	Anggaran Dana Desa Provinsi Sumatra Utara.....	105

4.2.3 Anggaran Dana Desa Kabupaten Langkat	108
4.2.4 Anggaran Dana Desa Kecamatan Berandan Barat	109
4.3 Analisis Pembahasan Tujuan Penelitian.....	110
4.3.1 Analisis ekonomi deskriptif tentang perkembangan kategorisasi desa Indeks Pembangunan Desa (IPD) pada Kabupaten Langkat tahun 2014 dan 2018.	110
4.3.2 Analisis ekonomi deskriptif tentang capaian kategori Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Langkat dan Kecamatan Brandan Barat tahun 2019- 2021	123
4.3.3 Hasil Analisis Regresi.....	129
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	139
5.1 Kesimpulan.....	139
5.2 Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN.....	144

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 IPM Kabupaten Langkat dan Provinsi Sumatra Utara.....	9
Tabel 1. 2 IPD Menurut Dimensi, Status IPD, dan Jumlah Desa di Indonesia, 2018.....	16
Tabel 1. 3 Nilai Indeks Desa Membangun di Provinsi Sumatra Utara,2019	20
Tabel 1. 4 Nilai Indeks Desa Membangun di Kabupaten Langkat, 2019	22
Tabel 1. 5 Nilai Indeks Desa Membangun di Kecamatan Brandan Barat, 2019.....	23
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	60
Tabel 3. 1 Defenisi Operasional.....	67
Tabel 4. 1 Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Langkat.....	80
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Langkat Menurut Jenis Kelamin 2020	81
Tabel 4. 3 Sex Rasio Menurut Kecamatan (Persen) 2018-2020	83
Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Kabupaten Langkat Menurut Komposisi Penduduk dan Jenis Kelamin, 2020.....	84
Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Kabupaten Langkat Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2020	84
Tabel 4. 6 Jumlah Nilai Produk Domestic Regional Bruto DI Kabupaten Langkat	86
Tabel 4. 7 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Langkat Menurut Lapangan Usaha	90
Tabel 4. 8 Nilai Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita di Kabupaten Langkat, 2019 - 2021	91
Tabel 4. 9 Jumlah Pengangguran di Kabupaten Langkat 2019-2021	93
Tabel 4. 10 Angka Kemiskinan Di Kabupaten Langkat	99
Tabel 4. 11 Anggaran Dana desa Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun2019 – 2021	106
Tabel 4. 12 Anggaran Dana Desa Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2022 (Milyar).....	108
Tabel 4. 13 Anggaran Dana Desa Kecamatan Brandan Barat, 2021	109
Tabel 4. 14 Indeks Pembangunan Desa 2014 Kabuapten Langkat	118
Tabel 4. 15 Indeks Pembangunan Desa 2018 Kabupaten Langkat	120
Tabel 4. 16 Nilai Indeks Desa Membangun di Kabupaten Langkat, 2019 – 2021	124
Tabel 4. 17 Nilai Indeks Desa Membangun di Kecamatan Brandan Barat, 2019 – 2022	126
Tabel 4. 18 Anggaran Dana Desa Kecamatan Brandan Barat, 2021	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 IPM Sumatera Utara.....	8
Gambar 1. 2 Jumlah Desa Menurut Status IPD 2014 dan 2018.....	14
Gambar 2. 1 Ekonomi Ganda Pembangunan Ekonomi Arthur Lewis	35
Gambar 2. 2 Kurva Peacock dan Wiseman.....	51
Gambar 2. 3 Kurva Wagner, Solow, dan Musgrave	51
Gambar 2. 4 Kerangka Analisis Penelitian	65
Gambar 2. 5 Bagan Konseptual Model.....	65
Gambar 4. 1 Hasil Regresi Model Indeks Desa Membangun (IDM)	130
Gambar 4. 2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	136
Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	137
Gambar 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi.....	138

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2010-2021.....	6
Grafik 1. 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatra Utara, 2011-2021	7
Grafik 1. 3 Indeks Pembangunan Desa Menurut Pulau,2018	15
Grafik 1. 4 Indeks Pembangunan Desa di Pulau Sumatra,2018.....	16
Grafik 1. 5 IPD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara, 2018	17
Grafik 1. 6 rata-rata IDM di Indonesia Provinsi, 2019	20
Grafik 4. 1 Struktur PDRB beberapa Pengeluaran Lapangan Usaha.....	87
Grafik 4. 2 Struktur Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran.....	88
Grafik 4. 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Langkat 2017-2021	89
Grafik 4. 4 Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Sumatra Utara Maret 2014 – Maret 2021.....	92
Grafik 4. 5 Perkembangan IPM Kabupaten Langkat 2017- 2021.....	95
Grafik 4. 6 Perkembangan Harapan hidup Kabupaten Langkat 2017-2021	96
Grafik 4. 7 Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Langkat, 2017 - 2021	97
Grafik 4. 8 Perkembangan Pengeluaran Per kapita Per Tahun Kabupaten Langkat, 2017 - 2021	99
Grafik 4. 9 Anggaran Dana Desa.....	104
Grafik 4. 10 Anggaran Dana Desa Provinsi Sumatera Utara 2015 – 2020 (Triliun)	106
Grafik 4. 11 Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.....	118
Grafik 4. 12 Indeks Pembangunan Desa 2018 per Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara	120
Grafik 4. 13 Jumlah Desa Menurut Status IPD 2014 dan 2018	121
Grafik 4. 14 Nilai Indeks Desa Membangun di Kabupaten Langkat, 2019 – 2021	125
Grafik 4. 15 Nilai Indeks Desa Membangun di Kecamatan Brandan Barat, 2019 – 2021	127

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang berkembang. Sebagai Negara yang sedang berkembang Indonesia masih mengalami tahap atau proses untuk membangun perekonomian yang lebih baik agar menjadi sebuah Negara yang maju. Pembangunan ekonomi ini bertujuan untuk tercapainya suatu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Negara tersebut. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses untuk melakukan perubahan pada indikator sosial ekonomi masyarakat menuju arah yang lebih baik dan berkesinambungan. Dalam menetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup tiga indikator yaitu indikator kualitas tingkat pendidikan, indikator kesehatan, dan indikator ekonomi. Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia.

Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat (*a long and healthy*), pengetahuan (*knowledge*), dan kehidupan yang layak (*desent standart of living*). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Setiap Negara baik Negara berkembang maupun Negara maju tentunya melaksanakan pembangunan guna mencapai tujuan atau cita-citanya yaitu meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan bangsanya. Menurut TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 menjelaskan bahwa pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan

masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Dalam melaksanakan perkembangan nasional dikenal dengan adanya Triologi pembangunan yang memiliki 3 unsur yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dalam melaksanakan kebijaksanaan Triologi pembangunan ini kita harus melihat ketiga unsur Triologi pembangunan tersebut saling mengkait dan dikembangkan secara selaras, terpadu dan saling memperkuat. Dengan pertumbuhan ekonomi justru kita dapat melaksanakan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, dan memang pertumbuhan ekonomi juga diarahkan untuk pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan akan mendukung pertumbuhan ekonomi karena akan lebih besar potensi yang mendorong pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi kita tidak dapat akan melaksanakan pemerataan pmbnagunan dan pengentasan kemiskinan.

Millenium Development Goals (MDGks) hadir yang telah disetujui oleh 189 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September 2000. MDGs merupakan paling kuat yang menunjukkan komitmen Internasional untuk kemiskinan global. Ada delapan tujuan yang disepakati oleh PBB yaitu: menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; mencapai pendidikan dasar untuk semua; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit penularan lainnya; memastikan kelestarian lingkungan hidup; serta

mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Tujuan-tujuan tersebut dicanangkan secara khusus untuk dicapai pada tahun 2015. (Todaro & Smith, 2017)

Pada tanggal 25 september 2015, PBB melakukan perubahan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millineium Development Goals* (MDGs) menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. SDGs terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun kedepan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. (www.id.UNDP.org)

Agenda 2030 terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) atau Tujuan Global, yang akan menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun kedepan, yang dimulai dengan pernyataan bersejarah untuk mengakhiri kemiskinan di semua tempat secara permanen. Adapun 17 Tujuan SDGs yaitu:

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa berkesetaraan gender
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa

9. Inovasi dan infrastruktur desa
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa

Dalam tujuan SDGs dipilar ekonomi yakni mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pekerjaan yang layak untuk semua, membangun infrastruktur, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkesimbangan dan mendorong inovasi, membuat kota-kota dan permukiman manusia inklusif, aman, ulet, dan berkelanjutan. (www.id.UNDP.org)

Dalam pemerintahan sekarang, pembangunan berfokus dalam membangun daerah pinggiran. Desa didorong untuk selalu melakukan inovasi dan terus melakukan pembangunan infrastruktur di perdesaan. Besarnya dan transfer ke desa diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar perdesaan dan perkotaan. Namun permasalahan yang masih kita lihat yaitu kesenjangan sosial ekonomi, kemiskinan, tingkat stress tinggi, penyalahgunaan lahan, pencemaran lingkungan, tingkat kesadaran masyarakat rendah, pelanggaran hukum, dan masih banyak anak yang putus sekolah. Untuk itu pemerintahan adalah hal yang ingin dilihat oleh semua orang dalam mengatasi masalah tersebut, maka pondasi pemerintahan

harus menyatu, membawa tata kelola yang lebih baik hingga ke tingkat kabupaten bahkan desa.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi di semua sector pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan tarap hidup masyarakat. Sehingga dalam mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. (Arifianto & Setiyono, 2013)

Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktifitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. (Kurniawan, 2009).

United Nations development progame (UNDP) telah menerbitkan suatu indikator yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara di lihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*), rata-rata lama sekolah (*mean year of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Ketiga indikator tersebut akan saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang di tentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan

kebijakan pemerintah sehingga indeks pembangunan manusia akan meningkat. Nilai indeks pembangunan manusia yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.



Sumber: BPS Indonesia (www.bps.go.id)

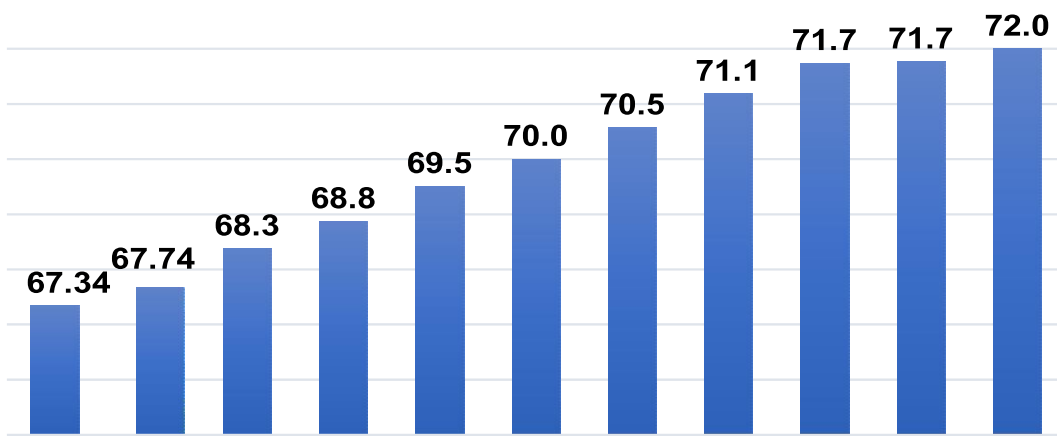
Grafik 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2010-2021

Menurut gambar diatas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2021 mencapai 72,29, meningkat 0,35 poin (0,49 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (71,94). Selama 2010-2021, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,76 persen. Peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Pembangunan manusia diindonesia terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2016, status pembangunan manusia Indonesia meningkaty dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2010-2021 IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,76 persen per tahun, dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 72,29 pada tahun 2021. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 karena COVID-19, peningkatan IPM Indonesia sudah kembali membaik pada tahun 2021 seiring dengan perbaikan

kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil perkapita.

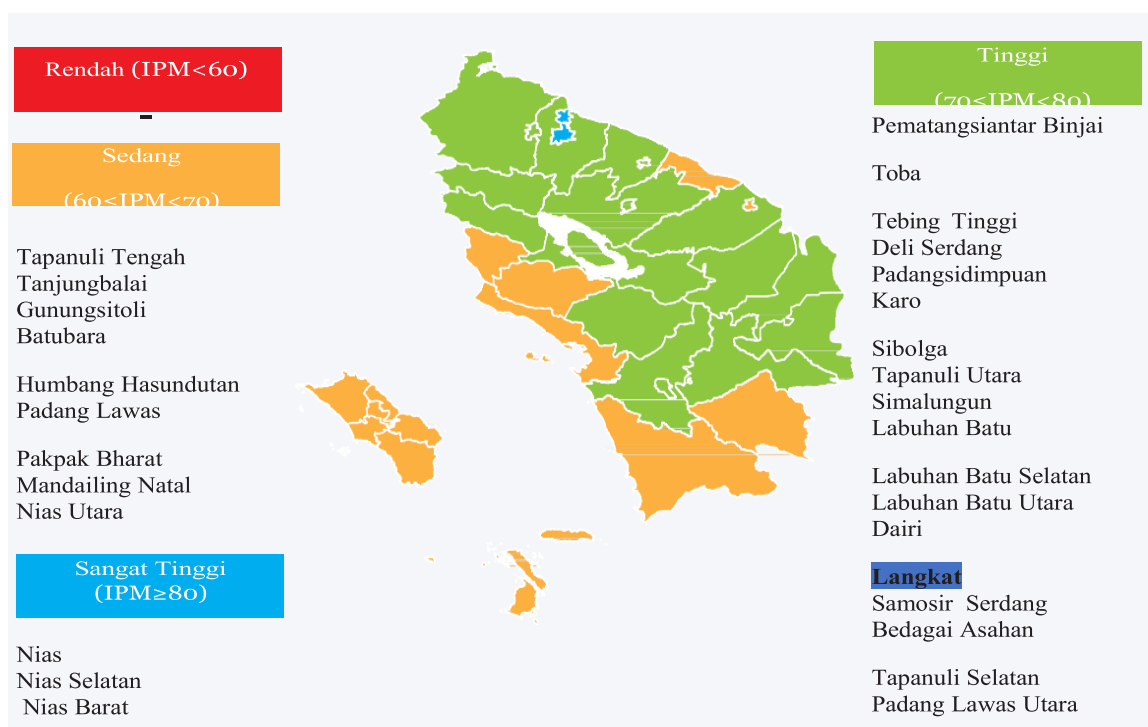
Dilihat dari grafik 1.1 Peningkatan IPM tahun 2021 didukung oleh semua dimensi penyusunannya. Hal ini berbeda dengan kondisi tahun 2020 ketika IPM mengalami perlambatan akibat penurunan pengeluaran riil perkapita. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunannya selama tahun 2010-2021.



Sumber: BPS Provinsi Sumatra Utara (www.bps.go.id)

Grafik 1. 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatra Utara, 2011-2021

Grafik diatas menunjukkan bahwa IPM Sumatra Utara pada tahun 2021 mencapai 72,00. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021 mengalami peningkatan tahun sebelumnya. IPM Sumatra Utara 2021 adalah sebesar 72,00 atau tumbuh 0,32 persen (meningkat 0,23 poin) dibandingkan capaian IPM 2020.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (<https://sumut.bps.go.id>)

Gambar 1. 1 IPM Sumatera Utara

Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2021

Kabupaten Langkat, adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Jumlah penduduknya sekitar 1.041.775 jiwa, luas wilayah Kabupaten Langkat sekitar 1.041.775 km² berjarak 40 km dari kota Medan, Sumatera Utara. Data publikasi Badan Pusat Statistik yang disajikan dalam Grafik 1.1 menunjukkan bahwa angka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Langkat cenderung naik setiap tahunnya, dari tahun 2010 sebesar 64.57 hingga tahun 2020 sebesar 71.00.

Tabel 1. 1 IPM Kabupaten Langkat dan Provinsi Sumatera Utara

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (<https://sumut.bps.go.id>)

Kabupaten Kota	Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Langkat	64.57	65.77	66.18	67.17	68.00	68.53	69.13	69.82	70.27	70.76	71.00
Sumatera utara	67.09	67.34	67.74	68.36	68.87	69.51	70.00	70.57	71.18	71.74	71.77

Dilihat dari Tabel 1.1 "Perkembangan IPM Langkat dalam dua tahun terakhir 2018-2020, menunjukkan peningkatan dan berada pada status menengah atas. Akan tetapi masih dibawah IPM Sumatera Utara. Jika dibandingkan perkembangan IPM kabupaten dan kota di Sumatera Utara, IPM Langkat meningkat akan tetapi peringkatnya tidak mengalami peningkatan tetap diperingkat 15,".

Hal itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik Langkat IPM Langkat untuk tahun 2018 70,27 dan tahun 2020 71,00. Pemerintah berharap kedepan akan terjadi peningkatan IPM warga Langkat, untuk itu kita akan mendorong pertumbuhan ekonomi supaya terus semakin meningkat. walaupun pertumbuhan ekonomi Langkat masih tetap didominasi oleh lapangan usaha pertanian, perikanan, kehutanan.

Terutama dari hasil perkebunan yang merupakan bahan baku utama industri sawit dan karet. Dimana peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam rangka perkembangan lapangan usaha, sehingga pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan lainnya itu dapat ditingkatkan produktifitasnya.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang, Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditunjukkan kepada pengembangan sumber daya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk mengembangkan pilihan-pilihan yang dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. (Rapanna & Fajriah, 2018)

Salah satu faktor yang menentukan pembangunan nasional adalah indeks kualitas hidup. Indeks Kualitas Hidup (IKH) atau *Physical Quality Of Life Index* (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi.

Pembangunan di desa selalu bertumpu pada dua hal yakni upaya peningkatan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Sehingga, Dana Desa harus berdampak pada peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia. Dalam Permendes ini, prioritas penggunaan Dana Desa akan mendorong pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan nasional. (Gus Mentri)

Pasalnya, penetapan Pemerdesa 13 tahun 2020 ini diawali atau dilator belakang oleh pemikiran terkait dengan model pembangunan nasional yang didasarkan pada perpres nomor 59 tahun 2017 terkait tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau *SDGs*.

Di SDGs desa menjadi 18 karena memang dari kondisi obyektif yang kita lihat didalam SDGs global maupun nasional belum memberikan ruangan yang cukup bagi kearifan lokal. Padahal, ini sangat penting didalam prosesi pembangunan Desa.

Adapun 18 poin dari SDGs Desa yakni pertama desa tanpa kemiskinan, kedua desa tanpa kelaparan, ketiga desa sehat dan sejahtera, keempat pendidikan desa berkualitas, kelima keterlibatan perempuan desa, keenam desa layak air bersih dan sanitasi, ketujuh desa berenergi bersih dan terbarukan, kedelapan pertumbuhan ekonomi desa merata, kesembilan infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan.

kesepluluh desa tanpa kesenjangan, kesebelas kawasan permukiman desa aman dan nyaman, kedua belas konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, ketiga belas desa tangkap perubahan iklim, keempat belas desa peduli lingkungan laut, kelima belas desa peduli lingkungan darat, keenam belas desa damai berkeadilan, ketujuh belas kmitraan untuk pembangunan desa dan kedelapan belas desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Setiap desa menerima dana yang besar dari Pemerintah Daerah (APBD) maupun Pemerintah Pusat (APBN). Dana Desa yang diberikan menjadi tiga bagian, yakni Dana Desa yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari APBD. Terkhusus dari dana desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota (Riyadi,2000). Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Jamluddin,et.all.2018). besarnya anggaran yang dikelola oleh desa ini, membuat

pemerintah pusat perlu membuat suatu pengukuran. Sehingga dikeluarkanlah Permendesa PDTT Trans No 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM).

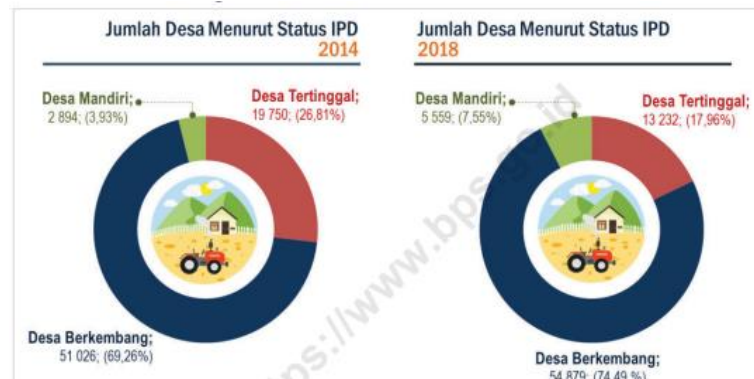
Dalam menggambarkan hasil pembangunan dari pinggiran terdapat beberapa indeks yang dapat digunakan diantaranya Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia. Pengukuran IPD terakhir dibangun dari data hasil pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018 yang dilaksanakan oleh BPS pada bulan Mei 2018 dan digunakan sebagai rujukan indikator-indikator utama penyusun indeks. Sementara IDM adalah indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Indeks ini disusun mulai tahun 2015 dengan memberdayakan seluruh desa di Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam menghasilkan data yang akurat.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri. Desa yang mandiri dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pelaksananya, diatur dalam RPJMN 2015-2019, yang menempatkan desa menjadi sasaran kemajuan wilayah. Tujuannya untuk: (1) memetakan kondisi desa di Indonesia berdasarkan tingkat pengembangannya; (2) menetapkan target pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan yang harus di capai secara bersama-sama oleh para pelaku pembangunan desa; dan (3) memotret kinerja pembangunan

yang sudah dilaksanakan di desa. Mewujudkan amanah tersebut, diperlukan ukuran yang diwujudkan dalam Indeks Pembangunan Desa (IPD).

Melalui IPD, pembangunan desa target RPJMN 2015-2019, mengamanahkan berkurangnya desa tertinggal sebanyak 5.000 desa, serta peningkatan desa mandiri sebanyak 2.000 desa. Atas dasar amanat tersebut maka desa diklasifikasikan berdasarkan IPD menjadi Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Output dari penyusunan IPD ini adalah terpetakannya desa-desa berdasarkan tingkat perkembangan desa menurut IPD kedalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu: Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal di seluruh provinsi di Indonesia disertai dengan informasi untuk masing-masing dimensi dan indikator penyusunnya.

Hingga saat ini, pengukuran pembangunan desa dengan IPD dilaksanakan dua kali, dalam rangka perencanaan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, pengukuran dilaksanakan pada tahun 2015, mengukur desa-desa yang terdaftar dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39/2015. Sementara, data desa yang digunakan adalah data Potensi Desa (Podes) tahun 2014. Sementara itu, pada tahap evaluasi, IPD dihitung kembali pada tahun 2018. Penghitungan IPD tahun 2018 menggunakan daftar dan data desa hasil Pendataan Potensi Desa 2018.



Sumber: BPS Indonesia (www.bps.go.id)

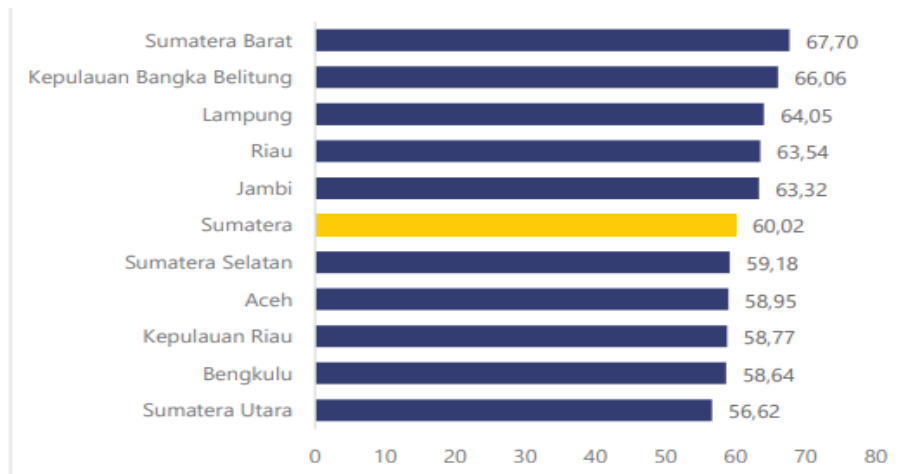
Gambar 1. 2 Jumlah Desa Menurut Status IPD 2014 dan 2018

Berdasarkan gambar 1.4 diatas menunjukkan bahwa Publikasi IPD tahun 2014, desa mandiri berjumlah 2.898 desa; desa berkembang berjumlah 50.763 desa; dan desa tertinggal berjumlah 20.423 desa. Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa desa-desa yang telah teregistrasi, terpetakan menurut kondisi pembangunan desa. Namun, untuk mengetahui perkembangan pembangunan desa dari tahun 2014 dan 2018, dilakukan penyamaan desa antara 2014 dan 2018.

Terlihat dengan jelas pada gambar diatas hasilnya menunjukkan bahwa desa tertinggal berkurang sebanyak 6.518 desa dan desa mandiri bertambah sebanyak 2.665 desa.

Pembangunan desa di Indonesia secara nasional, tahap perkembangan desa dalam kategori desa berkembang dengan nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebesar 59,36. Hasil rata-rata indeks pada tingkat pulau menunjukkan ada tiga pulau yang memiliki nilai indeks di atas rata-rata Indeks Pembangunan Desa nasional (59,36). Ketiga Pulau tersebut adalah pulau Sumatera, Sulawsi, dan Jawa-Bali. Sementara empat pulau lain brada dibawah rata-rata nasional yaitu Pulau

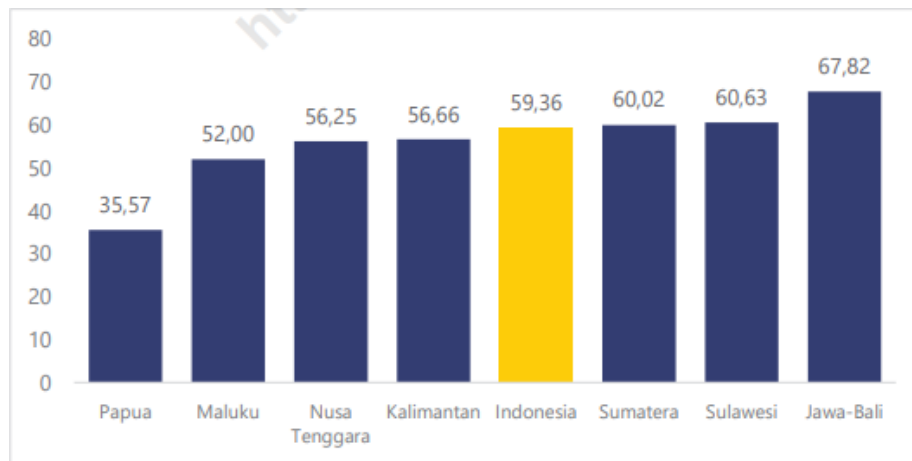
Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.



Sumber: BPS Indonesia (www.bps.go.id)

Grafik 1. 3 Indeks Pembangunan Desa Menurut Pulau, 2018

Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa nilai IPD paling besar terdapat di Pulau Jawa-Bali (67,82). Sementara indeks paling rendah terdapat di Pulau Papua (35,57). Dilihat dari tingkat perkembangannya 73,40 persen desa di Indonesia pada umumnya. Kondisi perkembangan desa Indonesia di Pulau Sumatra memiliki nilai IPD tertinggi adalah Provinsi Sumatra Barat dengan nilai indeks 87,70; diikuti oleh Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung 66,06 serta Provinsi Lampung 64,05. Sedangkan nilai indeks Pembangunan Desa terendah di Pulau Sumatra yaitu Sumatra Utara dengan nilai indeks 56,62. Nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa Pulau Sumatra 60,02 berada diatas rata-rata nasional atau terbesar ketiga setelah Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sulawesi.



Sumber: BPS Indonesia (www.bps.go.id)

Grafik 1. 4 Indeks Pembangunan Desa di Pulau Sumatra, 2018

Tabel 1. 2 IPD Menurut Dimensi, Status IPD, dan Jumlah Desa di Indonesia, 2018

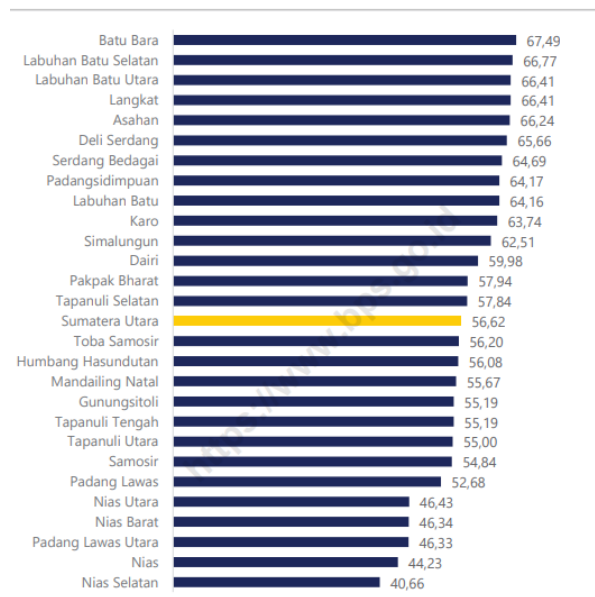
Nama Pulau	IPD 2018	Dimensi IPD					Persentase Desa Menurut Status Desa			Jumlah Desa
		Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sumatera	60,02	59,09	46,15	77,72	54,01	67,85	4,11	25,23	1,48	23 241
Jawa-Bali	67,82	68,31	54,78	81,15	59,14	80,34	0,26	25,28	5,09	23 108
Nusa Tenggara	56,25	53,86	34,41	82,55	45,78	75,25	1,46	3,77	0,13	4 043
Kalimantan	56,66	55,41	40,90	71,01	55,35	71,36	2,24	6,26	0,28	6 624
Sulawesi	60,63	57,81	44,77	83,04	51,81	72,78	1,46	9,83	0,38	8 804
Maluku	52,00	49,08	34,68	73,39	46,30	66,55	1,28	1,66	0,07	2 268
Papua	35,57	26,15	19,76	57,86	42,02	52,24	8,36	1,37	0,02	7 348
Indonesia	59,36	57,65	44,63	77,00	53,60	71,40	19,17	73,40	7,43	75 436

Sumber: BPS Indonesia (www.bps.go.id)

Saat ini desa-desa di Pulau Sumatra didominasi oleh desa-desa berkembang yaitu sekitar 81,88 persen dari total 23.241 unit desa. Sementara persentase desa mandiri sebanyak 4,79 persen (1.114 desa) dan desa tertinggal 13,33 persen (3.097 desa). Dilihat dari dimensinya/transportasi memiliki nilai indeks yang paling besar yaitu 77,72 sedangkan dimensi kondisi infrastruktur memiliki nilai indeks paling kecil yaitu hanya 46,15.

Kondisi Perkembangan Desa Indonesia di Provinsi Sumatra Utara memiliki rata-rata Indeks Pembangunan Desa sebesar 56,62437 desa,. Angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 59,36. Dari 5.437 desa, terdapat 3.768 desa dalam kategori berkembang (69,30 persen), sebanyak 200 desa mandiri (3,68 persen) dan sisanya sebanyak 1.469 desa (27,02 persen) dalam kategori tertinggal.

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Provinsi Sumatra Utara memiliki nilai rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 41,71. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks adalah sebesar 54,94, dimensi pelayanan umum sebesar 49,76, dan dimensi penyelenggaraan pemerintah sebesar 62,43.



Sumber: BPS Provinsi Sumatra Utara (<https://sumut.bps.go.id>)

Grafik 1. 5 IPD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara, 2018

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa tertinggi di Provinsi Sumatra Utara terdapat di Kabupaten Batu Bara dengan angka 67,49. Sedangkan kabupaten Langkat berada di posisi ke 4 (Empat) dengan angka 66,41 sama seperti Kabupaten

Labuhan Batu Utara. Dan untuk rata-rata nilai indeks terendah di Provinsi Sumatra Utara terdapat di Kabupaten Nias Selatan dengan rata-rata IPD sebesar 40,66.

Hasil IPD dapat memberikan gambaran bahwa desa-desa yang telah teregistrasi, terpetakan menurut kondisi pembangunan desa. Perkembangan pembangunan desa yang secara panel ini dilakukan untuk mengetahui realitas pembangunan desa yang sesungguhnya, dan memperkirakan seberapa besar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dibangun di tingkat desa.

Sementara itu, Indeks Desa Membangun (IDM) yang dibangun oleh Kemendesa PDTT merupakan indeks yang memetakan status perkembangan desa yang memperhatikan karakteristiknya. Indeks ini digunakan sebagai instrumen untuk melakukan *targeting* dalam pencapaian IKU Kementerian Desa, PDTT 2015-2019.

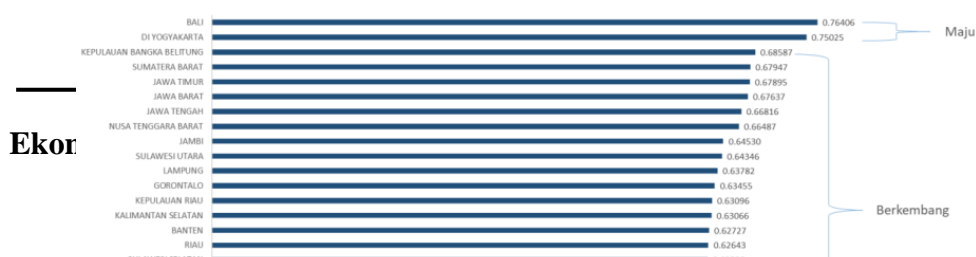
Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam

konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pengakuan dan penghormatan Negara kepada Desa yang disertai dengan redistribusi sumberdaya dan kewenangan pembangunan secara penuh sebagaimana mandat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, memberikan tanda yang jelas bahwa dari situlah Desa harus menjadi tumpuan untuk membangun Indonesia. Disebutkan Menteri Desa, "IDM ini lebih komperhensif jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD), karena IDM ini mengedepankan pendekatan yang bertumpu kepada kekuatan sosial, ekonomi dan ekologi, tanpa melupakan kekuatan politik, budaya, sejarah, dan kearifan lokal" guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ada guna mengurangi angka kemiskinan.

Dalam konteks tipologi desa, Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: "(i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri". Dari kelima klasifikasi tersebut maka kini statrata desa sudah memiliki beberapa pembagian yang digunakan sebagai indikator atau parameter desa.

Tipologi pembagian Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dibagi ke beberapa hal seperti: "(1) desa sangat tertinggal: $< 0,491$; (2) desa tertinggal: $> 0,491$ dan $< 0,599$; (3) desa berkembang: $> 0,599$ dan $< 0,707$; (4) desa maju: $> 0,707$ dan $< 0,815$; dan (5) desa mandiri: $> 0,815$ " (Suroso, 2019). Tipologi tersebut sejalan dengan Permendes No. 6 Tahun 2016 yang mengatur peta pembangunan desa.



Sumber: BPS Indonesia (www.bps.go.id)

Grafik 1. 6 rata-rata IDM di Indonesia Provinsi, 2019

Dapat dilihat pada gambar diatas bahwa nilai IDM paling besar terdapat di Provinsi Bali dengan nilai 0,76406 yang memasuki kategori maju. Sementara nilai rata-rata nasional memiliki nilai sebesar 0,61600 yang memasuki kategori berkembang. Dan pada tahun 2019 terdapat 12 Provinsi yang memiliki IDM dibawah nilai rata-rata atau tertinggal salah satunya termasuk Provinsi Sumatra Utara dengan nilai indeks 0,58643.

Dengan begitu kita dapat melihat persentasi di Provinsi Sumatra Utara yang mempunyai kategori mulai dari Kabupaten yang maju sampai Kabupaten tertinggal. Berikut tabel dibawah ini :

Tabel 1. 3 Nilai Indeks Desa Membangun di Provinsi Sumatra Utara,2019

Provinsi/Kabupaten	Average of IKS 2019	Average of IKE 209	Average of IKL 2019	Average of Nilai IDM	Jumlah Desa	Status Kabupaten
SUMATRA UTARA	0.6581	0.4639	0.6373	0.5864	5,417	TERTINGGAL
KOTA PADANGSIDIMPUAN	0.7480	0.5738	0.6429	0.6549	42	BERKEMBANG
LABUHAN BATU SELATAN	0.7897	0.5609	0.6051	0.6519	52	BERKEMBANG
DELI SERDANG	0.7425	0.5440	0.6535	0.6467	380	BERKEMBANG
LANGKAT	0.7546	0.5215	0.6531	0.6430	240	BERKEMBANG

ASAHAN	0.7401	0.5250	0.6512	0.6388	177	BERKEMBANG
KARO	0.7042	0.5382	0.6674	0.6366	259	BERKEMBANG
SERDANG BEDAGAI	0.7399	0.5175	0.6523	0.6366	237	BERKEMBANG
BATU BARA	0.7450	0.4991	0.6653	0.6364	141	BERKEMBANG
PAKPAK BHARAT	0.7304	0.5010	0.6757	0.6357	52	BERKEMBANG
SIMALUNGUN	0.7116	0.5347	0.6561	0.6342	386	BERKEMBANG
LABUHANBATU	0.7720	0.5096	0.6196	0.6337	75	BERKEMBANG
LABUHANBATU UTARA	0.7443	0.4876	0.6016	0.6112	82	BERKEMBANG
SAMOSIR	0.6899	0.4870	0.6417	0.6062	128	BERKEMBANG
HUMBANG HASUNDUTAN	0.6635	0.4832	0.6580	0.6016	153	BERKEMBANG
TAPANULI SELATAN	0.6761	0.4933	0.6123	0.5939	211	TERTINGGAL
TOBA SAMOSIR	0.6588	0.4841	0.6251	0.5893	231	TERTINGGAL
DAIRI	0.6328	0.4870	0.6257	0.5818	161	TERTINGGAL
PADANG LAWAS	0.6122	0.4603	0.6506	0.5744	303	TERTINGGAL
KOTA GUNUNGSITOLI	0.6107	0.4298	0.6783	0.5729	98	TERTINGGAL
TAPANULI TENGAH	0.6175	0.4463	0.6302	0.5647	159	TERTINGGAL
TAPANULI UTARA	0.6355	0.4453	0.6072	0.5627	241	TERTINGGAL
MANDAILING NATAL	0.6159	0.4539	0.6122	0.5607	377	TERTINGGAL
PADANG LAWAS UTARA	0.5851	0.4008	0.6358	0.5406	386	TERTINGGAL
NIAS	0.5756	0.3287	0.6298	0.5114	170	TERTINGGAL
NIAS UTARA	0.5637	0.3281	0.6333	0.5084	112	TERTINGGAL
NIAS SELATAN	0.5321	0.3249	0.6311	0.4960	459	TERTINGGAL
NIAS BARAT	0.5439	0.3217	0.5416	0.4691	105	SANGAT TERTINGGAL

Sumber: BPS Provinsi Sumatra Utara (www.sumut.bps.go.id)

Menurut tabel 1.3 Pada tahun 2019 IDM Provinsi Utara memiliki 14 kategori Kabupaten berkembang, 12 kategori tertinggal dan 1 Kabupaten yang sangat tertinggal. Nilai IDM tertinggi dipegang oleh Kabupaten Kota Padangsidempuan dengan nilai 0.6549 yang termasuk kategori berkembang. Sedangkan Kabupaten Langkat berada di peringkat ke 4 (empat) dengan memiliki nilai 0.6430 yang juga termasuk kategori berkembang. Dan IDM yang berada di urutan terakhir yaitu Kabupaten Nias Barat dengan nilai 0.4691 yang termasuk kategori sangat tertinggal.

Dengan begitu kita dapat melihat persentasi di Kabupaten Langkat yang

mempunyai kategori mulai dari Kecamatan yang maju sampai tertinggal. Berikut tabel dibawah ini :

Tabel 1. 4 Nilai Indeks Desa Membangun di Kabupaten Langkat, 2019

Kabupaten/Kecamatan	Average of IKS 2019	Average of IKE 209	Average of IKL 2019	Average of Nilai IDM	Jumlah Desa	Status Kecamatan
LANGKAT	0.7546	0.5215	0.6531	0.6430	240	BERKEMBANG
BAHOROK	0.7844	0.4648	0.8667	0.7053	18	BERKEMBANG
SAWIT SEBERANG	0.8581	0.5306	0.6556	0.6814	6	BERKEMBANG
BABALAN	0.8315	0.6250	0.5667	0.6744	4	BERKEMBANG
PANGKALAN SUSU	0.7587	0.5815	0.6519	0.6640	9	BERKEMBANG
STABAT	0.8667	0.5806	0.5445	0.6639	6	BERKEMBANG
SECANGGANG	0.7664	0.6062	0.6125	0.6617	16	BERKEMBANG
SEI BINGEI	0.7429	0.5756	0.6667	0.6617	15	BERKEMBANG
BINJAI	0.7562	0.5028	0.7222	0.6604	6	BERKEMBANG
SIRAPIT	0.7623	0.5433	0.6733	0.6597	10	BERKEMBANG
WAMPU	0.7943	0.5154	0.6359	0.6485	13	BERKEMBANG
SEI LEPAN	0.8000	0.4593	0.6815	0.6469	9	BERKEMBANG
SALAPIAN	0.7297	0.5625	0.6375	0.6432	16	BERKEMBANG
HINAI	0.7600	0.5458	0.6222	0.6427	12	BERKEMBANG
GEBANG	0.7206	0.5000	0.7067	0.6424	10	BERKEMBANG
SELESAI	0.7112	0.5397	0.6667	0.6392	13	BERKEMBANG
TANJUNG PURA	0.7302	0.4935	0.6148	0.6128	18	BERKEMBANG
BESITANG	0.7657	0.5306	0.6111	0.6358	6	BERKEMBANG
PADANG TUALANG	0.7865	0.5303	0.5576	0.6248	11	BERKEMBANG
KUALA	0.7253	0.5012	0.6095	0.6120	14	BERKEMBANG
KUTAMBARU	0.7057	0.4542	0.6334	0.5977	8	TERTINGGAL
BERANDAN BARAT	0.7143	0.4467	0.6134	0.5914	5	TERTINGGAL
PEMATANG JAYA	0.6764	0.4167	0.6667	0.5866	8	TERTINGGAL
BATANG SERANGAN	0.7094	0.4405	0.6095	0.5865	7	TERTINGGAL

Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.langkat.bps.go.id)

Menurut tabel 1.4 pada tahun 2019 IDM Kabupaten Langkat memiliki 19 kategori Kecamatan yang berkembang dan 4 kategori yang tertinggal. Nilai IDM tertinggi dipegang oleh Kecamatan Bahorok dengan nilai 0.7053 yang termasuk kategori berkembang. Dan Kecamatan yang memiliki nilai IDM terendah yaitu Kecamatan Batang Serangan dengan Nilai IDM 0.5865 yang termasuk dalam kategori tertinggal sedangkan Kecamatan Brandan Barat berada di urutan 3 (tiga)

kebawah dengan nilai IDM 0.5914 dengan kategori tertinggal.

Dengan begitu kita dapat melihat persentasi di Kecamatan Brandan barat yang mempunyai kategori mulai dari Desa yang maju sampai Desa tertinggal. Berikut tabel dibawah ini

Tabel 1. 5Nilai Indeks Desa Membangun di Kecamatan Brandan Barat, 2019

Kecamatan/Desa	Average of Nilai IDM	Status Kecamatan
BERANDAN BARAT	0.5914	TERTINGGAL
LUBUK KASIH	0.6316	BERKEMBAG
PERLIS	0.5852	TERTINGGAL
LUBUK KERTANG	0.5584	TERTINGGAL
KELANTAN	0.5412	TERTINGGAL
SEI TUALANG	0.5284	TERTINGGAL

Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.langkat.bps.go.id)

Dapat kita lihat pada tabel 1.4 pada tahun 2019 IDM Kecamatan Brandan Barat memiliki 1 kategori Desa yang berkembang dan 4 kategori yang tertinggl. Nilai IDM tertinggi dipegang oleh Desa Lubuk Kasih dengan nilai 0.6316 yang termasuk kategori berkembang. Dan Desa yang memilki nilai IDM terendah yaitu Desa Sei Tualang dengan Nilai IDM 0.5284 yang termasuk dalam kategori tertinggal sedangkan Desa Perlis berada diurutan 4 (empat) kebawah dengan nilai IDM 0.5853 dengan begitu perlis merupakan kategori desa tertinggal.

Desa Perlis terletak di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat.. Wilayahnya terdiri dari sebuah pulau hasil endapan lumpur yang seolah-olah terpisah dari pulau Sumatra dengan luas 611 ha. Penduduk Desa ini mendirikan pemukimannya dipinggir sungai, bahkan ada rumah yang berdiri diatas air dan

bagian depannya menghadap langsung ke aliran utama sungai.

Jarak Desa Perlis dari ibukota Provinsi Sumatra Utara, Medan, sekitar 84 Km dan 45 Km dari ibukota Kabupaten Langkat, Stabat. Kalau kita berada di Pangkalan Brandan , salah satu tempat penghasil minyak ternama di zaman Belanda. Tanggal 13 Agustus 1947 terjadi peristiwa bersejarah yang dikenal dengan sebutan Brandan Bumi Hangus. Peristiwa itu sebagai salah satu strategi pejuang sebagai bentuk perlawanan terhadap agresi Belanda dimana seluruh instalasi dan fasilitas industri perminyakan di Pangkalan Brandan dibakar dan dibumi hanguskan.

Pada tahun 1871 pengeboran sumur minyak pertama dilakukan di Cerebon. Namun, sumur produksi pertama adalah sumur Telaga Said di wilayah Sumatra Utara yang dibor pada tahun 1883, kemudian di susul Royal Dutch Company diPangkalan Brandan pada tahun 1885. Akibat peristiwa ini Pangkalan Brandan beserta industri perminyakannya luluh lantak dan terbakar sehingga sistem eksplorasi yang biasanya berjalan akhirnya berhenti total.

Desa Perlis nampak disebrang sungai, nama sungai tersebut adalah sungai Babalan. Matapencaharian masyarakat desa adalah Nelayan (perikanan). Kecamatan Brandan Barat merupakan salah satu Kecamatan dengan jumlah nelayan dan pengolahan ikan yang cukup banyak di Kabupaten Langkat. Unit pengolahan ikan di Kecamatan Brandan Barat terdiri dari unit pengolahan pengasinan, pemindangan dan pembuatan terasi.

Selain sektot perikan, Kabupaten Langkat juga mempunyai potensi mangrove yang sangat besar. Hutan mangrove terluas di Sumatra Utara terdapat di Kabupaten langkat dengan luas 11.709,16 Ha. Salah satu kecamatan yang

mengalami perubahan luas hutan yang signifikan yaitu Kecamatan Brandan Barat tepatnya di Desa Perlis. Keadaan mangrove di Desa Perlis mengalami kerusakan yang begitu parah karena adanya penebangan hutan secara *illegal* dan konversi hutan mangrove menjadi lahan tambak dan perkebunan sawit.

Maka dari itu, tantangan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks merupakan akibat dari kompetisi ekonomi global, serta perubahan iklim dan kependudukan yang menuntut perlunya kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah melalui konsep *Blue Economy*.

Di tataran ekonomi makro, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim Investasi, menjaga regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dan mengembangkan infrastruktur wilayah tertinggal, "Untuk ekonomi mikro, bagi masyarakat sangat miskin dan miskin, pemerintah berupaya memberikan bantuan pangan (rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan), dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat, Selanjutnya, untuk masyarakat miskin dan rentan, pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan dengan akses permodalan, meningkatkan kualitas produk dan akses pemasaran, mengembangkan keterampilan layanan usaha, serta mengembangkan kewirausahaan, kemitraan, dan keberantaraan kemudian langkah lainnya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan alokasi subsidi dialihkan ke Dana Desa dan Transfer Daerah untuk mengurangi ketimpangan. Reformasi subsidi terus dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran,

kesinambungan fiskal dan diversifikasi energi (Merdeka.com 2019).

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang berkenaan dengan penggunaan Dana Desa terhadap pengembangan ekonomi desa dalam meningkatkan kualitas hidup di Desa Perlis . Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan melihat apakah dengan adanya kebijakan Dana Desa dapat mengembangkan ekonomi desa dalam mendukung kualitas hidup masyarakat desa berdasarkan IPD dan IDM. Untuk itu, penelitian ini berjudul **“Analisi Kebijakan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Brandan Barat (Studi Kasus : Desa Perlis)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka didapat beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kondisi perkembangan desa Indonesia di Pulau Sumatra memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) tertinggi, sedangkan nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) terendah di Pulau Sumatra yaitu Sumatra Utara dengan nilai Indeks 56,62. Nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa (IPD) Pulau Sumatra 60,02 yang posisinya diatas nilai rata-rata nasional.
2. Indeks Desa Membangun (IDM) memiliki nilai rata-rata nasional sebesar 0,61600 yang memasuki kategori berkembang sedangkan Provinsi Sumatra Utara memiliki nilai indeks 0,58643 dengan kategori tertinggal.
3. Kabupaten Langkat termasuk dalam golongan kategori berkembang dengan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) 0.6430 ,yang terdiri dari 19 kecamatan yang berkembang dan 4 kategori tertinggal.

4. Brandan Barat memiliki 1 kategori Desa yang berkembang dan 4 Desa yang tertinggal, salah satunya Desa Perlis dimana Desa yang memiliki nilai Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0.5852.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1 Batasan Masalah

Ada banyak masalah yang bisa diangkat dari penelitian ini, namun penulis perlu membatasi masalah yang lebih terperinci dan jelas agar pemecahannya terarah. Jadi penelitian ini hanya dibatasi pada masalah menganalisa seberapa besar dampak kebijakan Dana Desa terhadap capaian Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Langkat.

1.3.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Kabupaten Langkat sebelum kebijakan Dana Desa dan selama ada Dana Desa?
2. Bagaimana capaian dari Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Langkat dan Kecamatan Brandan Barat pada masa pemerintahan Jokowi?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Kabupaten Langkat Pasca Kebijakan Dana Desa

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan kategorisasi desa Indeks Pembangunan Desa (IPD) pada Kabupaten

Langkat tahun 2014 dan 2018.

2. Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang capaian kategori Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Langkat dan Kecamatan Brandan Barat tahun 2019-2021.
3. Melakukan Estimasi Indeks Pembangunan Desa (IPD) mulai dari tahun 2015 sampai sekarang

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan dunia di sektor keuangan negara dan pembangunan Desa. Manfaat yang dapat diambil diantaranya.

1.5.1 Manfaat Akademik

a. Bagi peneliti:

- 1) Sebagai bahan studi atau tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut topik yang sama.
- 2) Sebagai tambahan literatur terhadap penelitian sebelumnya.

b. Bagi Mahasiswa:

- 1) Melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis, dan sistematis.
- 2) Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.

1.5.2 Manfaat Non-akademik

Sebagai bahan masukan dalam penetapan kebijakan pemerintah. Penelitian ini dijadikan sebagai penambahan pengetahuan bagi masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan biasa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (*income per capita*) yang berkelanjutan agar negara dapat

memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan nasional bruto (*gross national income-GNI*) per kapita “*riil*” (pertumbuhan moneter dari GNI per kapita dikurangi tingkat inflasi) sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk keseluruhan-seberapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia untuk dikonsumsi dan diinvestasikan oleh rata-rata penduduk (Todaro & Smith, 2017).

Pembangunan ekonomi di masa lalu umumnya dipandang dalam kaitannya dengan perubahan secara terencana atas struktur produksi dan kesempatan kerja. Dalam proses ini, peran sektor pertanian akan menurun untuk memberi peluang muncul dan berkembangnya sektor manufaktur dan jasa. Oleh sebab itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada proses industrialisasi yang cepat, yang sering merugikan pembangunan pertanian dan pedesaan (Todaro & Smith, 2017)

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi – institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2017).

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja semakin bertambah, tingkat

pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi (Sukirno, 2006).

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan, salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan atau pengumpulan modal. Pembentukan modal meliputi modal materil maupun modal manusia. Ada berbagai pendapat, bahwa dalam pembangunan ekonomi yang dibutuhkan hanya modal materil saja, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa modal manusia juga dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembentukan modal diharapkan tujuan pokok pembangunan akan tercapai (Jhingan, 2010).

A. Teori Pembangunan Ekonomi Klasik

1. Adam Smith

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang dianggap paling terkemuka. Karyanya yang sangat terkenal, adalah sebuah buku yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* yang diterbitkan 1776, terutama menyangkut permasalahan pembangunan ekonomi. Walaupun ia tidak memaparkan teori pertumbuhan secara sistematis namun teori yang berkaitan dengan itu kemudian disusun oleh para ahli ekonomi berikutnya seperti akan dijelaskan di bawah ini:

Adam Smith meyakini berlakunya doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya sendiri. Smith pada dasarnya menentang setiap campur-tangan pemerintah dalam industri perniagaan. Ia adalah seorang penganut paham

perdagangan bebas dan penganjur kebijaksanaan “pasar bebas” dalam ekonomi. Kekuatan yang tidak terlihat, yaitu pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis, cenderung untuk memaksimalkan kesejahteraan nasional.

Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan: (1) meningkatnya keterampilan pekerja; (2) penghematan waktu dalam memproduksi barang; (3) penemuan yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir dari kenaikan produktivitas ini bukan berasal dari tenaga kerja tetapi dari modal. Teknologi majulah yang melahirkan pembagian kerja dan perluasan pasar. Tetapi apa yang mengarahkan pada pembagian kerja adalah kecenderungan tertentu pada sifat manusia, yaitu kecenderungan untuk tukar-menukar, barter dan mempertukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Akan tetapi pembagian kerja tergantung pada besarnya pasar.

Adam Smith menekankan, pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Ia menulis “karena pemupukan stok dalam bentuk barang harus lebih dulu dilakukan sebelum pembagian kerja, maka pekerjaan hanya dapat dibagi lebih lanjut secara seimbang, jika stok lebih dulu diperbesar. Seperti ahli ekonomi modern, Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. “Modal suatu bangsa meningkat dengan cara yang sama seperti meningkatnya modal perorangan yaitu

dengan jalan memupuk dan menambah secara terus-menerus tabungan yang mereka sisihkan dari pendapatan.” Maka dari itu, cara yang paling cepat ialah dengan menanamkan modal sedemikian rupa sehingga-dapat memberikan penghasilan yang paling besar kepada seluruh penduduk agar mereka sanggup menabung sebanyak-banyaknya. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

2. David Ricardo

David Ricardo juga mengungkapkan pandangannya mengenai pembangunan ekonomi dengan cara yang tidak sistematis dalam bukunya *The Principles of Political Economy and Taxation*. Buku ini diterbitkan 1917. Edisi ketiga 1921 serta korespondensi Ricardo dengan beberapa ahli ekonomi lainlah yang menurut ide-ide Ricardo yang menjadi dasar pembentukan model pembangunan Ricardo. Sesungguhnya Ricardo tidak pernah mengajukan satu pun teori pembangunan. Menurut Schumpeter, ia hanya mendiskusikan teori distribusi. Oleh sebab itu analisa Ricardo merupakan analisa yang memutar.

Asumsi teori Ricardo Teori-teori Ricardian didasarkan pada asumsi bahwa:

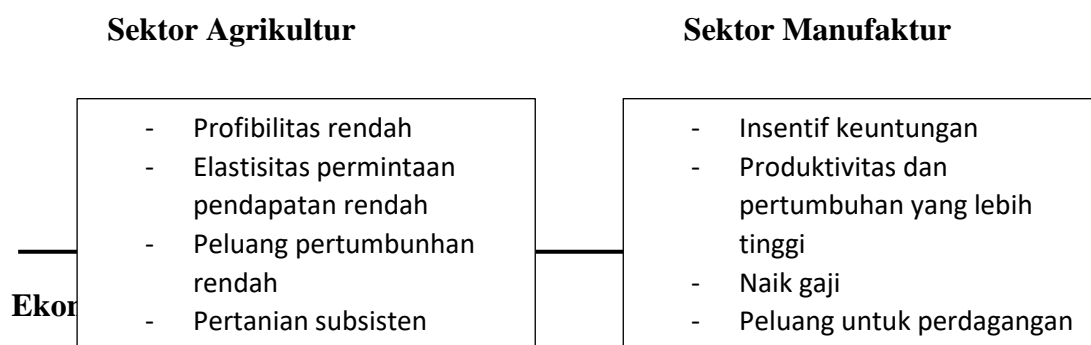
- 1) Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri;
- 2) “*law of diminishing return*” berlaku bagi tanah;
- 3) Persediaan tanah adalah tetap;
- 4) Permintaan akan gandum benar-benar inelastis;
- 5) Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel;
- 6) Keadaan pengetahuan teknik adalah tertentu (*given*);

- 7) Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal;
- 8) Harga penawaran buruh adalah tertentu dan tetap
- 9) permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal; dan bahwa baik harga permintaan maupun penawaran buruh tidak tergantung pada produktivitas marginal tenaga kerja;
- 10) Terdapat persaingan yang sempurna;
- 11) Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan;

Berdasarkan asumsi tersebut, Ricardo membangun teorinya tentang saling hubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian, yaitu tuan tanah, kapitalis, dan buruh. Kepada mereka inilah keseluruhan hasil dibagi-bagikan. Sementara Ricardo sendiri menulis dalam pendahuluan bukunya, “Hasil bumi (hasil yang diperoleh dari permukaannya dengan menggunakan buruh secara terpadu, mekanisasi, dan modal) dibagi-bagikan kepada tiga kelas masyarakat yaitu pemilik tanah, pemilik stok kapital yang diperlukan bagi pengolahan tanah, dan para buruh yang mengerjakan.” Keseluruhan pendapatan nasional dibagi-bagikan kepada tiga kelompok tersebut masing-masing sebagai uang sewa, keuntungan, dan upah. (Jhingan, 2010)

B. Teori Pembangunan Ekonomi Arthur Lewis

Ekonomi Ganda



Gambar 2. 1 Ekonomi Ganda Pembangunan Ekonomi Arthur Lewis

Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu:

1 . Perekonomian Tradisional

Teori Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisional nya mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada di perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang bersifat subsisten pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal (*marginal product*) dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum *law of diminishing return*. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel tenaga kerja yang terlalu besar. Dalam perekonomian semacam ini, pangsa semua pekerjaan terhadap output yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian, nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

2 . Perekonomian Industri

Perekonomian ini terletak di perkotaan, di mana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktifitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa nilai produk marginal terutama tenaga kerja bernilai positif. Dengan demikian, perekonomian di perkotaan akan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari pedesaan, karena nilai produk marginal dari tenaga kerja yang positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai. Jika ini terjadi, berarti penambahan tenaga kerja pada system produksi yang ada akan meningkatkan *output* yang diproduksi. Maka industri di perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan, dan ini akan dipenuhi oleh masyarakat pedesaan dengan jalan berurbanisasi. Lewis mengasumsikan pula bahwa tingkat upah di kota 30% lebih tinggi daripada tingkat upah di pedesaan yang relatif bersifat subsisten dan tingkat upah cenderung tetap, sehingga kurva penawaran tenaga kerja akan berbentuk *horizontal*. Perbedaan upah tersebut jelas akan menambah daya tarik untuk melakukan urbanisasi.

Perbedaan tenaga kerja dari desa ke kota dan pertumbuhan pekerja di sektor modern akan mampu meningkatkan ekspansi output yang dihasilkan di sektor modern tersebut. Percepatan ekspansi output sangat ditentukan oleh ekspansi di sektor industri dan akumulasi modal di sektor modern. Akumulasi modal yang nantinya digunakan untuk investasi hanya akan terjadi jika terdapat akses keuntungan pada sektor modern, dengan asumsi bahwa pemilik modal akan menginvestasikan kembali modal yang ada ke industri tersebut.

C. Teori Pembangunan Ekonomi Hollis B. Chenery

Analisis teori *Pattern of Development* memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian yang dilakukan Hollis B. Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi di suatu negara, berhubungan erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumberdaya manusia (human capital). (Todaro & Smith, 2017)

Dari sisi tenaga kerja, akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri, meski pergeseran ini masih tertinggal dibandingkan proses perubahan structural itu sendiri. Dengan keberadaan lag inilah maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, baik pada awal hingga akhir dari proses transformasi struktural tersebut. Produktifitas di sektor pertanian yang rendah lambat laun akan mulai meningkat, dan memiliki produktifitas yang sama dengan pekerja di sektor industri pada masa tansisi. Dengan demikian, produktifitas tenaga kerja dalam perekonomian secara menyeluruh akan mengalami peningkatan. (Todaro & Smith, 2017)

Salah satu dampak negatif dari perubahan struktural tersebut adalah meningkatnya arus urbanisasi yang akan menghambat proses pemerataan hasil

pembangunan, di mana peningkatan pendapatan hanya akan terjadi di perkotaan. Sementara itu di sektor pedesaan yang ditinggalkan para pekerja akan mengalami pertumbuhan yang lambat, sehingga akan semakin memperlebar jurang pemisah antara desa dan kota. Transformasi struktural hanya akan berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan penurunan derajat dualism ekonomi antara desa dan kota. Jika hal itu dipenuhi maka proses transformasi struktural akan diikuti oleh peningkatan pendapatan dan pemerataan pendapatan yang terjadi secara simultan. (Todaro & Smith, 2017)

D. Teori Pembangunan Ekonomi Fei-Ranis

Teori pembangunan ekonomi Fei-Ranis berkenaan dengan suatu negara terbelakang yang kelebihan buruh disertai perekonomian yang miskin sumberdaya, dimana sebagian besar penduduk bergerak di bidang pertanian di tengah pengangguran hebat dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ekonomi pertaniannya berhenti. Kebanyakan orang bergerak di lapangan pertanian tradisional. Bidang- bidang nonpertanian memang ada, tetapi begitu banyak mempergunakan modal. Disitu juga ada sektor industri yang aktif dan dinamis. Pembangunan terdiri dari pengalokasian kembali surplus tenaga kerja di bidang pertanian, yang sumbangannya terhadap *output* adalah nol atau dapat diabaikan, ke sektor industri di mana mereka menjadi produktif dengan upah yang sama dengan upah di bidang pertanian.

Asumsi di dalam mengemukakan teori pembangunan ekonominya, Fei dan Ranis membuat asumsi berikut:

- 1) Ada ekonomi dua-muka yang terbagi dalam sektor pertanian tradisional yang mandeg, dan sektor industri yang aktif.
- 2) *Output* sektor pertanian adalah fungsi dari tanah dan buruh aja.
- 3) Di sektor pertanian tidak ada akumulasi modal selain dalam bentuk penggarapan tanah kembali (reklamasi).
- 4) Persediaan atau penawaran tanah bersifat tetap.
- 5) Kegiatan pertanian ditandai dengan hasil (*return to scale*) yang tetap dengan buruh sebagai faktor variabel.
- 6) Diasumsikan bahwa produktivitas marginal buruh adalah nol.
Jika penduduk melampaui jumlah di mana produktivitas marginal buruhnya nol, buruh dapat dialihkan ke sektor industri tanpa mengurangi keluaran (*output*) pertanian.
- 7) *Output* sektor industri adalah fungsi dari modal dan buruh aja.
- 8) Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai fenomena eksogen.
- 9) Upaya nyata di sektor industri dianggap tetap dan sama dengan tingkat pendapatan nyata (sebelumnya) sektor pertanian.
- 10) Pekerja di masing-masing sektor hanya mengkonsumsi produk pertanian.

Berdasarkan asumsi ini, Fei dan Ranis menelaah pembangunan ekonomi surplus-buruh menjadi tiga tahap. Pada *tahap pertama*, para penganggur tersamar yang tidak menambah *output* pertanian, dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Pada *tahap kedua*, pekerja pertanian menambah keluaran pertanian tetapi memproduksi lebih kecil daripada upah institusional yang mereka peroleh. Ini mengawali *tahap ketiga*, yang menandai akhir tahap tinggal landas dan

awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan lebih besar daripada perolehan upah institusional. Di dalam tahap ini kelebihan buruh sudah terserap dan sektor pertanian berangkat menjadi komersial.

2.1.2 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi diperkenalkan oleh John Maynard Keynes, yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa Depresiasi Besar (Great Depression) terjadi pasca Perang Dunia I tahun 1929. Menurut Keynes, pemerintah suatu negara sebenarnya punya hak mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro Negara.

Dari segi definisinya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, melalui Indische Comptabiliteitswet tahun 1944. Undang-undang tersebut kemudian diadaptasi pemerintah guna menyusun kebijakan fiskal di Indonesia mulai Proklamasi sampai tahun 1997 - 2003.

Pasca tahun 2003 hingga saat ini, kebijakan fiskal di Indonesia sudah tidak disadur lagi dari ICW 1944, melainkan berdasarkan pada analisa perekonomian negara dengan berlandaskan pada UUD 1945. Pihak yang memiliki wewenang

membuat kebijakan fiskal di Indonesia adalah Kementerian Keuangan RI bersama-sama dengan Presiden.

A. Tujuan kebijakan fiskal

1. Menjaga dan mengamankan perekonomian Negara

Poin pertama tujuan kebijakan fiskal adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro.

2. Meningkatkan Kualitas SDM

Tujuan kebijakan fiskal salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

3. Menjaga Stabilitas Harga Barang

Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya *demand* sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggungjawab.

4. Mendorong Investasi

Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir adalah untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor. Sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha.

B. Jenis Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang terbagi menjadi beberapa kategori. Selengkapnya tentang jenis kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoretis, jenis kebijakan fiskal di Indonesia terbagi 3, yaitu kebijakan fiskal fungsional, terencana, dan insidental.

- a. Kebijakan Fiskal Fungsional

Pengertian kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro, dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contoh kebijakan fiskal fungsional misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan start-up, dan sebagainya.

- b. Kebijakan Fiskal Disengaja/Terencana

Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contoh kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha.

c. Kebijakan Fiskal Tak Disengaja/Insidental

Kebijakan fiskal tak disengaja yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan/aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah, contohnya penetapan harga eceran tertinggi.

2. Dari Segi Penerapan

Jenis kebijakan fiskal dari segi implementasinya ada 2, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif.

a. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Pengertian kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsi kebijakan fiskal ekspansif adalah demi meningkatkan daya beli barang, sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja.

b. Kebijakan Fiskal Kontraktif

Jenis kebijakan fiskal dari segi penerapan berikutnya adalah kebijakan fiskal kontraktif, kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio gini.

3. Dari Segi Neraca Pembayaran

Jenis kebijakan fiskal dari segi neraca terbagi 4, yaitu kebijakan fiskal seimbang, surplus, defisit, dan dinamis.

a. Kebijakan Fiskal Seimbang

Kebijakan fiskal satu ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Meski terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki risiko besar, karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya.

b. Kebijakan Fiskal Surplus

Pengertian kebijakan fiskal surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsi kebijakan fiskal surplus adalah demi mencegah terjadinya inflasi.

c. Kebijakan Fiskal Defisit

Kebalikan dari jenis kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Salah satu contoh kebijakan fiskal defisit adalah utang luar negeri.

d. Kebijakan Fiskal Dinamis

Jenis kebijakan fiskal terakhir dari segi penerapan adalah regulasi fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan.

C. Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Lebih detail tentang instrumen kebijakan fiskal di Indonesia di antaranya:

1. Pajak

Poin pertama instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan.

2. Pengeluaran Belanja

Instrumen kebijakan fiskal berikutnya adalah pengeluaran belanja negara, yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS.

3. Obligasi Publik

Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki coupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat.

4. Alokasi Anggaran

Instrumen kebijakan fiskal terakhir adalah alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang

memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan.

2.1.3 Desentralisasi Fiskal

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik agar tercipta kemudahan kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat (Rochjadi, 2004).

Dalam teori ekonomi publik dibahas mengenai berbagai permasalahan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan pusat. Musgrave menjelaskan tentang ketiga fungsi pokok pemerintahan yang terdiri dari fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurut Musgrave terdapat dua faktor yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah secara ekonomi suatu fungsi akan lebih baik dilaksanakan terpusat (*sentralisasi*) ataukah didesentralisasikan. Faktor yang pertama adalah *eksternalitas* dan uang, yang kedua ialah *preferensi* (Azwardi & Abukosim, 2007).

Selanjutnya Boex dan Martinez-Vazquez mengemukakan empat pilar desentralisasi fiskal, yaitu melalui desentralisasi fiskal terjadi pelimpahan

wewenang dan tanggung jawab pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, meliputi pengeluaran, penerimaan, transfer, dan pinjaman daerah yang dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (Azwardi & Abukosim, 2007).

Pada dasarnya transfer pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dapat dibedakan atas bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) dan bantuan (*grants*). Adapun tujuan dari transfer ini adalah pemerataan vertikal (*vertical equalization*), pemerataan horizontal (*horizontal equalization*), mengatasi persoalan efek pelayanan publik (*correcting spatial externalities*), mengerahkan pr ioritas (*redirecting priorities*), melakukan eksperimen dengan ide- ide baru, stabilisasi dan kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum (SPM) di setiap daerah (Hermawan, 2007).

Di dalam peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2013 tentang pengalokasian anggaran transfer ke daerah, transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

2.1.4 Kebijakan Pengeluaran Pemerintah

A. . Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan atas dua bagian yaitu teori makro dan mikro. Dalam teori ekonomi makro, ada dua pandangan yang berbeda berkenaan dengan pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional. Kedua pandangan yang berbeda

mengenai pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi (pendapatan nasional) dalam kajian teori ekonomi makro dapat dijelaskan sebagai berikut (Manik & Hidayat, 2010):

1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Teori Wagner dan Pengikutnya

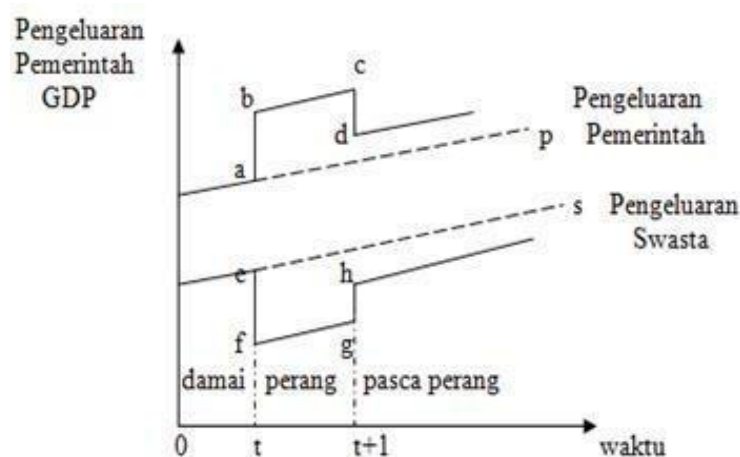
Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan.

3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai sematamata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentras (*concentration effect*). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang.

Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva dibawah ini:

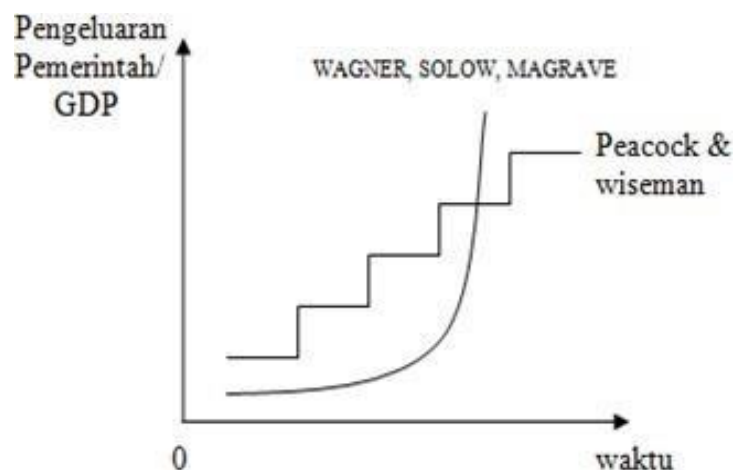


Sumber: Mangkoesobroto, 2001

Gambar 2. 2 Kurva Peacock dan Wiseman

Dalam keadaan normal, t ke $t+1$, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun $t+1$, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga.



Sumber: Mangkoesobroto, 2001

Gambar 2. 3 Kurva Wagner, Solow, dan Musgrave

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

Sedangkan tujuan dari teori mikronya, perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Penentuan Permintaan

$$U^i = f(X,G) \dots \dots \dots (2-3)$$

- Dimana:
- $U_i = f(G,X)$
 - G = vektor dari barang publik
 - X = vektor barang swasta
 - i = individu; = 1
 - U = fungsi utilitas

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (*budget constraints*). Misalkan seorang

individu (i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak G_k . Untuk menghasilkan i barang K sebanyak G_k , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat.

b. Penentuan Permintaan

$$U^i = f(X, G) \dots\dots\dots (2-3)$$

- Dimana:
- $U^i = f(G, X)$
 - G = vektor dari barang publik
 - X = vektor barang swasta i
 - I = individu; $i = 1, \dots, I$
 - U = fungsi utilitas

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (*budget constraints*). Misalkan seorang individu (i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak G_k . Untuk menghasilkan i barang K sebanyak G_k , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi.

c. Penentuan tingkat output

$$U_p = g(X, G, S) \dots\dots\dots (2-3)$$

- Dimana:
- Up = fungsi utilitas
 - S = keuntungan yang diperoleh politisi
 - G = vektor barang publik
 - X = vektor barang swasta

Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih:

$$\text{Max } U_i = f(X, G) \dots\dots\dots (2-4)$$

Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya:

$$P \cdot X + t \cdot B < M_i \dots\dots\dots (2-5)$$

- Dimana:
- P = vektor harga barang swasta
 - X = vektor barang swasta
 - B_i = basis pajak individu
 - M_i = total pendapatan individu i
 - T = tarif pajak

2.1.5 Indikator Kemajuan Desa

A. Indeks Pembangunan Desa (IPD)

Indeks Pembangunan Desa atau IPD merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa-desa di Indonesia. Pengukuran IPD dibangun dari data hasil pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2018. Melalui komponen penyusunnya, IPD dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pembangunan desa yang mencakup 5 (lima) dimensi dan 42 indikator yang menggambarkan ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan pada masyarakat desa.

Melalui IPD, pembangunan desa target RPJMN 2015-2019, mengamanahkan berkurangnya desa tertinggal sebanyak 5.000 desa, serta peningkatan desa mandiri sebanyak 2.000 desa. Atas dasar amanat tersebut maka desa diklasifikasikan berdasarkan IPD menjadi Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Output dari penyusunan IPD ini adalah terpetakannya desa-desa berdasarkan tingkat perkembangan desa menurut IPD kedalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu: Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal di seluruh provinsi di Indonesia disertai dengan informasi untuk masing-masing dimensi dan indikator penyusunnya.

Sumber data Pengukuran IPD memerlukan dua sumber data yakni daftar desa dan data desa. Daftar desa dan data desa yang digunakan pada penghitungan IPD 2018 bersumber dari hasil pendataan Podes 2018, dilakukan secara sensus di seluruh wilayah administrasi terkecil setingkat desa di Indonesia.

Pembangunan desa merupakan konsep multidimensional yang kompleks. Pengukuran tingkat kemajuan pembangunan desa diharapkan tetap mengacu pada kompleksitas tersebut meskipun perlu diupayakan adanya penyederhanaan dalam hal instrumen dan teknis pengukurannya. Dimensi, variabel, dan indikator yang digunakan sebagai alat ukur konsep pembangunan desa perlu disusun secara teliti sehingga secara komposit akan mampu menggambarkan tingkat kemajuan dan perkembangan pembanguna desa yang dipotret pada suatu waktu. **Dimensi Indeks Pembangunan Desa terbagi menjadi 5 bagian:**

1. Pelayanan Dasar

Dimensi pelayanan dasar mewakili aspek pelayanan dasar untuk mewujudkan bagian dari kebutuhan dasar, khusus untuk pendidikan dan kesehatan. Variabel sebagai komponen penyusunnya meliputi ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan SMA serta ketersediaan dan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Puskesmas/Pustu, tempat praktek dokter, Poliklinik/Balai Pengobatan, tempat praktek bidan, Poskesdes, Polindes, dan Apotek.

2. Kondisi Infrastruktur

Dimensi kondisi infrastruktur mewakili kebutuhan dasar, prasarana, pengembangan ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memisahkan aspek aksesibilitas/transportasi. Variabel-variabel penyusunnya mencakup:

- ketersediaan infrastruktur ekonomi seperti kelompok pertokoan, minimarket, toko kelontong, pasar, restoran, rumah makan, maupun warung/kedai makanan, akomodasi hotel atau penginapan, serta bank;
- infrastruktur energi seperti listrik, penerangan jalan dan bahan bakar untuk memasak;
- ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi seperti sumber air minum, sumber air mandi/cuci, dan fasilitas buang air besar; serta
- ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi dan informasi seperti komunikasi menggunakan telepon seluler, internet, dan pengiriman pos/barang.

3. Dimensi Aksesibilitas/Transportasi

Dimensi aksesibilitas/transportasi memiliki kekhususan dan prioritas pembangunan desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi dalam desa. Variabel-variabel penyusunnya meliputi:

- ketersediaan dan akses terhadap sarana transportasi seperti listrik dan kualitas jalan;
- aksesibilitas jalan, ketersediaan dan operasional angkutan umum; dan
- aksesibilitas transportasi seperti waktu tempuh per kilometer transportasi ke Kantor Camat, waktu tempuh per kilometer transportasi ke Kantor Bupati dan biaya per kilometer transportasi ke Kantor Bupati.

4. Dimensi Pelayanan Umum

Dimensi pelayanan umum merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan aspek lingkungan dan aspek pemberdayaan masyarakat. Variabel-variabel penyusunnya mencakup penanganan kesehatan masyarakat seperti penanganan kejadian luar biasa dan penanganan gizi buruk, serta ketersediaan fasilitas olahraga.

5. Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan

Dimensi penyelenggaraan pemerintahan mewakili indikasi kinerja pemerintahan desa yang merupakan bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan penyelenggara pelayanan bagi warga yang dalam hal ini adalah Pemerintah. Variabel-variabel penyusunnya meliputi kemandirian seperti

kelengkapan Pemerintahan Desa, otonomi desa, dan aset/kekayaan desa, serta kualitas SDM.

B. Indeks Desa Membangun (IDM)

Pengakuan dan penghormatan Negara kepada Desa yang disertai dengan redistribusi sumberdaya dan kewenangan pembangunan secara penuh sebagaimana mandat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, memberikan tanda yang jelas bahwa dari situlah Desa harus menjadi tumpuan untuk membangun Indonesia. Disebutkan Menteri Desa, "IDM ini lebih komperhensif jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD), karena IDM ini mengedepankan pendekatan yang bertumpu kepada kekuatan sosial, ekonomi dan ekologi, tanpa melupakan kekuatan politik, budaya, sejarah, dan kearifan lokal" guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ada guna mengurangi angka kemiskinan.

Dalam konteks tipologi desa, Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: "(i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri". Dari kelima klasifikasi tersebut maka kini statrata desa sudah memiliki beberapa pembagian yang digunakan sebagai indikator atau parameter desa.

Tipologi pembagian Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dibagi ke beberapa hal seperti: "(1) desa sangat tertinggal: $< 0,491$; (2) desa tertinggal: $> 0,491$ dan $< 0,599$; (3) desa berkembang: $> 0,599$ dan $< 0,707$; (4) desa maju: $> 0,707$ dan $< 0,815$; dan (5) desa mandiri: $> 0,815$ " (Suroso, 2019). Tipologi tersebut sejalan dengan Permendes No. 6 Tahun 2016 yang mengatur peta pembangunan desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu:

1) Indeks Ketahanan Sosial, terbagi menjadi 4 dimensi yaitu:

- Dimensi Modal Sosial,
- Dimensi Kesehatan,
- Dimensi Pendidikan, dan
- Dimensi Permukiman

2) Indeks Ketahanan Ekonomi, terbagi menjadi 1 dimensi yaitu:

- Dimensi Ekonomi

3) Indeks Ketahanan Ekologi, terbagi menjadi 1 dimensi yaitu:

- Dimensi Ekologi

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Model estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
1	Sihabuddin Fuady Rangkuti (2019), Evaluasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pengembangan Ekonomi Untuk Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat Di Indonesia	Kuantitatif	Dana Desa, Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRB), Belanja Daerah	Melihat pemetaan Dana Desa dengan Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2015 menggunakan analisis tipologi klassen yaitu tidak adanya Provinsi yang berada pada kuadran pertama yang merupakan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan Dana Desa yang besar. Sedangkan untuk IPM dengan Dana Desa pada tahun 2018, Pulau Jawa yang terdiri dari Jawa Barat, Timur dan Tengah berada di kuadran pertama dengan IPM tinggi dan Dana Desa yang besar.
2	Muhammad Sukarno (2020), Analisis Pengembangan Potensi Desa Berbasis IDM	Kualitatif Deskriptif	Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekologi, Ketahanan Ekonomi	Desa Ponggok yang ditetapkan sebagai desa mandiri mengingatkan perubahan pola kehidupan masyarakat baik dari segi sosial maupun segi perekonomian
3	Mulyanto (2020), Indikator dan Karakteristik Pembangunan Desa sebagai Basis Impelemntasi Atas Undang-Undang Desa	Entitas	Kekayaan dan keuangan desa, sarana perekonomian desa, kesejahteraan masyarakat, pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga.	Salah satu indikator yang mempunyai nilai secara absolut maupun derajat korelasinya relatif tinggi terkait dengan sumbungan dan kekeratan hubungan dengan IPD adalah indikator IJAHMAS memegang peran penting dalam pembentuk/formulasi IPD desa.
4	Novita Sari,			Kebijakan yang dilakukan

	Tomy Oktavianos (2020) Indeks Desa Membangun di Kabuapten Bonto Kuala	Kuantitatif Kualitatif	Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekologi, Ketahanan Ekonomi	pemerintah daerah dalam mengurangi jumlah desa yang tertinggal terkait dengan dua hal yaitu: pertama, Prioritas Penggunaan Dana Desa dan yang Kedua, Bedah Kampung Tertintegrasi.
5	Roziana Ainul Hidayati (2021, Analisis Potensi Desa Berbasis Indeks Pembangunan Desa Di Wilayah Pesisir Kabupaten Gresik	Deskriptif Kuantitatif Skunder	Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekologi, Ketahanan Ekonomi	Rata-rata variabel yang kondisinya tertinggal hampir seluruh desa di Kecamatan Ujung Pangkah adalah Variabel sarana olahraga dan sarana transportasi. Sedangkan variabel yang sangat baik rata-rata di seluruh desa adalah infrastuktur energy, kesehatan masyarakat dan kualitas sdm.

2.3 Regulasi / Kebijakan Dana Desa

Sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri. Desa yang mandiri dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pelaksananya, diatur dalam RPJMN 2015-2019, yang menempatkan desa menjadi sasaran kemajuan wilayah. Tujuannya untuk: (1) memetakan kondisi desa di Indonesia berdasarkan tingkat pengembangannya; (2) menetapkan target pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan yang harus di capai secara bersama-sama oleh para pelaku pembangunan desa; dan (3) memotret kinerja pembangunan yang sudah dilaksanakan di desa. Mewujudkan amanah tersebut, diperlukan ukuran yang diwujudkan dalam Indeks Pembangunan Desa (IPD).

2.3.1 Dana Desa

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari [Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara \(APBN\)](#), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- Alokasi dasar, dan
- Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui [Badan Usaha Milik Desa \(BUMDes\)](#).

2.3.2 Kebijakan Dana Desa

Berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2016), Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap Desa berdasarkan jumlah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap.

2.4 Kerangka Penelitian

2.4.1 Tahap Penelitian

Secara umum, terdapat beberapa indikator yang dianggap sangat mempengaruhi Kebijakan Dana Desa dalam mempengaruhi Indeks Pembangunan Desa (IPD), yaitu: (1) Dana Desa, (2) Anggaran Dana Desa, (3) Dana Alokasi Khusus, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Keempat variabel tersebut akan mempengaruhi tingkat kualitas hidup secara parsial (dilihat dari IPD). Namun, secara simultan tingkat kualitas hidup akan dipengaruhi oleh Dana Desa dan IPM

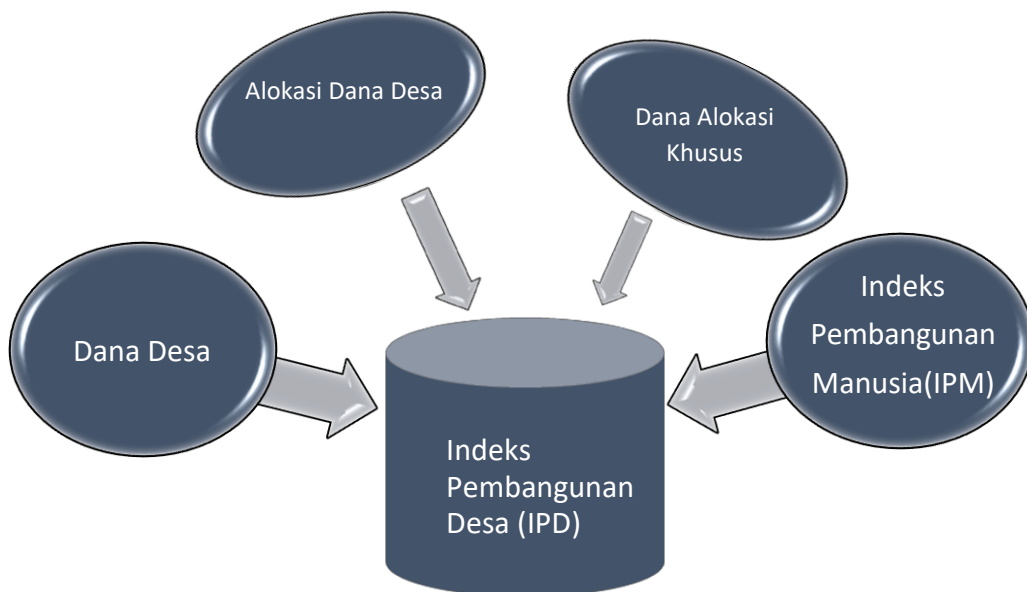
2.4.2 Kerangka Analisis Penelitian

Melakukan analisis sosial ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan kategorisasi Indeks Pembangunan Desa (IPD) pada Kabupaten Langkat tahun 2014 dan 2018

Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang capaian kategori Indeks Pembangunan Desa (IDM) pada Kabupaten Langkat tahun 2021

Gambar 2. 4 Kerangka Analisis Penelitian

2.4.3 Kerangka Konseptual Model Estimasi



Gambar 2. 5 Bagan Konseptual Model

Dalam Model ini, Variabel Dana Desa, Anggaran Dana Desa, Dana Alokasi desa dan IPM merupakan variable bebas yang mempengaruhi secara langsung terhadap pertumbuhan IPD, yang dimana IPD merupakan variable terikat.

2.5 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat pengaruh dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dana alokasi khusus (DAK), dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap indeks desa membangun (IDM).

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dari sebuah penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah mini riset kuantitatif, yang dimana bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis hubungan antar variabel yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah masalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat verbal dan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan bilangan. Data yang akan disajikan adalah data data *time series* yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Data yang akan dihimpun mencakup wilayah di Indonesia.

3.2 Definisi Operasional

Defenisi operasional merupakan acuan dari tinjauan Pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variable yang satu dengan variable yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang

diinginkan. Adapun variable yang terdapat dalam penelitian ini ialah: Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Indeks Pembangunan Desa (IPD).

Tabel 3. 1 Defenisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data	Keterangan Variabel
IDM (Indeks Desa Membangun)	Tingkat kemajuan desa dalam (satuan persen)	Kementerian Desa www.kemendes.go.id	Variable Terikat
DD (Dana Desa)	Dana yang bersumber dari APBN untuk kegiatan desa dalam (satuan rupiah)	Kementerian Keuangan RI www.kemenkeu.go.id	Variabel bebaas
Alokasi Dana Desa (ADD)	Dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan oleh pemerintah Kab/Kota untuk kegiatan Desa dalam (satuan rupiah)	Kementerian Keuangan RI www.kemenkeu.go.id	Variabel bebas
Dana Alokasi Khusus (DAK)	Alokasi dana yang bersumber dari APBN kepada wilayah tertentu dalam satuan rupiah)	Kementerian Keuangan RI www.kemenkeu.go.id	Variabel Bebas
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Tingkat kualitas hidup masyarakat dalam pembangunan desa dalam satuan persen	BPS (Badan Pusat Statistik) www.bps.go.id	Variabel Bebas

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat data di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara. Dengan melihat data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan RI.

b. Waktu Penelitian

waktu penelitian ini direncanakan selama 3 bulan yang dimulai dari Juni sampai dengan Agustus 2022.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam skala *numerik* (angka), yang dibedakan menjadi data *interval* dengan data *rasio*. Data *interval* adalah data yang diukur dengan jarak di antara dua titik pada skala yang sudah diketahui. Sedangkan, data *rasio* adalah data yang diukur dengan suatu proporsi. (Gujarati, 2013)

Sumber data yang diperoleh langsung dari hasil publikasi yang berasal dari *website-website* resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan RI dan data dalam bentuk buku, maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data sekunder melalui *website-website* resmi Kementerian Keuangan RI, dan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan objek penelitian Kabupaten Langkat Kecamatan Brandan Barat dan kurun waktu selama 7 tahun (2015 – 2021).

3.6 Teknik Analisis Tujuan Penelitian

3.6.1 Analisis Ekonomi Deskriptif Perkembangan Kebijakan Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Desa Di Kabupaten Langkat Sumatra Utara

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kebijakan Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Desa.

3.6.2 Analisis Ekonomi Deskriptif Perkembangan Kebijakan Dana Desa terhadap Indeks Desa Membanguna Di Kabupaten Langkat Sumatra Utara

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kebijakan Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Desa.

3.6.3 Analisis Model Ekonometrika

A. Model Estimasi

Penelitian ini mengenai dampak kebijakan Dana Desa terhadap indeks Pembangunan Desa (IPD) dengan menggunakan data times series yaitu data runtun waktu 6 tahun (dari tahun 2014 – 2021) , model ekonometrika pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$IDM_t = \beta_0 + \beta_1 DD_t + \beta_2 ADD_t + \beta_3 DAK_t + \beta_4 IPM_t + \varepsilon_t$$

Dimana :

IDM_t	= Pertumbuhan ekonomi dalam satuan %
DD_t	= Dana Desa pada tahun t
ADD_t	= Anggaran Dana Desa pada tahun t
DAK_t	= Dana Alokasi Khusus pada tahun t
IPM_t	= Indeks Pembangunan Manusia pada tahun t
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien
t	= Unit Waktu (2015 - 2020)
ε_t	= <i>term of error</i>

Setelah model penelitian diestimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran masing-masing parameter dalam model persamaan diatas. Nilai dari parameter positif dan negatif selanjutnya akan diperoleh untuk menguji hipotesa penelitian.

B. Metode Estimasi

Metode estimasi pada penelitian ini adalah untuk mengestimasi semua variable yang diamati menggunakan data data runtut waktu (time series) dalam kurun waktu 8 tahun (dari tahun 2014 sampai 2021). Analisis trend dalam kurun waktu tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau OLS (*Ordinary Least Square*) dalam bentuk regresi linier berganda (*multiple regression model*) yang disajikan lebih sederhana serta mudah dipahami.

Asumsi-asumsi yang mendasari model regresi linear dengan menggunakan metode OLS adalah sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata disturbance tern = 0
2. Tidak terdapat Korelasi serial (*serial auto correlation*) diantara disturbance tern

$$\text{COV}(\epsilon_t, \epsilon_j) = 0 : i \neq j$$

3. Sifat homoskedastisitas dari disturbance term $\text{Var}(\epsilon_i) = \sigma^2$
4. Covariance antar ϵ_i dari setiap variabel bebas (x) = 0 setiap variabel bebas (x) = 0
5. Tidak terdapat bias dalam spesifikasi model regresi. Artinya, model regresi yang diuji secara tepat telah dispesifikasikan atau diformulasikan.
6. Tidak terdapat *collinearity* antara variabel-variabel bebas. Artinya, variabel-variabel bebas tidak mengandung hubungan linier tertentu antara sesamanya.
7. Jika model berganda yang diestimasi melalui OLS memenuhi suatu set asumsi (*asumsi gauss-markov*), maka dapat ditunjukkan bahwa parameter yang diperoleh adalah bersifat BLUE (*best linear unbiased estimator*). (Gujarati, 2013).

C. Tahapan Analisis

1. Penaksiran

a. Korelasi (r)

Koefisien korelasi merupakan derajat keeratan antara variabel terikat dengan variabel bebas yang diamati. Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf r dimana bervariasi mulai -1 sampai $+1$. Nilai $r = -1$ atau $+1$ menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel-variabel tersebut, jika nilai $r = 0$, mengindikasikan tidak ada hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sedangkan tanda $+$ (positif) dan $-$ (negatif) memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antara variabel-variabel tersebut.

b. Uji Koefisien Determinasi (D)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap

p variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (D) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan *corrected* atau adjusted R^2 (Kuncoro, 2018).

2. Pengujian (*Test Diagnostic*)

a. Uji Parsial (uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Gujarati, 2013).

Uji t dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh DD, ADD, DAK, dan IPM se cara *individual* terhadap IDM. Dalam hal ini pengujian dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Hipotesis

Hipotesis $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (tidak ada hubungan yang signifikan antara

masing- masing variabel dana desa, anggaran dana desa, dana alokasi khusus, dan indeks pembangunan manusia terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Langkat).

Hipotesis $H_a \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ (ada hubungan yang signifikan antara

masing-masing variabel dana desa, anggaran dana desa, dana alokasi khusus, dan indeks pembangunan manusia terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Langkat).

2. Uji stastitik yang digunakan adalah uji t. dimana t hitung adalah:

$$t_h = \frac{\beta_i}{se-\beta_i} \dots \dots \dots (3.4)$$

dimana:

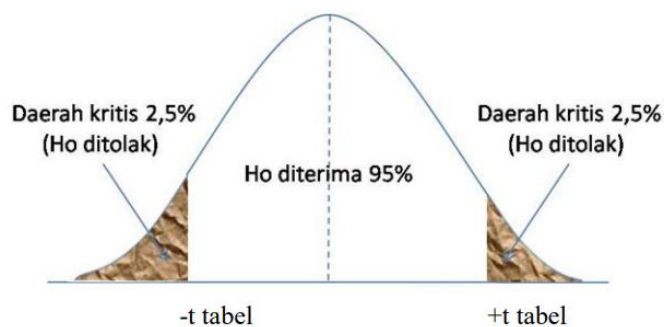
- β_1 = dana desa
- β_2 = dana alokasi desa
- β_3 = dana alokasi khusus
- β_4 = indeks pembangunan manusia
- $se \beta_i$ = Standar eror β_i

Nilai t_{hitung} akan dibandingkan dengan $t_{tabel} = \pm t (\alpha /2, n - 1)$.

3. Kriteria uji:

Terima H_0 jika $- t_{tabel} < t_{hitung} < + t_{tabel}$, hal lain tolak H_0

atau dalam distribusi kurva normal t dapat digambarkan sebagai berikut:



4. Kesimpulan:

Sesuai kriteria uji maka terima H_0 atau tolak H_0

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pada model dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dana alokasi khusus (DAK) dan indeks pembangunan manusia (IPM) secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap indeks desa membangun (IDM) Dengan langkah Langkah sebagai berikut:

1. Perumusan Hipotesis

- a. Hipotesis $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (tidak ada hubungan yang signifikan secara serentak antara variabel dana desa, dana alokasi desa, dana alokasi khusus dan indeks pembangunan manusia terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Langkat).

Hipotesis $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ (ada hubungan yang signifikan secara serentak antara dana desa, dana alokasi desa, dana alokasi khusus dan indeks pembangunan manusia terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Langkat).

2. Uji stastistik yang digunakan adalah uji F, dimana F hitung adalah:

$$F = \frac{R^2/K-1}{(1-R^2)/(n-k)} \dots\dots\dots(3.5)$$

Dimana:

k = Jumlah parameter yang diestimasi

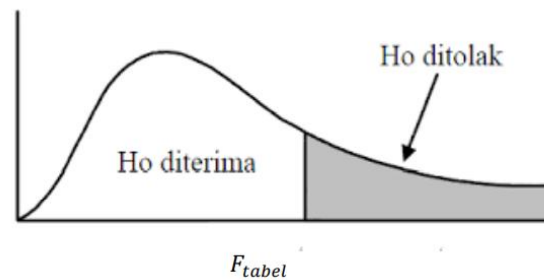
n = Jumlah data yang di observasi

Nilai F_{hitung} akan dibandingkan dengan $F_{tabel} = F(\alpha, n - k - 1)$ dengan derajat kesalahan $\alpha = 10\%$

3. Kriteria Uji:

Terima jika H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, hal lain tolak H_0 .

Atau dalam distribusi kurva F dapat digambarkan sebagai berikut



4. Kesimpulan terima atau tolak H_0 :

Memberikan kesimpulan sesuai kriteria uji maka terima H_0 .

c. Uji Asumsi Klasik

Metode OLS mendapatkan nilai estimator yang diharapkan dapat memenuhi sifat estimator OLS yang BLUE (*Blue Linear Unbiased Estimator*) dengan cara meminimumkan kuadrat simpangan setiap observasi dalam sampel. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan criteria ekonometrika, yaitu:

1. Tidak ada masalah hubungan antara variabel independen dalam regresi berganda yang digunakan (tidak multikolinieritas)
2. Varian variabel yang konstan (tidak heterokedastisitas)
3. Tidak ada hubungan variabel gangguan antara satu observasi dengan observasi berikutnya (tidak ada autokorelasi).

a Multikolinieritas

Multikolinieritas berhubungan dengan situasi dimana ada linear baik yang pasti atau mendekati pasti antara variabel independen. Masalah multikolinieritas

timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, multikolinieritas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak terpercaya (Gujarati, 2003).

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linear dalam model persamaan regresi. Apabila terjadi multikolinieritas, akibatnya variabel penafsiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien.

Dalam penelitian ini uji multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan auxiliary regression untuk mendekteksi adanya multikolinieritas. Kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama lebih dari R^2 regresi *auxiliary* maka didalam model ini tidak terjadi multikolinieritas.

b Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setiap gangguan tidak konstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisisennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias serta akan mengakibatkan hasil uji t dan uji f dapat menjadi tidak “*reliable*” atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan Uji *White*. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai R^2 yang didapat digunakan untuk menghitung χ^2 , dimana $\chi^2 = n \cdot R^2$ (Gujarati, 2003). Dimana pengujiannya adalah jika nilai probability *Observation R-Squared* lebih besar dari

taraf nyata 5%, Maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

c Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pada periode lainnya, dengankata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, menggunakan lag pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2003).

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji *Durbin Watson Test*. Dimana apabila d_i dan d_u adalah batas bawah dan batas atas, statistik menjelaskan apabila nilai *Durbin Watson* berada pada $2 < DW < 4-d_u$ maka autokorelasi atau *no-autocorrelation* (Gujarati, 2003).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Langkat

4.1.1 Kondisi Geografi

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang berada di Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Langkat berada pada 3°14'00"– 4°13'00" Lintang Utara, 97°52'00' – 98° 45'00" Bujur Timur dan 4 – 105 m dari permukaan laut. Kabupaten Langkat menempati area seluas ± 6.263,29 Km² (626.329 Ha) yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan Definitif.

Area Kabupaten Langkat memiliki batas-batas wilayah antara lain:

- Utara : berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka
- Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Karo
- Barat : berbatasan dengan Provinsi Aceh
- Timur : berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai

Seperti daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Langkat termasuk daerah yang beriklim tropis. Sehingga daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim.

Iklim di wilayah Kabupaten Langkat termasuk tropis dengan indikator iklim sebagai berikut : Musim Kemarau (Februari s/d Agustus); Musim Hujan (September s/d Januari). Curah hujan rata-rata 2.205,43 mm/tahun dengan suhu rata-rata 28 derajat celcius - 30 derajat celcius.

4.1.2 Kondisi Pemerintahan

Kabupaten Langkat memiliki 23 Kecamatan dan 277 Desa dimana kecamatan luas daerah terbesar adalah kecamatan Bahorok dengan luas 1.101,83 km² atau 17,59 persen diikuti kecamatan Batang Serangan dengan luas 899,38 km² atau 14,36 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah kecamatan Binjai. dengan luas 42,05 km² atau 0,67 persen dari total luas wilayah Kabupaten Langkat.

Sedangkan Jumlah desa yang terbanyak berasal dari kecamatan Bahorok dan Tanjung Pura dengan jumlah 19 desa diikuti kecamatan Salapian dan Secanggang dengan jumlah 17 desa. Sedangkan desa yang memiliki jumlah desa terendah yaitu Binjai dengan jumlah 5 desa.

Berikut dibawah ini jumlah Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara:

Tabel 4. 1Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Langkat

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Desa	Ibukota Kecamatan
1	Bahorok	1 101,83	19	Pekan Bahorok
2	Serapit	98,50	10	Serapit
3	Salapian	221,73	17	Minta Kasih
4	Kutambaru	236,84	8	Kutambaru
5	Sei. Bingei	333,17	16	Namu Ukur
6	Kuala	206,23	16	Pekan Kuala
7	Selesai	167,73	14	Pekan Selesai
8	Binjai	42,05	7	Kwala Begumit
9	Stabat	108,85	12	Stabat Baru
10	Wampu	194,21	14	Bingai
11	Batang Serangan	899,38	8	Batang Serangan
12	Sawit Seberang	209,10	7	Sawit Seberang
13	Padang Tualang	221,14	12	Tanjung Selamat
14	Hinai	105,26	13	Tanjung Beringin

15	Secanggih	231,19	17	Hinai Kiri
16	Tanjung Pura	179,61	19	Pekan Tanjung
17	Gebang	178,49	11	Pekan Gebang
18	Babalan	76,41	8	Pelawi Utara
19	Sei. Lapan	280,68	14	Alur Dua
20	Brandan Barat	89,80	7	Tangkahan Durian
21	Besitang	720,74	9	Pekan Besitang
22	Pangkalan Susu	151,35	11	Pangkalan Susu
23	Pematang Jaya	209,00	8	Pematang Jaya
Jumlah		6263,29	277	

Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.langkat.bps.go.id)

4.1.3 Kondisi Demografi

A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Langkat tahun 2020 mengalami penurunan dimana dari hasil proyeksi jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 1.041.775 jiwa menurun menjadi 1.030.202 pada tahun 2020. Jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 520.784 jiwa dan perempuan sebanyak 509.418 jiwa.

Komposisi penduduk dibagi dalam tiga kelompok umur, yaitu:

- Kelompok umur 0 – 14 tahun sebanyak 262.989 jiwa (25,52%)
- Kelompok umur 15 – 64 tahun sebanyak 716.230 jiwa (69,52%).
- Kelompok umur 64 tahun ke atas sebanyak 50.983 jiwa (4,94%).

Berikut dibawah ini jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara:

Tabel 4. 2Jumlah Penduduk Kabupaten Langkat Menurut Jenis Kelamin 2020

Jumlah Penduduk

Kecamatan	Laki-laki	Permpuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Bahorok	20.955	20.615	41.570
Sirapit	8	8.235	16.703
Salapian	13.195	13.043	26.238
Kutambaru	7.088	7.021	14.109
Sei Bingai	25.442	26.175	51.617
Kuala	20.007	20.320	40.327
Selesai	36.722	35.873	72.595
Binjai	23.828	23.190	47.018
Stabat	45.715	45.438	91.153
Wampu	21.505	20.883	42.388
Batang Serangan	18.179	17.585	35.764
Sawit Seberang	13.038	12.727	25.765
Padang Tualang	26.975	25.920	52.895
Hinai	26.809	25.855	52.664
Secanggang	35.905	34.577	70.482
Tanjung Pura	34.936	34.082	69.018
Gebang	24.170	23.339	47.509
Babalan	28.538	28.168	56.706
Sei Lapan	25.219	24.411	49.630
Brandan Barat	12.417	11.606	24.023
Besitang	22.985	22.301	45.286
Pangkalan Susu	22.170	21.703	43.873
Pematang Jaya	6.518	6.351	12.869
Langkat	520.784	509.418	1.030.202

Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.langkat.bps.go.id)

Dapat kita lihat pada Tabel 1.2 Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Langkat adalah Kecamatan Stabat dimana jumlah penduduknya sebesar 91.153 jiwa dan disusul oleh Kecamatan Selesai dengan jumlah Penduduk 72.595 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah di Kabupaten Langkat yaitu Kecamatan Pematang jaya dengan jumlah 12.869 jiwa.

Berikut ini jumlah sex rasio menurut Kecamatan Kabupaten Langkat 2018-2020:

Tabel 4. 3 Sex Rasio Menurut Kecamatan (Persen) 2018-2020

Kecamatan	Sex Rasio Menurut Kecamatan (Persen)		
	2018	2019	2020
Bohorok	100	100	100
Sirapit	101	102	102
Salapian	101	101	101
Kutambaru	103	103	103
Sei Bingai	100	99	99
Kuala	99	99	99
Selesai	101	101	101
Binjai	103	103	103
Stabat	98	98	98
Wampu	103	103	103
Batang Serangan	104	104	104
Sawit Seberang	100	100	100
Padang Tualang	99	99	99
Hinai	101	101	101
Secanggang	101	101	101
Tanjung Pura	102	102	102
Gebang	102	102	102
Babalan	104	104	104
Sei Lapan	104	104	104
Brandan Barat	105	105	105
Besitang	102	102	102
Pangkalan Susu	101	101	101
Pematang Jaya	104	104	104
Kabupaten Langkat	101	101	101

Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.langkat.bps.go.id)

Tabel 4.3 menjelaskan bahwa sex rasio tertinggi di Kabupaten Langkat yaitu Kecamatan Brandan Barat dengan jumlah 105, kemudian Kecamatan Batang Serang, Babalan, Sei Lapan, Pematang Jaya dengan jumlah 104. Sedangkan sex rasio terendah yaitu Kecamatan Stabat.

B. Angkatan Kerja

Berikut dibawah ini jumlah penduduk menurut komposisi penduduk dan jenis kelamin di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara:

Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Kabupaten Langkat Menurut Komposisi Penduduk dan Jenis Kelamin, 2020

Komposisi Penduduk	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I. Usia Kerja	387.855	399.401	787.256
A. Angkatan Kerja	329.761	209.822	539.583
1. Bekerja	312.140	189.579	501.719
2. Pengangguran	17.621	20.243	37.864
B. Bukan Angkatan Kerja	58.094	174.021	232.115
1. Sekolah			53.723
2. Mengurus Rumah Tangga			143.185
3. Lainnya			35.207
II. Bukan Usia Kerja	132.929	110.017	242.946
Jumlah	520.784	509.418	1.030.202
% Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	94.66	90.35	92.98
% Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	85.02	54.66	69.92
% Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.34	9.65	7.02

Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.langkat.bps.go.id)

Pada tahun 2020 di Kabupaten Langkat, terdapat 1.030.202 penduduk yang tergolong dalam penduduk angkatan kerja 539.583 dengan pembagian sebanyak 501.719 termasuk penduduk bekerja dan 37.864 penduduk menganggur. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja di Tahun 2020 untuk Kabupaten Langkat adalah sebesar 69,92 persen, Sedangkan untuk Tingkat Pengangguran terbuka rendah yaitu sebesar 7,02 persen.

Berikut ini jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin berumur 15 tahun keatas Kabupaten Langkat:

Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Kabupaten Langkat Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2020

Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah Penduduk Yang Bekerja		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	149.284	52.335	201.619
Manufaktur	74.360	32.537	106.897
Jasa	88.496	104.707	193.203
Jumlah	312.140	189.579	501.719

Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.langkat.bps.go.id)

Mayoritas pekerja di Kabupaten Langkat bekerja di sektor manufaktur pada tahun 2020 sebanyak 106.897 pekerja. Sedangkan sektor pertanian sebanyak 201.619 pekerja. Sementara untuk sektor jasa sebanyak 193.203 dan Pengangguran sebanyak 37.864.

4.1.4 Kondisi Ekonomi

A. Nilai Produk Domestic Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang memberikan petunjuk sejauh mana perkembangan dan struktur ekonomi suatu daerah dalam suatu kurun waktu. Pada tahun 2021 PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Langkat sebesar 46.301,20 milyar rupiah menurun bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 43.208,00 milyar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Langkat sebesar 30.247.338,87 milyar rupiah meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 29.343.255,98 milyar rupiah. Kondisi perekonomian Kabupaten Langkat menunjukkan pergerakan menurun dari 5,07 persen pada tahun 2019 menjadi -0,86 persen pada tahun 2020.

Berikut jumlah *produk domestic regional bruto* di Kabupaten Langkat tahun 2019-2020:

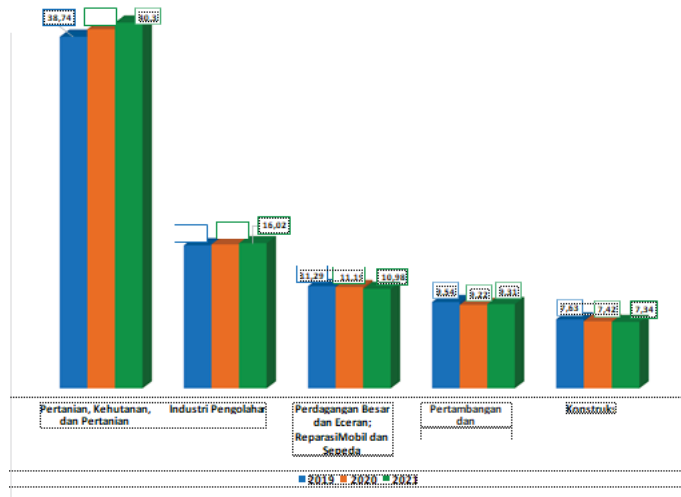
Tabel 4. 6 Jumlah Nilai Produk Domestic Regional Bruto DI Kabupaten Langkat

Nilai Produk Domestic Regional Bruto	Tahun		
	2019	2020	2021
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	42.515,18	43.208,00	46.301,20
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran	5,07	-	3,08
Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran	100,00	100,00	100,00
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran	29.597.772,36	29.343.355,98	30.247.338,87
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran	42.515.176,42	43.207.997,58	46.301.203,75
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan	5,07	-	3,08
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	100,00	100,00	100,00
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha	29.597,77	29.343,26	30.247,39
Laju Implisit PDRB Menurut Pengeluaran	2,51	1,50	2,51
Pertumbuhan Ekonomi	5,02	5,07	-0,86
Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha	-	-	-
Indeks Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha	143,64	-	-
Indeks Perkembangan PDRB seri 2010 ADHB Menurut Lapangan Usaha	291,58	-	-
Indeks Perkembangan PDRB seri 2010 ADHK Menurut Lapangan Usaha	181,39	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.langkat.bps.go.id)

B. Struktur Ekonomi (Kontribusi).

Berikut struktur produk domestik regional bruto pengeluaran lapangan usaha sebagai berikut:

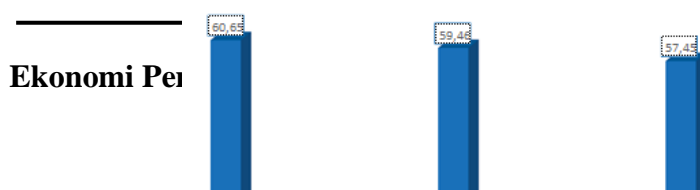


Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.langkat.bps.go.id)

Grafik 4. 1 Struktur PDRB beberapa Pengeluaran Lapangan Usaha

Struktur perekonomian Kabupaten Langkat pada tahun 2021 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 40,30 persen; lapangan usaha industri pengolahan sebesar 16,02 persen; serta lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,98 persen. Peranan ke tiga lapangan usaha tersebut mencapai 67,30 persen terhadap total PDRB. Berdasarkan pendekatan produksi pertumbuhan tertinggi berada pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 5,93 persen disusul oleh lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,42 persen

Berikut pertumbuhan produk domestik regional bruto beberapa komponen pengeluaran sebagai berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.langkat.bps.go.id)

Grafik 4. 2 Struktur Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran

Struktur ekonomi Langkat menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2010 tidak menunjukkan perubahan yang berarti/ aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang hampir mencakup separuh PDRB Langkat yaitu sebesar 57,45 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto 23,12 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 7,50 persen, Pengeluaran Konsumsi LNPRRT sebesar 0,94 persen, Perubahan Inventori 2,19 persen dan Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar 8,80 persen.

C. Pertumbuhan Ekonomi

Berikut laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat 2017-2021 sebagai berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.langkat.bps.go.id)

Grafik 4. 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Langkat 2017-2021

Perkonomi Kabupaten Langkat tahun 2021 meningkat 3,80 persen. Mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengalami kontraksi 0,86 persen.

Hal ini menunjukkan perekonomian di Kabupaten Langkat semakin membaik walaupun pandemi COVID 19 belum berakhir. Lapangan usaha informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 5,93 persen. Diikuti oleh lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,42 persen, serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 4,18 persen. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi 0,55 persen, lapangan usaha jasa perusahaan mengalami kontraksi 0,15 persen, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib serta lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami kontraksi masing-masing 0,14 persen.

Berikut laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan produk domestik regional bruto di Kabupaten Langkat sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Langkat Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Sumber Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,69	1,06	3,78	2,44	0,46	1,66
B. Pertambangan dan Penggalian	5,88	(2,16)	4,18	0,58	-0,21	0,41
C. Industri Pengolahan	2,88	(1,93)	2,26	0,41	-0,27	0,31
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,44	2,15	3,06	0,01	0,01	0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,77	3,47	5,42	0,00	0,00	0,00
F. Konstruksi	4,88	(4,38)	3,10	0,36	-0,32	0,22
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,71	(2,48)	2,52	0,37	-0,24	0,24
H. Transportasi dan Pergudangan	7,00	(9,38)	(0,55)	0,15	-0,20	-0,01
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,56	(7,45)	1,26	0,18	-0,16	0,03
J. Informasi dan Komunikasi	8,82	9,59	5,93	0,12	0,13	0,09
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,63	0,21	3,94	0,07	0,00	0,07
L. Real Estat	5,06	0,40	0,14	0,14	0,01	0,00
M,N. Jasa Perusahaan	5,62	(5,33)	(0,15)	0,03	-0,03	-0,00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,97	(0,49)	(0,14)	0,12	-0,01	-0,00
P. Jasa Pendidikan	5,12	0,48	3,67	0,06	0,01	0,04
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,36	(1,80)	(0,14)	0,03	-0,01	-0,00
R,S,T,U. Jasa Lainnya	7,82	(7,11)	2,88	0,02	-0,01	0,01
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5,07	(0,86)	3,08	5,07	-0,86	3,08

Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.langkat.bps.go.id)

D. Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Berikut nilai produk domestik regional bruto per kapita Kabupaten Langkat 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Nilai Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita di Kabupaten Langkat, 2019 - 2021

PDRB Per Kapita	2019	2020	2021
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	28.383.253,00	28.520.913,00	29.238.118,00
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	40.770.602,00	41.997.095,00	44.756.262,00

Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.langkat.bps.go.id)

Dapat kita lihat pada Tabel 4.8 dapat kita lihat bahwa nilai PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 nilai PDRB Per Kapitanya 28.383.353,00, pada tahun 2020 nilai PDRB Per Kapitanya 28.520.913,00 dan pada tahun 2021 nilai PDRB Per Kapitanya meningkat menjadi 29.238.118,00.

Nilai PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2021 meningkat di bandingkan dengan tahun 2020. Dapat kita lihat pada Tabel 4.8 nilai PDRB Per Kapitanya pada Tahun 2020 berjumlah 41.997.095,00 sedangkan Nilai PDRB Per Kapitanya pada tahun 2021 berjumlah 44.756,262,00.

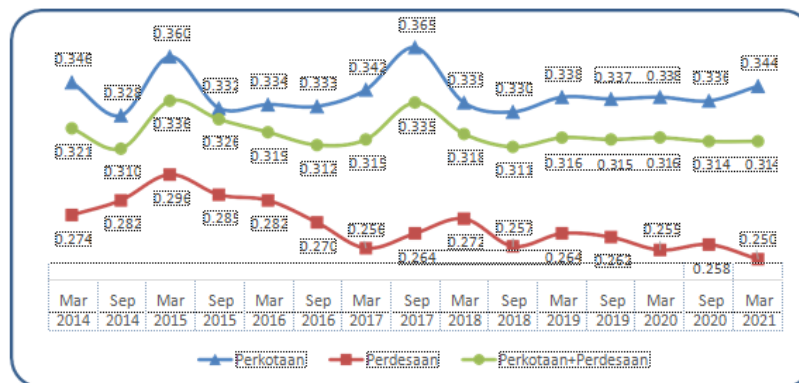
E. Gini Ratio

Pada Maret 2021, (tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan) *Gini Ratio* Sumatera Utaratercatat sebesar 0,314. Tidak terjadi perubahan *Gini Ratio* pada maret 2021 terhadap September 2020. *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,344 sedikit meningkat dibanding *Gini Ratio* September 2020 yang sebesar 0,336. Sebaliknya, *Gini Ratio* di daerah pedesaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,250 menurun dibanding *Gini Ratio* September 2020 yang sebesar 0,258.

Pada Maret 2021, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 21,78 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih

berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 20,26 persen dan di daerah perdesaan angkanya tercatat sebesar 24,65 persen yang artinya keduanya juga berada pada kategori ketimpangan rendah.

Berikut perkembangan *gini ratio* di Sumatra Utara sebagai berikut:



Sumber: BPS Sumatra Utara (www.sumut.bps.go.id)

Grafik 4. 4 Perkembangan *Gini Ratio* Sumatra Utara Maret 2014 – Maret 2021

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah *Gini Ratio*. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. *Gini Ratio* Sumatera Utara pada bulan Maret 2014 (titik awal pada Gambar 1) tercatat sebesar 0,321. Selama periode Maret 2014 hingga Maret 2021, nilai *Gini Ratio* cukup berfluktuasi, dengan *Gini Ratio* Maret 2015 sebesar 0,336 merupakan angka tertinggi selama periode tersebut. Berhasil mencapai titik 0,312 pada September 2016, namun kembali mengalami peningkatan pada September 2017 menjadi 0,335. Berhasil turun kembali hingga ke 0,311 pada September 2018, akan tetapi kembali meningkat menjadi 0,317 pada Maret 2019. Sempat turun ke angka 0,315 namun kembali naik ke angka 0,316 di Maret 2020 sebagai akibat adanya pandemi Covid-19, namun mampu

melandai kembali hingga tercatat sebesar 0,314 pada Maret 2021.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,344. Angka ini naik sebesar 0,008 poin dibanding *Gini Ratio* September 2020 yang sebesar 0,338. Untuk daerah perdesaan *Gini Ratio* Maret 2021 tercatat sebesar 0,250. Berbeda dengan daerah perkotaan, angka *Gini Ratio* daerah perdesaan justru turun sebesar 0,008 poin dibanding *Gini Ratio* September 2020 yang sebesar 0,258.

F. Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan pekerjaan. Umumnya, penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Artinya, jumlah tenaga kerja lebih banyak dari jumlah lapangan kerja.

Berdasarkan data BPS 2021, jumlah sarjana pengangguran di Kabupaten Langkat berada pada kisaran angka 4.419 jiwa. Dengan luasan wilayah, potensi sumber daya yang ada, baik BUMS, BUMN, Dana Desa, Program UMKM dan lain sebagainya.

Berikut dibawah ini data tingkat pengangguran berdasarkan jumlah pengangguran berumur 15 tahun keatas dan tingkat pengangguran terbuka penduduk 15 tahun keatas sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Jumlah Pengangguran di Kabupaten Langkat 2019-2021

	2019	2020	2021

Jumlah pengangguran berumur 15 tahun keatas (jiwa)	20.579	37.864	27.601
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk umur 15 tahun keatas (persen)	5,30	7,20	5,12

Sumber: BPS Sumatra Utara (www.sumut.bps.go.id)

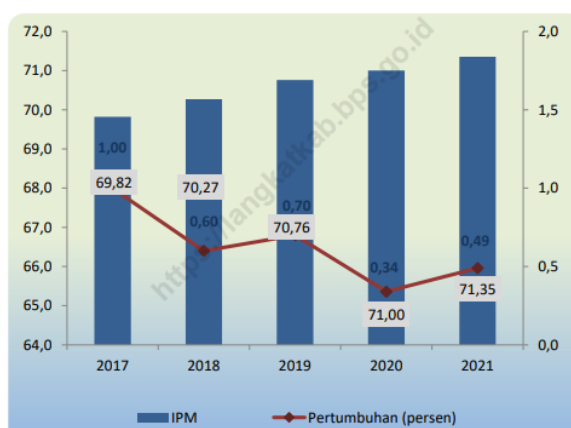
Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penggguran berumur 15 tahun keatas pada tahun 2021 berjumlah 27.601 menurun 10.263 jiwa dari tahun 2020 yang jumlahnya 37.864 jiwa. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 berjumlah 5,12 turun menjadi 2,08 persen dari tahun 2020 yang jumlahnya 7,20 persen.

4.1.5 Kondisi Sosial

A. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia telah memberikan pemahaman baru terhadap sudut pandang pembangunan yang lebih luas. Perkembangan pembangunan manusia secara umum menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. IPM Kabupaten Langkat tahun 2016 sebesar 69,13 persen terus meningkat menjadi 71,35 persen pada tahun 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa IPM Kabupaten Langkat terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,63 persen per tahun.

Berikut dibawah ini perkembnagan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Langkat sebagai berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.langkat.bps.go.id)

Grafik 4. 5 Perkembangan IPM Kabupaten Langkat 2017- 2021

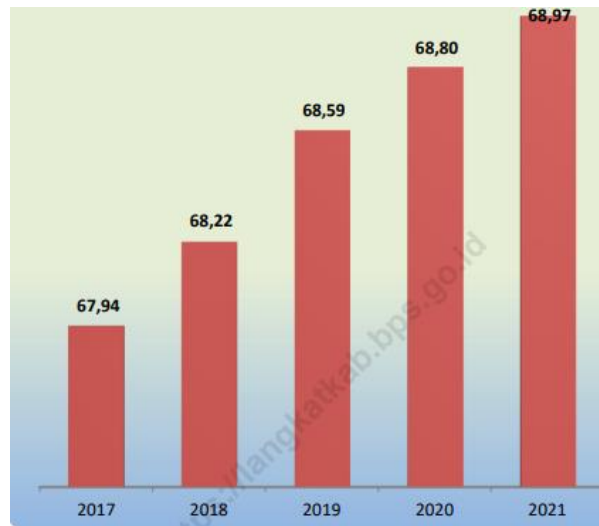
Peningkatan pembangunan manusia terus terjadi setiap tahun. Seluruh kabupaten/kota menunjukkan kenaikan IPM selama periode 2017 hingga 2021. Beberapa wilayah mencatat perkembangan yang signifikan. Setidaknya, tujuh kabupaten/kota mencatat perkembangan paling cepat selama 2017 hingga 2021 yaitu di atas 4 persen. Kabupaten/Kota dengan pembangunan manusia tercepat yaitu Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Gunung Sitoli, dan Kabupaten Mandailing Natal.

1) Angka Harapan Hidup (AHH)

Indikator AHH menjadi salah satu indikator gambaran kesehatan masyarakat yang sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan di bidang kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH dapat menggambarkan tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat, diharapkan kesempatan untuk bertahan hidup akan semakin besar. Sebaliknya, tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup. Angka harapan hidup berbanding terbalik dengan tingkat kematian bayi, artinya semakin rendah angka kematian bayi maka

angka harapan hidup akan semakin tinggi, demikian pula sebaliknya.

Berikut perkembangan harapan hidup di Kabupaten Langkat sebagai berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.langkat.bps.go.id)

Grafik 4. 6 Perkembangan Harapan hidup Kabupaten Langkat 2017-2021

Grafik 4.6 memperlihatkan perkembangan AHH Kabupaten Langkat selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada gambar tersebut terlihat bahwa AHH Kabupaten Langkat selama periode 2017-2021 menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. AHH Kabupaten Langkat pada tahun 2021 mencapai 68,97 tahun. Berarti setiap bayi di Kabupaten Langkat yang dilahirkan pada tahun 2021, dapat berharap untuk hidup sampai usia 68,97 tahun. Selama tahun 2017-2021, angka harapan hidup saat lahir di Kabupaten Langkat tumbuh rata-rata 0,34 persen per tahun.

2) Rata-Rata Lama Sekolah

Tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang kuat dengan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga maupun masyarakat. Pada dasarnya pembangunan

pendidikan difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik muda maupun tua di setiap jenjang pendidikan utamanya hingga SLTA, serta untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan perkembangan dunia usaha. Peningkatan partisipasi masyarakat ini, bisa dilihat dari peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk, yang keberhasilannya memerlukan dukungan keluarga, masyarakat luas dan pemerintah.

Berikut dibawah ini perkembangan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kbaupaten Langkat sebagai berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.langkat.bps.go.id)

Grafik 4. 7 Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Langkat, 2017 - 2021

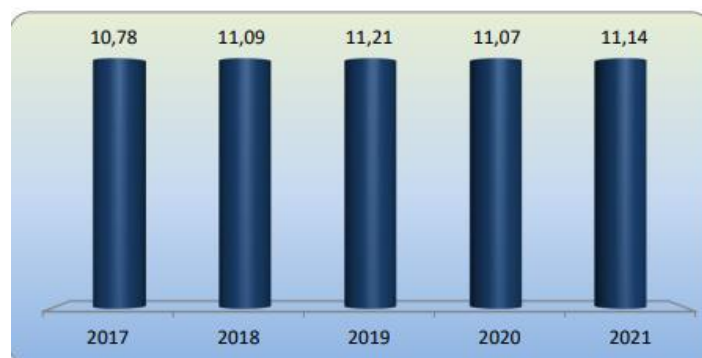
Sampai dengan tahun 2021, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Langkat telah mencapai 8,66 tahun atau setara dengan tamat SLTP. Sementara anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 13,24 tahun atau mencapai Diploma I. Perkembangan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Langkat selama lima tahun terakhir secara umum terus meningkat. Pada tahun 2017, harapan lama sekolah di Kabupaten Langkat sebesar 12,72 tahun secara konsisten terus

meningkat menjadi 13,24 tahun pada tahun 2021. Demikian juga dengan rata-rata lama sekolah, pada tahun 2017 sebesar 8,51 tahun meningkat hingga 8,66 tahun pada tahun 2021. Rata-rata pertumbuhan harapan lama sekolah tumbuh 0,99 persen per tahun lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata lama sekolah yang sebesar 0,43 persen per tahun.

3) Kemampuan Daya Beli

Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Kemampuan ini berbeda antar wilayah, karena nilai tukar antar wilayah juga berbeda bergantung kepada harga riil pada masing-masing wilayah. Agar kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah menjadi terbanding, perlu dibuat standarisasi. Misalnya, satu rupiah di suatu wilayah Kabupaten memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Medan. Dengan adanya standarisasi ini, maka perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan.

Berikut perkembangan pengeluaran per kapita per tahun Kabupaten Langkat sebagai berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.langkat.bps.go.id)

Grafik 4. 8 Perkembangan Pengeluaran Per kapita Per Tahun Kabupaten Langkat, 2017 - 2021

Tahun 2021, pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Langkat telah mencapai 11,14 juta per tahun. Pada tahun 2017, tingkat daya beli masyarakat Kabupaten Langkat sebesar 10,78 juta rupiah per kapita per tahun, meningkat menjadi 11,14 juta rupiah per kapita per tahun pada tahun 2021. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Langkat selama periode 2017-2021 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1,34 persen per tahun. Pada tahun 2021 pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Langkat meningkat dibanding tahun 2020.

1. Kemiskinan

Berikut ini angka kemiskinan di Kabupaten Langkat sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Angka Kemiskinan Di Kabupaten Langkat

Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan		
	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	103,08	101,87	106,59
Persentase	9.91	9.73	10.12
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	392050.00	412422.00	432371.00
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0.90	1.52	1.17
Indeks Keparahan Kemiskinan	0.14	0.33	0.23

Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.bps.go.id)

Dilihat dari Tabel diatas Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Langkat mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin mencapai 101,87 sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 103,08. Kemudian pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin meningkat kembali

menjadi 106,59.

4.2 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- Alokasi dasar, dan
- Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa selengkapnya seperti di bawah ini.

1. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.

3. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
5. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan,

- Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
- Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
- Dana yang telah dcairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan

adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui [Badan Usaha Milik Desa \(BUMDes\)](#).

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional [BPD](#), [biaya operasional](#) tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi

ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDDes setiap tahunnya, melalui:

1. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:

- Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi:

- Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa;
- Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani;
- Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa;
- Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
- Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;

3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

4.2.1 Anggaran Dana Desa Menurut Tingkat Nasional

Berikut dibawah ini anggaran Dana Desa Nasional tahun 2015-2021 sebagai berikut:



Sumber : Kementerian Keuangan RI (www.kemenkeu.go.id)

Grafik 4. 9 Anggaran Dana Desa

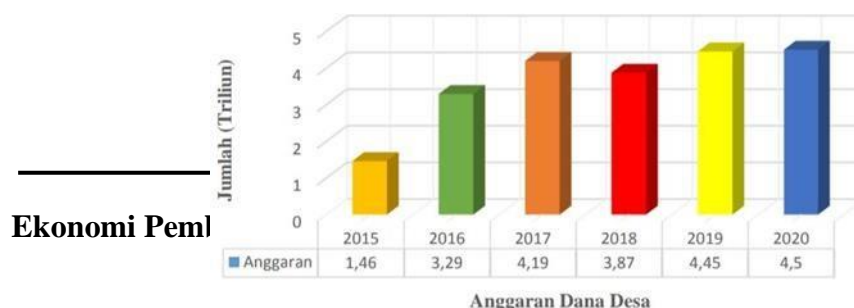
Dapat dilihat dari grafik diatas, tren anggaran dana desa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Alokasi Dana Desa dari APBN pada tahun 2015 sebesar Rp 20,76 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapat alokasi sebesar Rp 280

juta. Alokasi Dana Desa tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 46,98 triliun naik 1 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 pemerintah menganggarkan Rp 60 triliun untuk dana desa dengan rata-rata perdesa mendapatkan sebesar Rp 800,4 juta. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 46,98 triliun. Sedangkan pada tahun 2018 anggaran untuk dana desa tidak mengalami peningkatan dan penurunan, sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar Rp 60 triliun. Pada tahun 2019 dana desa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 70 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 933 juta. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021 anggaran dana desa meningkat sebesar Rp 72 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan Rp 960 juta. Total Dana Desa sejak tahun 2015 hingga 2021 mencapai Rp 401,74 triliun.

Penetapan kebijakan Dana Desa ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pihak yang mendukung kebijakan ini merasa bahwa wilayah perdesaan selalu menjadi wilayah yang terpinggirkan dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan alokasi dana untuk pembangunan desa. Sejak adanya dana desa untuk memenuhi target pembangunan desa, pemerintah memetakan pembangunan desa berdasarkan tingkat pembangunannya, berikut perbandingan Indeks Pembangunan Desa tahun 2020.

4.2.2 Anggaran Dana Desa Provinsi Sumatra Utara

Berikut ini anggaran Dana Desa Sumatra Utara tahun 2015-2020 sebagai berikut:



Sumber : Kementerian Keuangan RI (www.kemenkeu.go.id)

**Grafik 4. 10 Anggaran Dana Desa Provinsi Sumatera Utara 2015 – 2020
(Triliun)**

Pada tahun 2015 anggaran dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,46 triliun. Pada tahun 2016 dana desa mengalami peningkatan sebesar Rp 3,29 triliun naik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 pemerintah mengalokasikan Rp 4,19 triliun untuk dana desa. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 anggaran untuk dana desa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 3,87 triliun. Tahun 2019 dana desa mengalami peningkatan sebesar Rp 4,45 triliun. Kemudian pada tahun 2020 anggaran dana desa meningkat kembali sebesar Rp 4,50 triliun.

Setelah jumlah besarnya Anggaran Dana Desa pada setiap Provinsi Sumatera Utara terdapat juga Anggaran Dana Desa setiap kabupaten atau Kota provinsi Sumatera Utara. Berikut ini perkembangan anggaran dana desa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Berikut dibawah ini anggaran Dana Desa Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Utara 2019-2021 sebagai berikut:

**Tabel 4. 11 Anggaran Dana desa Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019 – 2021**

Anggaran Dana Desa (Miliar)		
-----------------------------	--	--

Wilayah	Jumlah Desa	2018	2019	2020	2021
Kab. Asahan	204	126.570.894.000	146.090.415.000	150.506.325.000	152.083.710.000
Kab. Dairi	169	111.910.524.000	127.172.564.000	130.304.470.000	129.738.730.000
Kab. Deli Serdang	394	271.906.373.000	306.386.948.000	312.277.329.000	312.546.966.000
Kab. Karo	269	173.021.882.000	197.078.926.000	201.208.286.000	198.409.273.000
Kab. LabuhanBatu	98	60.371.923.000	70.226.102.000	72.182.696.000	74.477.417.000
Kab. Labuhanbatu Selatan	73	46.205.735.000	61.548.371.000	65.076.224.000	67.788.110.000
Kab. Labuhanbatu Utara	90	68.036.521.000	79.123.527.000	83.576.158.000	86.022.841.000
Kab. Langkat	277	178.799.190.000	205.446.268.000	211.213.256.000	213.259.749.000
Kab. Mandailing Natal	407	252.910.057.000	285.841.420.000	290.920.103.000	286.845.864.000
Kab. Nias	170	148.261.931.000	180.585.127.000	181.381.215.000	179.544.025.000
Kab. Nias Utara	113	110.728.446.000	137.008.319.000	137.596.573.000	136.386.189.000
Kab. Nias Selatan	461	314.481.751.000	348.422.333.000	356.099.164.000	351.138.751.000
Kab. Nias Barat	105	92.269.401.000	114.000.248.000	118.531.988.000	117.397.253.000
Kab. Simalungun	413	259.232.136.000	294.442.204.000	298.689.733.000	296.800.840.000
Kab. Tapanuli Selatan	248	145.856.856.000	167.751.279.000	172.034.790.000	169.754.513.000
Kab. Tapanuli Tengah	215	121.058.197.000	140.541.973.000	144.349.335.000	142.631.022.000
Kab. Tapanuli Utara	252	164.129.846.000	184.186.164.000	194.621.304.000	192.016.817.000
Kab. Toba Samosir	244	154.311.189.000	176.101.238.000	179.571.269.000	177.074.852.000
Kab. Pakpak Bharat	52	40.948.983.000	48.298.630.000	50.424.120.000	50.970.983.000
Kab. Humbang Hasundutan	154	105.690.046.000	123.336.297.000	126.028.454.000	124.934.505.000
Kab. Serdang Bedagai	243	162.911.520.000	184.774.302.000	187.834.594.000	185.739.448.000
Kab. Samosir	134	90.921.937.000	108.744.499.000	109.313.044.000	107.929.748.000
Kab. Batu Bara	151	104.583.228.000	118.843.171.000	121.634.028.000	121.071.737.000

Kab. Padang Lawas	304	204.748.115.000	230.097.858.000	233.549.721.000	230.275.200.000
-------------------	-----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sumber : Kementerian Keuangan RI (www.kemenkeu.go.id)

Pada tabel diatas menunjukkan jumlah anggaran Dana Desa setiap Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 sampai 2021. Rata-rata disetiap kabupaten mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, ini disebabkan oleh tujuan dari pemerintah Indonesia untuk membangun Indoneisa dari pinggiran yang bertujuan untuk kesejahteraan. Anggaran Dana Desa terbesar pada Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021 dengan jumlah sebsar Rp 351.138.751.000 dengan jumlah desa sebanyak 461 desa. Sedangkan anggaran yang terendah yaitu kota Padang Sidimpuaan sebesar Rp 41.800.048.000 dengan jumlah desa sebanyak 79 desa. Total dari Anggaran Dana Desa 27 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2021 yaitu sebesar Rp 4,526 triliun. Disamping itu Kabupaten Langkat dapat dikatakan Kabupaten dengan anggaran dana desa yang sedang melihat jumlah desanya sebanyak 277 desa dengan anggran yang setiap tahunnya mengalami peningkatan serta sangat berpengaruh terhadap perkembangan desa tersebut baik dari segi ekonomi, pendidikan, kemandirian masyarakat dan lain sebagainya.

4.2.3 Anggaran Dana Desa Kabupaten Langkat

Berikut dibawah ini merupakan anggaran Dana Desa Kabupaten Langkat 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Anggaran Dana Desa Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2022 (Milyar)

No	Tahun	Jumlah Anggaran
1	2019	207.016.398
2	2020	212.446.839
3	2021	241.070.930

Sumber : Kementerian Keuangan RI (www.kemenkeu.go.id)

Pada data diatas menunjukkan Anggaran Dana Desa Kabupaten Langkat pada tahun 2019 anggaran dana desa Kabupaten Langkat sebesar Rp 207.016.398 milyar. Tahun 2020 dana desa mengalami peningkatan sebesar Rp 212.446.839 milyar naik dari tahun sebelumnya. Dan Dana Desa Pada tahun 2021 sebesar Rp 241.070.930 milyar untuk dana desa ngaka ini meningkat dari tahun sebelumnya.. Jika dilihat anggaran dan adesa Kabupaten Langkat setiap tahunnya mengalami peningkatan, ini disebabkan anggaran dana desa dari pemerintah pusat yang terus ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Langkat merupakan daerah yang cukup luas di provinsi Sumatera Utara, serta dengan potensi kekayaan sumberdaya yang melimpah, yakni perkebunan sawit, peternakan dan perikanan. Namun kekayaan alamnya hingga saat ini dinilai belum mampu (berkembang) dalam menyejahterakan sebagian penduduknya.

4.2.4 Anggaran Dana Desa Kecamatan Berandan Barat

Berikut dibawah ini anggaran Dana Desa Kecamatan Brandan Barat tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4. 13 Anggaran Dana Desa Kecamatan Brandan Barat, 2021

Nama Desa	Anggaran Dana Desa, 2021
Sei Tualang	Rp 772.734.000
Lubuk Kasih	Rp 809.261.000
Lubuk Kertang	Rp 839.891.000
Perlis	Rp 1.523.841.000
Kelantan	Rp 1.209.998.000
Total	Rp 5.155.725.000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dana Desa Kabupaten Langkat

www.dinaspmd.asahankab.go.id

Berdasarkan tabel di atas Kecamatan Brandan Barat terdiri dari 5 desa. Pada anggaran Dana Desa Kecamatan Brandan Barat totalnya mencapai Rp 5.155.725.000. Desa Sei Tualang sebesar Rp 772.734.000. Desa Lubuk Kasih sebesar Rp 809.261.000, desa Lubuk Kertang Rp 839.891.000, desa Perlis Rp 1.523.841.000 dan desa Kelantan yaitu sebesar Rp 1.209.998.000. Desa dengan anggaran terbesar adalah Desa Perlis dengan jumlah mencapai 1 milyar lebih sedangkan desa dengan anggaran terendah adalah Desa Sei Tualang dengan jumlah 772 jutaan.

Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur bagaimana otonomi daerah dengan mekanisme transfer ke daerah dan dana desa dikelola baik untuk kesejahteraan masyarakat dengan melihat Indeks Pembangunan Desa (IPD). Indeks Pembangunan Desa (IPD) disusun untuk mengklasifikasikan apakah suatu Negara atau wilayah adalah negara maju, Negara berkembang atau Negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

4.3 Analisis Pembahasan Tujuan Penelitian

4.3.1 Analisis ekonomi deskriptif tentang perkembangan kategorisasi desa Indeks Pembangunan Desa (IPD) pada Kabupaten Langkat tahun 2014 dan 2018.

IPD merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia dengan unit analisisnya “Desa”. Pengukuran IPD bersifat *village specific*, yang dibangun dari 2 (dua) sumber data yaitu: (1) data hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan April 2014 dan digunakan sebagai rujukan

indikator-indikator utama penyusun indeks; serta (2) data Wilayah Administrasi Pemerintahan menurut Permendagri RI Nomor 39 Tahun 2015 yang digunakan sebagai rujukan standar terkait jumlah Desa teregistrasi di Indonesia. Dalam perkembangannya, jumlah desa menurut Permendagri melebihi jumlah desa hasil Potensi Desa 2014 sebagai akibat terjdin

ya pemekaran desa setelah April 2014. Terhadap desa-desa hasil pemekaran wilayahtersebut maka IPD-nya diestimasi berdasarkan nilai IPD desa induknya atau berdasarkan rata- rata IPD desa-desa lain yang secara spasial letaknya berdekatan dengan desa hasil pemekaran. Dalam merumuskan konsep dan metodologi pengukurannya, maka pengukuran IPD telah mempertimbangkan berbagai unsur kekhasan persoalan desa–desa di Indonesia.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Atas dasar amanat tersebut maka Desa diklasifikasikan berdasarkan IPD menjadi Desa Mandiri, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal. *Output* dari penyusunan IPD ini adalah terpetakannya Desa–Desa berdasarkan tingkat perkembangan desa menurut IPD ke dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu: Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal di seluruh provinsi di Indonesia disertai dengan informasi untuk masing– masing dimensi, variabel, dan indikator

penyusunnya.

Pengklasifikasian desa pernah dilakukan dengan klasifikasi: Desa Swasembada, Desa Swakarya, dan Desa Swadaya. Hampir seluruh desamenyambut baik pengklasifikasian tersebut sebagai suatu upaya untuk mengetahui tingkat perkembangannya masing–masing desa. Klasifikasi desa dimunculkan kembali dalam RPJMN 2015–2019 terutama dikaitkan dengan sasaran pembangunan desa yang bertujuan untuk:

- (1) memetakan kondisi desa di Indonesia berdasarkan tingkat perkembangannya;
- (2) menetapkan target/sasaran pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan yang harus dicapai secara bersama–sama oleh para pelaku pembangunan desa; dan
- (3) memotret kinerja pembangunan yang sudah dilaksanakan di desa.

Penyusunan IPD ini dilaksanakan dengan maksud untuk menjadikan IPD sebagai: (1) suatu alat/instrumen yang memberikan informasi bagi pelaku pembangunan desa baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa agar dapat melakukan intervensi kebijakan yang tepat sebagai upaya pengungkit perkembangan desanya; (2) suatu alat untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pembangunan desa dalam rangka pencapaian sasaran/target RPJMN 2015–2019.

IPD disusun dengan “Desa” sebagai unit analisis, dan ditambah dengan berbagai informasi berupa rata-rata indeks per pulau, rata-rata indeks per provinsi, dan rata-rata indeks per kabupaten/kota untuk memberikan potret terkait kondisi atau status perkembangan desa-desa per pulau, provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia. Dengan kata lain, IPD merupakan suatu alat ukur yang dibuat untuk

menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana pemenuhan atau pencapaian dimensi/aspek, variabel, dan indikator sebagai penjabaran dari dimensi/aspek perkembangan desa tersebut.

IPD diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat. *Pertama*, IPD memuat data dan informasi penting yang dapat dijadikan sebagai acuan/referensi untuk melihat kondisi dan tingkat perkembangan desa di Indonesia pada posisi terkini. Data ini sangat membantu para pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah, pengamat, peneliti, mahasiswa, bahkan masyarakat desa itu sendiri untuk memahami kondisi terkini kemajuan pembangunan desa di Indonesia. *Kedua*, IPD berguna sebagai bahan bagi perencanaan pembangunan desa di tingkat pusat (Kementerian/Lembaga), tingkat provinsi (Bappeda dan SKPD terkait pembangunan desa), tingkat kabupaten/kota (Bappeda dan SKPD terkait pembangunan desa), serta tingkat desa (pemerintah desa dan masyarakat desa).

IPD memuat data yang dapat menunjukkan dimensi, variabel, dan indikator mana saja yang perlu didukung untuk lebih ditingkatkan dan yang tidak perlu didukung karena dianggap sudah optimal/memadai di tingkat desa. Seluruh pemangku kepentingan pembangunan desa dapat menjadikan IPD sebagai rujukan dalam proses perumusan kebijakan, penyiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan desa. *Ketiga*, IPD berguna untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program-program dalam pembangunan desa, kesesuaian antara program yang telah dilaksanakan dengan kebutuhan desa, serta tercapai peningkatan status kemajuan desa tersebut.

Dalam pasal 74 disebutkan bahwa paling tidak ada 4 aspek yang perlu

dipenuhi dalam pembangunan desa yakni: (1) kebutuhan dasar; (2) pelayanan dasar; (3) lingkungan; dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam bagian penjelasan dalam UU tersebut, kebutuhan dasar didefinisikan sebagai upaya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Sementara, pelayanan dasar antara lain meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Sedangkan dalam pasal 78 tujuan pembangunan desa meliputi: (1) Kesejahteraan Masyarakat; (2) Kualitas Hidup; dan (3) Penanggulangan Kemiskinan. Hal ini diwujudkan melalui (1) Kebutuhan Dasar; (2) Sarana; (3) Prasarana; (4) Pengembangan Ekonomi Lokal; dan (5) Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan. Hasil sintesis tersebut membagi dimensi IPD menjadi 5 dimensi dengan disesuaikan dengan ketersediaan data/variabel dalam data Potensi Desa 2014 yaitu sebagai berikut.

- 2) **Pelayanan Dasar** mewakili aspek pelayanan dasar untuk mewujudkan bagian dari kebutuhan dasar, khusus untuk pendidikan dan kesehatan. Variabel yang termasuk sebagai komponen penyusunnya meliputi ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan SMA; serta ketersediaan dan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas/pustu, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, tempat praktek bidan, poskesdes, polindes, dan apotek.
- 3) **Kondisi Infrastruktur** mewakili Kebutuhan Dasar; Sarana; Prasarana; Pengembangan Ekonomi Lokal; dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan dengan memisahkan aspek aksesibilitas/transportasi. Variabel-variabel penyusunnya mencakup ketersediaan infrastruktur ekonomi seperti: kelompok

pertokoan, minimarket, maupun toko kelontong, pasar, restoran, rumah makan, maupun warung/kedai makanan, akomodasi hotel atau penginapan, serta bank; ketersediaan infrastruktur energi seperti: listrik, penerangan jalan, dan bahan bakar untuk memasak; ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi seperti: sumber air minum, sumber air mandi/cuci, dan fasilitas buang air besar; serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi dan informasi seperti: komunikasi menggunakan telepon seluler, internet, dan pengiriman pos/barang.

- 4) **Aksesibilitas/Transportasi** dipisahkan sebagai dimensi tersendiri dalam indikator pembangunan desa dengan pertimbangan sarana dan prasarana transportasi memiliki kekhususan dan prioritas pembangunan desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi dalam desa. Variabel-variabel penyusunnya meliputi ketersediaan dan akses terhadap sarana transportasi seperti: lalu lintas dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan, ketersediaan dan operasional angkutan umum; dan aksesibilitas transportasi seperti: waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor camat, biaya per kilometer transportasi ke kantor camat, waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor bupati/walikota, dan biaya per kilometer transportasi ke kantor bupati/walikota. Indikator jarak antara desa dengan pusat pemerintahan ini merujuk dari variabel yang tercantum dalam Potensi Desa 2014, dengan asumsi bahwa pada umumnya pusat kegiatan sosial-ekonomi suatu kawasan berada di sekitar/dekat pusat-pusat

pemerintahan.

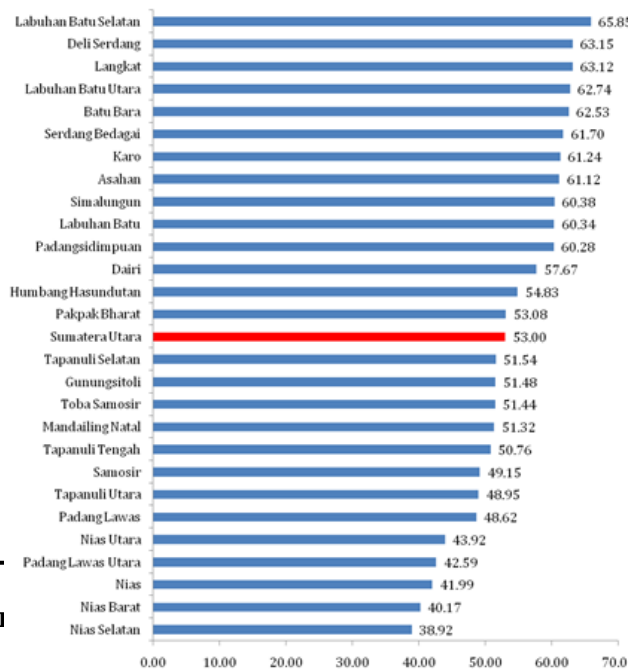
- 5) **Pelayanan Umum** merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif dengan tujuan memperkuat demokrasi, kohesi sosial, perlindungan lingkungan, dan sebagainya. Karena kekhususannya, variabel pelayanan administratif dinyatakan sebagai dimensi tersendiri (Penyelenggaraan Pemerintahan). Begitupun dengan variabel pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya menjadi dimensi tersendiri yang telah dijelaskan sebelumnya. Pelayanan dalam dimensi ini mewakili aspek lingkungan dan aspek pemberdayaan masyarakat serta mengacu pada ketersediaan data Potensi Desa 2014. Aspek lingkungan dalam hal ini terkait dengan kesehatan lingkungan masyarakat, sedangkan aspek pemberdayaan masyarakat diwakili dengan keberadaan kelompok kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, variabel-variabel penyusun dimensi ini mencakup penanganan kesehatan masyarakat seperti: penanganan kejadian luar biasa (KLB), dan penanganan gizi buruk; serta ketersediaan fasilitas olah raga seperti: ketersediaan lapangan olah raga, dan kelompok kegiatan olah raga.
- 6) **Penyelenggaraan Pemerintahan** mewakili indikasi kinerja pemerintahan desa merupakan bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan penyelenggara pelayanan bagi warga yang dalam hal ini adalah Pemerintah. Oleh karena itu variabel ini perlu diukur dan berdiri sendiri sebagai sebuah indikator pembangunan desa, karena

sifatnya sebagai perangkat terlaksananya tujuan pembangunan desa tersebut. Variabel-variabel penyusunnya meliputi kemandirian seperti: kelengkapan pemerintahan desa, otonomi desa, dan asset/kekayaan desa; serta kualitas sumber daya manusia seperti: kualitas SDM kepala desa dan sekretaris desa.

Pada tahun 2014 Rata-rata Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Sumatera Utara sebesar 53,00. Angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 55,69. Dari 5.389 desa, terdapat 3.299 desa dalam kategori berkembang (61,22%), sebanyak 88 desa mandiri (1,63%), dan sisanya sebanyak 2.002 desa (37,15%) dalam kategori desa tertinggal.

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing- masing dimensi, Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata- rata indeks sebesar 38,15. Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks adalah sebesar 54,34, dimensi pelayanan umum sebesar 46,01, dan dimensi penyelenggaraan pemerintahan sebesar 49,97.

Berikut dibawah ini grafik Indeks Pembangunan Desa per Kabupaten di Sumatra Utara tahun 2014 sebagai berikut:



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (www.sumut.bps.go.id)

Grafik 4. 11 Indeks Pembangunan Desa 2014 per Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa tertinggi di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan angka 65,85. Di kabupaten ini, dari 52 desa yang ada, tidak ada yang berstatus desa tertinggal, namun desa mandiri baru ada 2 desa, 50 desa lainnya masih berstatus berkembang. Sedangkan untuk rata-rata nilai indeks terendah di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Nias Selatan dengan rata-rata IPD sebesar 38,92. Di kabupaten ini jumlah desa tertinggal terbanyak diantara kabupaten lain di Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebanyak 390 desa dan tidak ada desa mandiri di kabupaten ini. Secara jumlah, desa mandiri tertinggi berada di Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah desa sebanyak 53 unit.

Berikut ini tabel Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Langkat tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel 4. 14 Indeks Pembangunan Desa 2014 Kabuapten Langkat

Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Langkat	63,12	67,96	50,17	74,30	53,59	67,21	4,17	93,75	2,08	240

Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.langkat.bps.go.id)

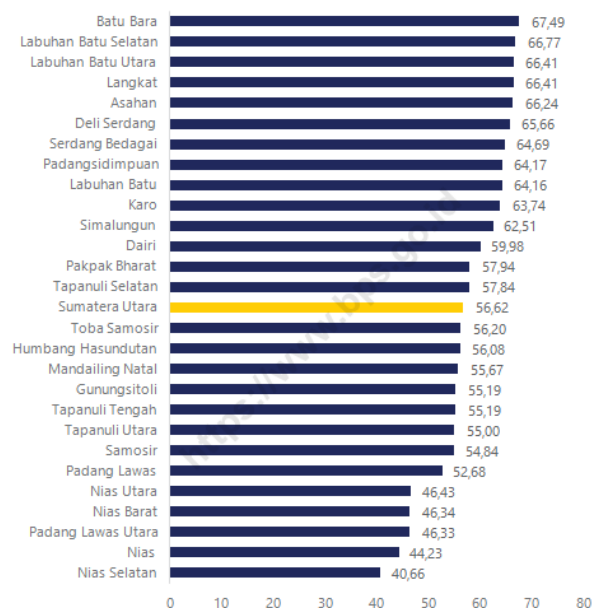
Dapat kita lihat pada tabel 4.14 bahwa Indeks Pembangunan Desa pada tahun 2014 di Kabupaten Langkat memiliki nilai IPD 63,12. Dengan nilai dimensi

Pelayanan Dasar 67,96, Kondisi Infrastruktur 50,17, Aksesibilitas/Transportasi 74,30, Pelayanan Umum 53,59 dan Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 67,21.

Kabupaten Langkat memiliki desa sebanyak 240 Desa. Dari 240 desa tersebut persentasi Desa tertinggal sebanyak 4,17 desa, Desa Berkembang sebanyak 93,75 desa dan Desa Mandiri sebanyak 2,08 desa. Rata-rata Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Sumatera Utara sebesar 56,62.

Pada tahun 2018 nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa masing-masing dimensi, Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai rata-rata indeks terendah pada Dimensi Kondisi Infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 41,71. Untuk Dimensi Pelayanan Dasar nilai rata-rata indeks adalah sebesar 54,94, Dimensi Pelayanan Umum sebesar 49,76, dan Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 62,43.

Berikut Grafik dibawah ini merupakan Indeks Pembangunan Desa per Kabupaten di Sumatra Utara tahun 2018 sebagai berikut:



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (www.sumut.bps.go.id)

Grafik 4. 12 Indeks Pembangunan Desa 2018 per Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa tertinggi di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Batu Bara dengan angka 67,49.

Di kabupaten ini, dari 141 desa yang ada, tidak ada yang berstatus desa tertinggal, namun desa mandiri baru 12 desa, 129 desa lainnya masih berstatus berkembang. Sedangkan untuk rata-rata nilai indeks terendah di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Nias Selatan dengan rata-rata IPD sebesar 40,66. Di kabupaten ini jumlah desa tertinggal terbanyak diantara kabupaten lain di Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebanyak 369 desa dan tidak ada desa mandiri di kabupaten ini. Secara jumlah, desa mandiri tertinggi berada di Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah desa sebanyak 80 unit.

Berikut dibawah ini merupakan Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Langkat tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4. 15 Indeks Pembangunan Desa 2018 Kabupaten Langkat

Nama Pulau	IPD 2018	Dimensi IPD					Persentase Desa Menurut Status Desa			Jumlah Desa
		Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Langkat	66,41	68,12	55,19	78,78	55,21	75,34	0,83	92,08	7,08	240

Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.langkat.bps.go.id)

Tabel 4.15 menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Desa pada tahun 2018 di Kabupaten Langkat memiliki nilai IPD 66.41. Dengan nilai dimensi Pelayanan Dasar 68,12, Kondisi Infrastruktur 55,19, Aksesibilitas/Transportasi 78,78, Pelayanan Umum 55,21 dan Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar

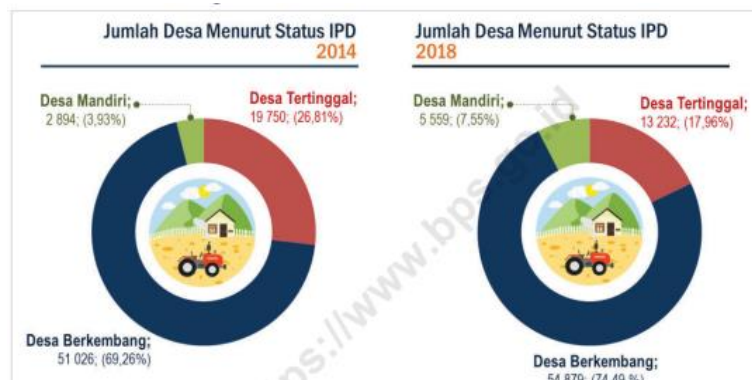
75,34.

Kabupaten Langkat memiliki desa sebanyak 240 Desa. Dari 240 desa tersebut persentasi Desa tertinggal sebanyak 0,83 desa, Desa Berkembang sebanyak 92,08 desa dan Desa Mandiri sebanyak 7,08 desa.

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Desa di Kabupaten Langkat pada tahun 2018 meningkat dibandingkan pada tahun 2014. Pada tahun 2018 Perkembangan IPD meningkat 3,29 persen, nilai dimensi Pelayanan Dasar meningkat menjadi 0,16 persen, Kondisi Infrastruktur meningkat menjadi 5,02 persen, Aksesibilitas/Transportasi meningkat menjadi 4,48 persen, dan Pelayanan Umum meningkat menjadi 1,62 persen, Penyelenggaraan Pemerintahan meningkat menjadi 8,13 persen.

Sedangkan perkembangan desa dari tahun 2014 sampai 2018 juga meningkat. Persentase Desa Tertinggal menurun menjadi 3,34 persen, Desa Berkembang menurun menjadi 1,67 persen sedangkan Desa Mandiri meningkat menjadi 5,00 persen.

Berikut dibawah ini merupakan jumlah Desa menurut status IPD 2014 dan 2018 sebagai berikut:



Sumber: BPS Indonesia (www.bps.go.id)

Grafik 4. 13 Jumlah Desa Menurut Status IPD 2014 dan 2018

Berdasarkan grafik 4.13 diatas menunjukkan bahwa Publikasi IPD tahun 2014, desa mandiri berjumlah 2.898 desa; desa berkembang berjumlah 50.763 desa; dan desa tertinggal berjumlah 20.423 desa. Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa desa-desa yang telah teregistrasi, terpetakan menurut kondisi pembangunan desa. Namun, untuk mengetahui perkembangan pembangunan desa dari tahun 2014 dan 2018, dilakukan penyamaan desa antara 2014 dan 2018

Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa desa-desa yang telah teregistrasi, terpetakan menurut kondisi pembangunan desa. Namun untuk mengetahui perkembangan pembangunan desa dari tahun 2014 dan 2018, dilakukan penyamaan desa antara 2014 dan 2018. Hal ini bertujuan, supaya pembangunan yang wilayah yang dilaksanakan anantara tahun 2014 dan 2018 merujuk pada suatu wilayah yang sama. Dengan demikian, perlu direduksi dengan menyatukan kembali desa yang mengalami pemekaran dan menyesuaikan kembali desa yang mengalami penggabungan sejak 2014 hingga 2018.

Perkembangan pembangunan desa yang secara panel ini dilakukan untuk mengetahui realistis pembangunan desa yang sesungguhnya dengan memperkiarakan seberapa besa Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dibangun di tingkat desa serta skala kriteria yang bertambah yaitu desa sangat tertinggal daan desa maju.

Pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor tersebut menjelaskan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat juga dipengaruhi oleh Dana Desa

yang ditransfer pemerintah pusat ke-daerah. Kabupaten Langkat termasuk kabupaten dengan anggaran dana desa terbesar diantara Kabupaten lainnya.

Oleh karena itu dengan adanya kebijakan Dana Desa yang berdampak dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) maka melimpahnya sumberdaya alam akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Langkat juga akan meningkat.

4.3.2 Analisis ekonomi deskriptif tentang capaian kategori Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Langkat dan Kecamatan Brandan Barat tahun 2019- 2021

Indeks Desa Membangun (IDM) yang dibangun oleh Kemendesa PDTT merupakan indeks yang memetakan status perkembangan desa yang memperhatikan karakteristiknya. Indeks ini digunakan sebagai instrumen untuk melakukan *targeting* dalam pencapaian IKU Kementerian Desa, PDTT 2015-2019.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang

memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pengakuan dan penghormatan Negara kepada Desa yang disertai dengan redistribusi sumberdaya dan kewenangan pembangunan secara penuh sebagaimana mandat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, memberikan tanda yang jelas bahwa dari situlah Desa harus menjadi tumpuan untuk membangun Indonesia. Disebutkan Menteri Desa, "IDM ini lebih komperhensif jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD), karena IDM ini mengedepankan pendekatan yang bertumpu kepada kekuatan sosial, ekonomi dan ekologi, tanpa melupakan kekuatan politik, budaya, sejarah, dan kearifan lokal" guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ada guna mengurangi angka kemiskinan.

Dalam konteks tipologi desa, Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: "(i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri". Dari kelima klasifikasi tersebut maka kini statrata desa sudah memiliki beberapa pembagian yang digunakan sebagai indikator atau parameter desa.

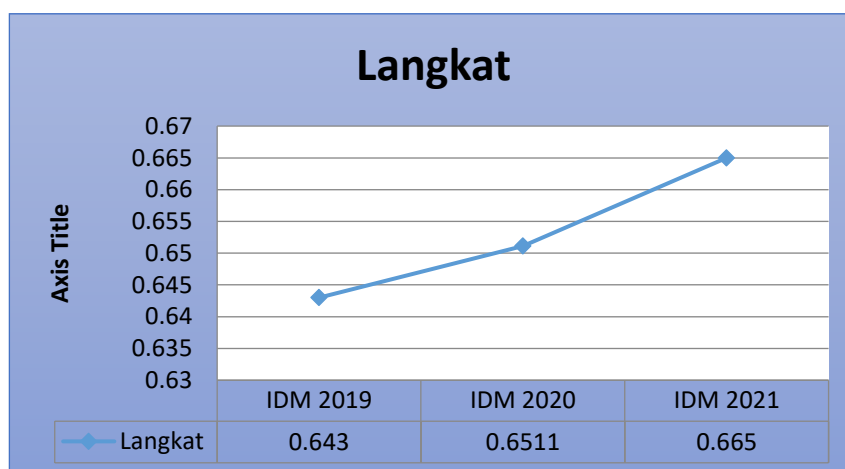
Berikut ini nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten Langkat 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel 4. 16 Nilai Indeks Desa Membangun di Kabupaten Langkat, 2019 – 2021

Kabupaten/Kecamatan	Average of Nilai IDM 2019	Status Kecamatan	Average of Nilai IDM 2020	Status Kecamatan	Average of Nilai IDM 2021	Status Kecamatan
LANGKAT	0.6430	BERKEMBANG	0.6511	BERKEMBANG	0.6650	BERKEMBANG
BAHOROK	0.7053	BERKEMBANG	0.7202	MAJU	0.7215	MAJU

SAWIT SEBERANG	0.6814	BERKEMBANG	0.6649	BERKEMBANG	0.6598	BERKEMBANG
BABALAN	0.6744	BERKEMBANG	0.6545	BERKEMBANG	0.6654	BERKEMBANG
PANGKALAN SUSU	0.6640	BERKEMBANG	0.6735	BERKEMBANG	0.6682	BERKEMBANG
STABAT	0.6639	BERKEMBANG	0.6775	BERKEMBANG	0.6757	BERKEMBANG
SECANGGANG	0.6617	BERKEMBANG	0.6623	BERKEMBANG	0.6442	BERKEMBANG
SEI BINGEI	0.6617	BERKEMBANG	0.6725	BERKEMBANG	0.6677	BERKEMBANG
BINJAI	0.6604	BERKEMBANG	0.6481	BERKEMBANG	0.6500	BERKEMBANG
SIRAPIT	0.6597	BERKEMBANG	0.6637	BERKEMBANG	0.6799	BERKEMBANG
WAMPU	0.6485	BERKEMBANG	0.6568	BERKEMBANG	0.6655	BERKEMBANG
SEI LEPAN	0.6469	BERKEMBANG	0.6284	BERKEMBANG	0.6402	BERKEMBANG
SALAPIAN	0.6432	BERKEMBANG	0.6642	BERKEMBANG	0.6639	BERKEMBANG
HINAI	0.6427	BERKEMBANG	0.6479	BERKEMBANG	0.6652	BERKEMBANG
GEBANG	0.6424	BERKEMBANG	0.6420	BERKEMBANG	0.6500	BERKEMBANG
SELESAI	0.6392	BERKEMBANG	0.6533	BERKEMBANG	0.6662	BERKEMBANG
TANJUNG PURA	0.6128	BERKEMBANG	0.6281	BERKEMBANG	0.6298	BERKEMBANG
BESITANG	0.6358	BERKEMBANG	0.6404	BERKEMBANG	0.6441	BERKEMBANG
PADANG TUALANG	0.6248	BERKEMBANG	0.6351	BERKEMBANG	0.6463	BERKEMBANG
KUALA	0.6120	BERKEMBANG	0.6191	BERKEMBANG	0.6216	BERKEMBANG
KUTAMBARU	0.5977	TERTINGGAL	0.6021	BERKEMBANG	0.6111	TERTINGGAL
BERANDAN BARAT	0.5914	TERTINGGAL	0.6030	BERKEMBANG	0.6124	TERTINGGAL
PEMATANG JAYA	0.5866	TERTINGGAL	0.6006	BERKEMBANG	0.6134	TERTINGGAL
BATANG SERANGAN	0.5865	TERTINGGAL	0.6290	BERKEMBANG	0.6373	TERTINGGAL

Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.langkat.bps.go.id)



Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.langkat.bps.go.id)

Grafik 4. 14 Nilai Indeks Desa Membangun di Kabupaten Langkat, 2019 – 2021

Kabupaten Langkat terdiri dari 23 Kecamatan, 37 Kelurahan, dan 240 Desa. Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Langkat sangatlah pesat, dapat kita lihat dari tabel 4.16 bahwasanya ada 1 Kecamatan yang

status atau kategori desanya maju yaitu Desa Bahorok sedangkan 22 desa lainnya termasuk dalam status atau kategori berkembang.

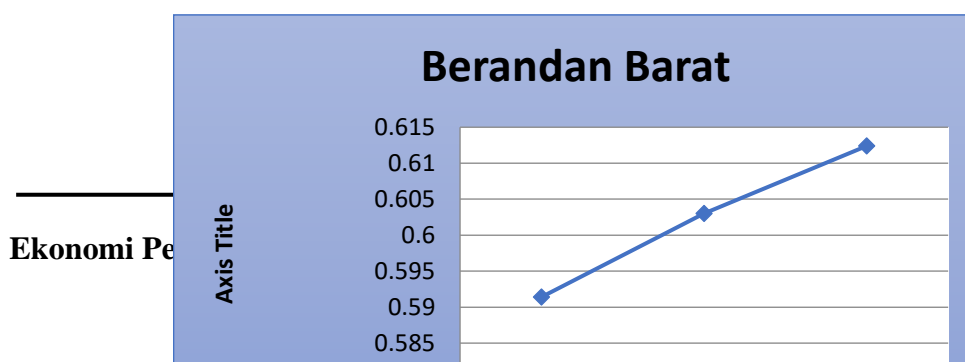
Grafik 4.16 menjelaskan bahwa Indeks Desa Membangun (IPD) di Kabupaten Langkat setiap tahunnya meningkat. Dapat kita lihat pada tahun 2019 nilai Indeks Desa Membangun sebesar 0,6430, pada tahun 2020 Indeks Desa Membangun naik (0,0081) persen menjadi 0,6511, pada tahun 2021 Indeks Desa Membangun juga naik (0,0139) persen menjadi 0,6650 dan pada tahun 2022 Indeks Desa Membangun juga naik (0,0061) persen menjadi 0,6711. Pada tahun 2019 sampai 2022 status atau kategori Indeks Membangun Desa di Kabupaten Langkat adalah berkembang.

Berikut ini merupakan nilai Indeks Desa Membangun di Kecamatan Brandan Barat tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel 4. 17 Nilai Indeks Desa Membangun di Kecamatan Brandan Barat, 2019 – 2022

Kabupaten/Kecamatan	Average of Nilai IDM 2019	Status Kecamatan	Average of Nilai IDM 2020	Status Kecamatan	Average of Nilai IDM 2021	Status Kecamatan
BERANDAN BARAT	0.5914	TERTINGGAL	0.6030	BERKEMBANG	0.6124	BERKEMBANG
LUBUK KASIH	0.6316	BERKEMBANG	0.6759	BERKEMBANG	0.6835	MAJU
PERLIS	0.5852	TERTINGGAL	0.5219	TERTINGGAL	0.5441	TERTINGGAL
LUBUK KERTANG	0.5584	TERTINGGAL	0.6632	BERKEMBANG	0.6689	BERKEMBANG
KELANTAN	0.5412	TERTINGGAL	0.5359	TERTINGGAL	0.5397	TERTINGGAL
SEI TUALANG	0.5284	TERTINGGAL	0.6181	BERKEMBANG	0.6257	BERKEMBANG

Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.langkat.bps.go.id)



Sumber: BPS Kabupaten Langkat (www.langkat.bps.go.id)

Grafik 4. 15 Nilai Indeks Desa Membangun di Kecamatan Brandan Barat, 2019 – 2021

Kecamatan Berandan Barat merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat, kecamatan ini memiliki 5 Desa dan 2 Kelurahan. Perkembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Berandan Barat cukup baik. Dari 5 desa yang ada terdapat 2 Desa yang masuk dalam status tertinggal sedangkan 3 desa lainnya masuk dalam status berkembang. Pada tahun 2021 salah satu desa di Kecamatan Berandan Barat pernah memasuki status desa maju yaitu desa Lubuk Kasih, kemudian pada tahun 2022 desa tersebut kembali menjadi status berkembang.

Grafik 4.17 menjelaskan bahwa Indeks Desa Membangun di Kecamatan Berandan Barat meningkat. Dapat kita lihat pada tahun 2019 nilai Indeks Desa Membangun sebesar 0.5914, pada tahun 2020 Indeks Desa Membangun naik (0,0116) persen menjadi 0,6030, pada tahun 2021 Indeks Desa Membangun naik (0,0094) persen menjadi 0,6030, dan pada tahun 2022 Indeks Desa Membangun naik menjadi (0,0182) persen menjadi 0,6306. Pada tahun 2019 Kecamatan

Berandan Barat berada di status Desa Tertinggal kemudian pada tahun 2020-2022 status Berandan Barat berubah menjadi Desa Berkembang.

Berikut dibawah ini merupakan anggaran Dana Desa di Kecamatan Brandan Barat tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4. 18 Anggaran Dana Desa Kecamatan Brandan Barat, 2021

Nama Desa	Anggaran Dana Desa, 2021
Sei Tualang	Rp 772.734.000
Lubuk Kasih	Rp 809.261.000
Lubuk Kertang	Rp 839.891.000
Perlis	Rp 1.523.841.000
Kelantan	Rp 1.209.998.000
Total	Rp 5.155.725.000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dana Desa Kabuapten Langkat

(www.dinaspmd.asahankab.go.id)

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan Brandan Barat terdiri dari 5 desa. Pada anggaran Dana Desa Kecamatan Brandan Barat totalnya mencapai Rp 5.155.725.000. Desa Sei Tualang sebesar Rp 772.734.000. Desa Lubuk Kasih sebesar Rp 809.261.000, desa Lubuk Kertang Rp 839.891.000, desa Perlis Rp 1.523.841.000 dan desa Kelantan yaitu sebesar Rp 1.209.998.000. Desa dengan anggaran terbesar adalah Desa Perlis dengan jumlah mencapai 1 milyar lebih sedangkan desa dengan anggaran terendah adalah Desa Sei Tualang dengan jumlah 772 jutaan.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek

sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Oleh karena itu dengan adanya kebijakan Dana Desa yang berdampak dengan Indeks Desa Membangun (IDM) maka melimpahnya sumberdaya alam akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan desa di Kecamatan Berandan Barat juga akan meningkat.

4.3.3 Hasil Analisis Regresi

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif, menggunakan permodelan analisis regresi linier berganda dalam hal ini dilakukan karena peneliti akan berusaha menjelaskan hubungan antara dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dana alokasi khusus (DAK), dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap indeks desa membangun

(IDM). Dengan menggunakan data *timeseries* selama periode 2014-2021. Menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan program *Eviews 12* berikut hasil *running* data yang telah diolah sebagai berikut:

Sumber: Eviews 12 diolah

Gambar 4. 1 Hasil Regresi Model Indeks Desa Membangun (IDM)

Dari hasil regresi pertama di atas, ditemukan masalah bahwa secara parsial ada variabel bebas yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Indeks desa membangun (IDM) yaitu variabel dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan dana alokasi khusus (DAK) memiliki nilai lebih besar dari pada 0,1 ($\alpha > 10\%$). Variabel bebas lainnya yaitu variabel indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki nilai lebih kecil dari pada 0,1 ($\alpha < 10\%$). Yang berarti variabel indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel indeks desa membangun di Kabupaten Langkat. Namun regresi tersebut menghasilkan *Adjusted R-squared* yang tinggi yaitu sebesar 0.95 yang artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat tinggi dan tidak terjadi autokorelasi. Maka akan dilakukan pengujian selanjutnya, yaitu uji

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas dengan menggunakan variabel-variabel berikut:

4.3.3.1 Penaksiran

1. Korelasi (R)

Dari hasil regresi yaitu variabel Indeks Desa Membangun (IDM) yang sudah di logaritma natural, diperoleh nilai R sebesar 0.978600, artinya bahwa derajat keeratan antara variabel dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dana alokasi khusus (DAK) dan indeks pembangunan manusia (IPM) dengan indeks desa membangun (IDM) adalah sebesar 0.978600.

2. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (*R Square*) menunjukkan proporsi persentase variabel total dalam menjelaskan variabel terikat (dependen) yang dijelaskan oleh variabel bebas (independen) secara bersama-sama. Berdasarkan dari model estimasi yaitu variabel yang mempengaruhi Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dilihat nilai R^2 adalah sebesar 0.978600 artinya secara bersama-sama dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dana alokasi khusus (DAK) dan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 97,86%. Sedangkan 2,14% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk kedalam model estimasi atau berada pada *disturbance error term*.

4.3.3.2 Interpretasi Hasil

Dari hasil regresi pada model variabel Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai berikut:

$$IDM_t = \beta_0 + \beta_1 DD_t + \beta_2 ADD_t + \beta_3 DAK_t + \beta_4 IPM_t + \varepsilon_t$$

Maka interpretasi hasil model pertama adalah sebagai berikut:

$$\text{IDM}_t = -2.122318 + 4.130010 \text{ DD}_t + 2.750010 \text{ ADD}_t - 6.210011 \text{ DAK}_t + 0.037537 \text{ IPM}_t + \varepsilon_t$$

Koefisien $\beta_0 = -2.122318$, artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa jika dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dana alokasi khusus (DAK) dan indeks pembangunan manusia (IPM) kita abaikan maka rata-rata indeks desa membangun sebesar -2.122318 dan jika dilihat dari hasil olahan diketahui nilai *probability* 0.0907% yang berarti signifikan.

Koefisien $\beta_1 = 4.130010$, artinya jika nilai dana desa (DD) terjadi penambahan 1000 maka indeks desa membangun di Kabuapten Langkat juga akan berubah nilainya naik sebesar 4.130010% dan jika dilihat dari hasil olahan diketahui nilai *probability* 0.4759 ($> 0,1$) yang berarti tidak signifikan. Hal ini menunjukkan tinggi atau rendahnya nilai dana desa (DD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks desa membangun (IDM) begitu sebaliknya.

Koefisien $\beta_2 = 2.750010$, artinya jika nilai alokasi dana desa (ADD) terjadi penambahan 1000 maka indeks desa membangun di Kabuapten Langkat juga akan berubah meningkat sebesar 2.750010 % dan jika dilihat dari hasil olahan diketahui nilai *probability* 0.5816 ($> 0,1$) yang berarti tidak signifikan. Hal ini menunjukkan tinggi atau rendahnya nilai alokasi dana desa (ADD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks desa membangun (IDM) begitu sebaliknya.

Koefisien $\beta_3 = -6.210011$, artinya jika nilai dana alokasi khusus (DAK) terjadi penambahan 1000 maka indeks desa membangun di Kabuapten Langkat juga akan berubah meningkat sebesar -6.210011% dan jika dilihat dari hasil olahan diketahui nilai *probability* 0.7244 ($> 0,1$) yang berarti tidak signifikan. Hal ini

menunjukkan tinggi atau rendahnya nilai alokasi dana desa (ADD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks desa membangun (IDM) begitu sebaliknya.

Koefisien $\beta_4 = 0.037537$, artinya jika nilai indeks pembangunan manusia (IPM) terjadi penambahan 1000 maka indeks desa membangun di Kabupaten Langkat juga akan berubah meningkat sebesar 0.037537 % dan jika dilihat dari hasil olahan diketahui nilai *probability* 0.0716 ($< 0,1$) yang berarti signifikan. Hal ini menunjukkan tinggi atau rendahnya nilai indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh secara signifikan terhadap indeks desa membangun (IDM) begitu sebaliknya.

4.3.3.3 Konstanta dan Intersep

Dalam hasil estimasi data pada model regresi linier berganda, terdapat nilai konstanta sebesar -2.122318, yang bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat nilai rata-rata indeks desa membangun di Kabupaten Langkat cenderung menurun ketika variabel penjelas berubah. Untuk interpretasi hasil regresi variabel independen akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana Desa (DD)

Hasil ini menyatakan bahwa dana desa tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap indeks desa membangun. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya nilai dana desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Langkat. Masalah utama dana desa di Kabupaten Langkat adalah pada aspek pembinaan pengelolaan Dana Desa anatar lain belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintah desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap.

Perencanaan Dana Desa juga belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Pelaksanaan pembinaan program kegiatannya belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa.

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Hasil ini menyatakan bahwa aloaksi dana desa tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap indeks desa membangun. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya nilai alokasi dana desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Langkat. Masalah utama alokasi dana desa di Kabuapten Langkat adalah kesulitan dalam membuat laporan dan adanya tantangan yang bersifat umum dan teknis. Perlunya pendirian BUMD dan penguatan lembaga desa serta pemerataan dan keseimbangan antara pembangunan infrastuktur dan manusia.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Hasil ini menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap indeks desa membangun. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya nilai alokasi dana khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Langkat. Masalah utama dana aloaksi khusus di Kabupaten Langkat adalah memperlihatkan bahwa DAK dengan pola dan besaran aloaksi seperti yang diterapkan selama ini tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan-tujuan pembangunan yang meliputi pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil ini menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap indeks desa membangun. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya nilai indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Langkat. Masalahnya yaitu ketidakmerataan capaian IPM di Provinsi membuat ketimpangan pendapatan di Indonesia sampai Kabupaten, untuk membangun indeks pembangunan manusia peningkatan angka harapan hidup, harapan sekolah, dan lama sekolah membutuhkan upaya yang konsisten dan sinergi agar mencapai tujuan yang maksimal.

4.3.3.4 Uji Statistik

Uji-t statistik dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual menjelaskan variabel-variabel dependen. Regresi pengaruh variabel-variabel dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dana alokasi khusus (DAK) dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap indeks desa membangun (IDM). Adapun dalam penelitian ini untuk melihat nilai t_{tabel} dengan cara

$$df (n)-k = 8-4 = 4 \text{ dengan } (\alpha = 10\%) \text{ maka nilai } t_{tabel} \text{ sebesar } 2,132..$$

Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji-F statistik bertujuan untuk pengujian signifikan semua variabel independen secara bersama-sama terhadap nilai variabel dependen. Dari hasil regresi dengan menggunakan *autoregressive* variabel dana desa (DD),), alokasi dana desa (ADD), dana alokasi khusus (DAK) dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap indeks desa membangun (IDM), memiliki nilai *probability (F statistic)* sebesar 0,007726 dan nilai *F statistic* sebesar 34,29703. Maka dengan nilai

ini dapat disimpulkan bahwasanya variabel independen bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

4.3.3.5 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibentuk terjadi korelasi Antara variabel dalam model tersebut. Jika terjadi multikolinearitas maka variabel-variabel tidak ortogonal atau nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Salah satu cara untuk melihat adanya tidak multikolinearitas pada suatu model regresi ialah dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Hal ini dapat dilihat pada gambar tersebut sebagai berikut.

Variance Inflation Factors
Date: 09/01/22 Time: 20:53
Sample: 2014 2021
Included observations: 8

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.743179	32451.56	NA
DD	2.59E-19	439.4572	5.140715
ADD	2.00E-19	119.7133	21.56761
DAK	2.58E-20	121.6826	16.16696
IPM	0.000188	40125.55	10.58992

Sumber : Eviews 12 diolah

Gambar 4. 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji diatas menunjukkan *Centered* VIF terdapat 3 variabel yang memiliki nilai lebih besar dari 10 ($VIF > 10$) yaitu ADD, DAK dan IPM, maka artinya bahwa dalam hasil regresi logaritma tersebut terjadi multikolinieritas. Dan 1 variabel lainnya memiliki nilai lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$) yaitu DD, maka artinya bahwa dalam hasil regresi logaritma tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya dilakukan uji heterokedstisitas untuk melihat ada atau tidak adanya

kesamaan antar variabel dari eror setiap variabel bebas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti variasi residual tidak sama untuk semua variabel yang diambil keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linier ialah dengan melihat nilai pada test white, dimana pengujiannya adalah jika nilai *probability observation R-squared* > 5%, maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak. Dari hasil olahan data dapat diperoleh sebagai berikut:

Heteroskedasticity Test: White				
Null hypothesis: Homoskedasticity				
F-statistic	1.027524	Prob. F(4,3)	0.5117	
Obs*R-squared	4.624518	Prob. Chi-Square(4)	0.3280	
Scaled explained SS	0.104829	Prob. Chi-Square(4)	0.9987	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 09/01/22 Time: 20:56				
Sample: 2014 2021				
Included observations: 8				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.000245	0.001384	-0.176948	0.8708
DD^2	-4.16E-21	3.56E-21	-1.167271	0.3274
ADD^2	-2.81E-21	9.49E-21	-0.296246	0.7864
DAK^2	2.36E-22	9.55E-22	0.247697	0.8204
IPM^2	1.00E-07	3.15E-07	0.317780	0.7715
R-squared	0.578065	Mean dependent var	6.87E-05	
Adjusted R-squared	0.015484	S.D. dependent var	4.17E-05	
S.E. of regression	4.14E-05	Akaike info criterion	-17.07844	
Sum squared resid	5.14E-09	Schwarz criterion	-17.02878	
Log likelihood	73.31374	Hannan-Quinn criter.	-17.41331	
F-statistic	1.027524	Durbin-Watson stat	3.042726	
Prob(F-statistic)	0.511724			

Sumber : Eviews 12 diolah

Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan uji *white* diperoleh nilai p value yang ditunjukkan dengan nilai *prob. Chi Square* (4) pada Obs*R-squared yaitu sebesar 0,3280. oleh karena itu p value $0,3280 < 0,15$ hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas, artinya bahwa

syarat asumsi klasik untuk model regresi linier berganda antara indeks desa membangun di Kabupaten Langkat terhadap dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dana alokasi khusus (DAK) dan indeks pembangunan manusia (IPM) terjadi heteroskedastisitas.

c. Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji apakah suatu model terdapat autokorelasi dalam penelitian ini maka digunakan uji statistik *durbin watson* yaitu dengan cara melihat nilai (D-W) yang diperoleh.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	27.48772	Prob. F(2,1)	0.1337
Obs*R-squared	7.857080	Prob. Chi-Square(2)	0.0197

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 09/01/22 Time: 20:59
Sample: 2014 2021
Included observations: 8
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.050640	0.276641	0.183052	0.8847
DD	1.94E-10	1.46E-10	1.335009	0.4093
ADD	-5.13E-10	1.56E-10	-3.285119	0.1881
DAK	2.22E-10	5.15E-11	4.317480	0.1449
IPM	-0.001463	0.004392	-0.333050	0.7953
RESID(-1)	-0.257713	0.207691	-1.240849	0.4318
RESID(-2)	-1.341162	0.185333	-7.236513	0.0874

R-squared	0.982135	Mean dependent var	2.22E-16
Adjusted R-squared	0.874945	S.D. dependent var	0.008861
S.E. of regression	0.003134	Akaike info criterion	-9.022746
Sum squared resid	9.82E-06	Schwarz criterion	-8.953234
Log likelihood	43.09098	Hannan-Quinn criter.	-9.491572
F-statistic	9.162575	Durbin-Watson stat	3.327686
Prob(F-statistic)	0.247644		

Sumber : Eviews 12 diolah

Gambar 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi

Pada model pertama setelah dilakukan pengujian diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 3.327686, artinya model yang digunakan sudah terbebas dari masalah autokorelasi. Berdasarkan pengujian dengan *Breusch-Godfrey Serial*

Correlation LM test tersebut bahwa model regresi linier berganda antara indeks desa membangun (IDM), terhadap dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan dana alokasi khusus (DAK) tidak terjadi autokorelasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. perkembangan Indeks Pembangunan Desa di Kabupaten Langkat pada tahun 2018 meningkat dibandingkan pada tahun 2014. Pada tahun 2018 Perkembangan IPD meningkat 3,29 persen, nilai dimensi Pelayanan Dasar meningkat menjadi 0,16 persen, Kondisi Infrastruktur meningkat menjadi 5,02 persen, Aksesibilitas/Transportasi meningkat menjadi 4,48 persen, dan Pelayanan Umum meningkat menjadi 1,62 persen, Penyelenggaraan Pemerintahan meningkat menjadi 8,13 persen.
2. Pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor tersebut menjelaskan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat juga

dipengaruhi oleh Dana Desa yang ditransfer pemerintah pusat ke-daerah. Kabupaten Langkat termasuk kabupaten dengan anggaran dana desa terbesar diantara Kabupaten lainnya.

3. Indeks Desa Membangun (IPD) di Kabupaten Langkat setiap tahunnya meningkat. Dapat kita lihat pada tahun 2019 nilai Indeks Desa Membangun sebesar 0,6430, pada tahun 2020 Indeks Desa Membangun naik (0,0081) persen menjadi 0,6511, pada tahun 2021 Indeks Desa Membangun juga naik (0,0139) persen menjadi 0,6650 dan pada tahun 2022 Indeks Desa Membangun juga naik (0,0061) persen menjadi 0,6711. Pada tahun 2019 sampai 2022 status atau kategori Indeks Membangun Desa di Kabupaten Langkat adalah berkembang.
4. Indeks Desa Membangun di Kecamatan Berandan Barat meningkat. Dapat kita lihat pada tahun 2019 nilai Indeks Desa Membangun sebesar 0.5914, pada tahun 2020 Indeks Desa Membangun naik (0,0116) persen menjadi 0,6030, pada tahun 2021 Indeks Desa Membangun naik (0,0094) persen menjadi 0,6030, dan pada tahun 2022 Indeks Desa Membangun naik menjadi (0,0182) persen menjadi 0,6306. Pada tahun 2019 Kecamatan Berandan Barat berada di status Desa Tertinggal kemudian pada tahun 2020-2022 status Berandan Barat berubah menjadi Desa Berkembang.
5. estimasi yaitu variabel yang mempengaruhi Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dilihat nilai R^2 adalah sebesar 0.978600 artinya secara bersama-sama dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dana alokasi khusus (DAK) dan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 97,86%. Sedangkan 2,14% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk kedalam

model estimasi atau berada pada *disturbance error tern*.

6. Secara simultan, indeks pembangunan manusia (IPM) signifikan, namun dana fdesa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan alokasi khusus (DAK) tidak signifikan berpengaruh terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Langkat (IDM).

5.2 Saran

1. Pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan kebijakan-kebijakan dan tata cara pengelolaan Dana Desa kepada perangkat desa, sehingga perangkat desa memiliki kompetensi maupun pengetahuan yang memadai.
2. Pemerintah desa harus lebih transparansi dalam menerapkan kebijakan-kebijakan penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan.
3. Pemerintah desa harus memperhatikan indeks ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan agar tercapainya kategori desa maju maupun mandiri kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irma Seska Arina, Vecky Masinambow, Een N. Walewangko (2021). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, volume 22 No.3 2021
- Badan Pusat Statistika (BPS) 2021. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun2010-2021. Jakarta: BPS www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistika (BPS) 2021. Indeks Pembangunan Manusia Sumatra Utara Tahun 2011-2021. Sumut: BPS www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistika (BPS) 2021. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Langkat Tahun 2010-2021. Langkat : BPS www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistka (BPS) 2021. Indeks Pembangunan Desa Menurut Pulau 2018. Katalog 11051123: BPS www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistka (BPS). Indeks Pembangunan Desa Menurut Pulau 2018. Katalog 11051123: BPS www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistka (BPS). Indeks Pembangunan Desa Menurut Pulau Sumatra2018. Katalog 11051123: BPS www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistka (BPS) 2021. Indeks Pembangunan Desa Menurut Dimensi, Status IPD, dan Jumlah Desa Di Indonesia 2018. Katalog 11051123: BPS www.bps.go.id

Badan Pusat Statistka (BPS). Indeks Pembangunan Desa Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumut 2018. Katalog 11051123: BPS www.bps.go.id

Fuady, Shihabuddin Rangkuti (2019). Evaluasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pengembangan ekonomi Untuk Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat Di Indonesia. Skripsi Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Umsu.

Gujarati, D. (2013). Ekonometrika Dasar. Jakarta : Erlangga

Indeks Desa Membangun (IDM) Kementrian Desa. (<https://idm.kemendes.go.id>)
Indeks Pembangunan Desa (IPD). (<https://www.kemendes.go.id>)

Jhingan, M. (2010). Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kuncoro, Mudrajad. (2000). Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, Kebijakan (Edisi Pertama). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Madjid Taufik, Rosyidah Rachmawaty, dkk . Status Indeks Desa Membangun Provinsi, Kabupaten, Kecamatan Tahun 2019.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan Ekonomi Jilid 1 (Edisi Kesebelas). Jakarta: Erlangga

Sanusi, B. (2004). Pengantar Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Rineka Cipta.
Sukirno, S. (2006). Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan (Edisi kedua ed.). Jakarta: Kencana Persada Media Group

Dana Desa (Sumber : <https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html>)

•

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. DATA *TIMESERIES*

TAHUN	IDM (%)	DD Rupiah	ADD Rupiah	DAK Rupiah	IPM (%)
2014	0,4936	174794081	19959909	67162550	68
2015	0,5287	176085337	20.142.583	146253880	68,53
2016	0,5692	181492048	130.300.794	366784373	69,1
2017	0,5843	192270544	136.338.512	411765101	69,82
2018	0,5929	183816256	135.399.440	394069559	70,27
2019	0,643	207016398	134.677.826	353474263	70,76
2020	0,6511	212446839	132.793.829	319005086	71
2021	0,665	241070930	139.133.586	391905061	71,35

LAMPIRAN 2 . Hasil Regresi Indeks Desa Membangun (IDM)

Dependent Variable: IDM
 Method: Least Squares
 Date: 09/01/22 Time: 12:24
 Sample: 2014 2021
 Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.122318	0.862078	-2.461862	0.0907
DD	4.13E-10	5.09E-10	0.812635	0.4759
ADD	2.75E-10	4.47E-10	0.615722	0.5816
DAK	-6.21E-11	1.60E-10	-0.387239	0.7244
IPM	0.037537	0.013721	2.735684	0.0716
R-squared	0.978600	Mean dependent var		0.590975
Adjusted R-squared	0.950067	S.D. dependent var		0.060573
S.E. of regression	0.013535	Akaike info criterion		-5.497832
Sum squared resid	0.000550	Schwarz criterion		-5.448181
Log likelihood	26.99133	Hannan-Quinn criter.		-5.832708
F-statistic	34.29703	Durbin-Watson stat		2.054582
Prob(F-statistic)	0.007726			

Sumber : Eviews 12 diolah

Uji Multikolinearitas Indeks Desa Membangun di Kabupaten Langkat (IDM)

Variance Inflation Factors
 Date: 09/01/22 Time: 20:53
 Sample: 2014 2021
 Included observations: 8

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.743179	32451.56	NA
DD	2.59E-19	439.4572	5.140715
ADD	2.00E-19	119.7133	21.56761
DAK	2.58E-20	121.6826	16.16696
IPM	0.000188	40125.55	10.58992

Sumber : Eviews 12 diolah

Uji Heterokedastisitas Indeks desa Membangun di Kabupaten Langkat (IDM)

Heteroskedasticity Test: White
 Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.027524	Prob. F(4,3)	0.5117
Obs*R-squared	4.624518	Prob. Chi-Square(4)	0.3280
Scaled explained SS	0.104829	Prob. Chi-Square(4)	0.9987

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID^2
 Method: Least Squares
 Date: 09/01/22 Time: 20:56
 Sample: 2014 2021
 Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.000245	0.001384	-0.176948	0.8708
DD^2	-4.16E-21	3.56E-21	-1.167271	0.3274
ADD^2	-2.81E-21	9.49E-21	-0.296246	0.7864
DAK^2	2.36E-22	9.55E-22	0.247697	0.8204
IPM^2	1.00E-07	3.15E-07	0.317780	0.7715

R-squared	0.578065	Mean dependent var	6.87E-05
Adjusted R-squared	0.015484	S.D. dependent var	4.17E-05
S.E. of regression	4.14E-05	Akaike info criterion	-17.07844
Sum squared resid	5.14E-09	Schwarz criterion	-17.02878
Log likelihood	73.31374	Hannan-Quinn criter.	-17.41331
F-statistic	1.027524	Durbin-Watson stat	3.042726
Prob(F-statistic)	0.511724		

Ekonomi

Sumber : Eviews 12 diolah

Uji Autokorelasi Indeks desa Membangun di Kabupaten Langkat (IDM)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	27.48772	Prob. F(2,1)	0.1337
Obs*R-squared	7.857080	Prob. Chi-Square(2)	0.0197

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 09/01/22 Time: 20:59

Sample: 2014 2021

Included observations: 8

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.050640	0.276641	0.183052	0.8847
DD	1.94E-10	1.46E-10	1.335009	0.4093
ADD	-5.13E-10	1.56E-10	-3.285119	0.1881
DAK	2.22E-10	5.15E-11	4.317480	0.1449
IPM	-0.001463	0.004392	-0.333050	0.7953
RESID(-1)	-0.257713	0.207691	-1.240849	0.4318
RESID(-2)	-1.341162	0.185333	-7.236513	0.0874

R-squared	0.982135	Mean dependent var	2.22E-16
Adjusted R-squared	0.874945	S.D. dependent var	0.008861
S.E. of regression	0.003134	Akaike info criterion	-9.022746
Sum squared resid	9.82E-06	Schwarz criterion	-8.953234
Log likelihood	43.09098	Hannan-Quinn criter.	-9.491572
F-statistic	9.162575	Durbin-Watson stat	3.327686
Prob(F-statistic)	0.247644		

Sumber : Eviews 12 diolah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : M. Fariz Al – Azhari Rokan
NPM : 1805180001
Tempat dan Tanggal Lahir : P. Brandan, 02 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara
Alamat : P. Brandan Jalan Sutomo Gg Melur No.19
No. Telepon : 085359676620
Email : frzrokan@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Azrai Rokan
Nama Ibu : Diana Novita
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : P. Brandan Jalan Sutomo Gg Melur No.19

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

1. Tahun 2006 – 2012 : SD N 050743 P. Brandan
2. Tahun 2012 – 2015 : SMP Negeri 1 Babalan
3. Tahun 2015 – 2018 : SMA Negeri 1 Babalan
4. Tahun 2018, Tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan (S-1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Oktober 2022



M. Fariz Al – Azhari Rokan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6624567, Kode Pos Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA MAHASISWA : M. FARIZ AL-AZHARI ROKAN
NPM : 1805180001
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
KONSENTRASI : RISET EKONOMI DAN BISNIS
JUDUL PROPOSAL : ANALISIS KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN DESA (IPD) DAN INDEKS DESA
MEMBANGUN (IDM) DI KABUPATEN LANGKAT

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
21 Feb 2022	Bab I; teori haysat dan lambakan data u/ menguatkan masalah dan Tujuan penelitian.		
16 Maret 2022	Kaitkan antara bab I u/ tujuan penelitian dengan Bab II Teori (Grand Teori) dengan Bab III sbg metode penelitian.		
12 April 2022	Bab II; liany detail ST yang berumbar pada text book, sbg u/ penelitian for dahulu.		
22 April 2022	Bab II; tek usah mendefinisikan topik pakei data dan pakei terapan penelitian yang far.		
19 Mei 2022	Model Estimasi Koneksi lagi, harus koneksi dgn model Teori Porter.		
30 Mei 2022	All in Sdh Koneksi, Acc u/ uji.		

Medan, ...31. Mei...2022

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Ekonomi
Pembangunan

Pembimbing

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E, M.Si

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari ini 21 Juni 2022 telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan
merupakan bahwa :

Nama : M. Fariz Al Azhari Rokan
N.P.M. : 1805180001
Tempat / Tgl.Lahir : P. Brandan, 02 Oktober 2000
Alamat Rumah : Jalan Sutomo gg Melur no. 19 P. Brandan
JudulProposal : Analisis Kebijakan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Desa (IPD)
dan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Langkat Kecamatan
Brandan Barat

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	Analisis Kebijakan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Langkat Kecamatan Brandan Barat
Bab I	tabel, gambar dan grafik sejujukan, kumuran dan Tujuan dipahami lagi
Bab II	sejujukan Grand teori dengan latar belakang dan latar belakang yang disesuaikan
Bab III	Hipotesis/Hipotesis dan Ujinya sejujukan/ditulis yang penting sesuai dengan model
Lainnya	sumber data data (statistika). <i>paragraf statistik</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 21 Juni 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.

Pembimbing

Dr. Prawidya Hairani RS., SE., M. Si

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembanding

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext. 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari Selasa 21 Juni 2022 menerangkan bahwa

Nama : M. Fariz Al Azhari Rokan
N.P.M. : 1805180001
Tempat / Tgl.Lahir : P. Brandan, 02 Oktober 2000
Alamat Rumah : Jalan Sutomo gg Melur no. 19 P. Brandan
Judul Proposal : Analisis Kebijakan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Langkat Kecamatan Brandan Barat

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : Dr. Prawidya Hairani RS., SE., M. Si

Medan, 21 Juni 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Dr. Prawidya Hariani RS, SE., M. Si.

Pembimbing

Dr. Prawidya Hairani RS., SE., M. Si

Sekretaris

Dra. Hj. Roswita Hafni, M. Si.

Pembanding

Dra. Hj. Roswita Hafni, M. Si.

Diketahui / Disetujui
A.n. Dekan
Wakil Dekan -

Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M. Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 1, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 1998/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/10/1/2022

Medan, 10/1/2022

Kepada Yth
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : M. Fariz Al Azhari Rokan
NPM : 1805180001
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Riset

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Mengidentifikasi eksistensi persebaran desa yang tertinggal
2. Menganalisis kebutuhan pembangunan desa tertinggal

Rencana Judul : ① Analisis Indikator Indeks Pembangunan Manusia Dan Indeks Desa Membangun (Studi Kasus: Kabupaten Langkat, Brandan Barat, Desa Perlis)
2. Analisis Pengaruh Ikan Cerebung Terhadap Tingkat Pendapatan Anggota Masyarakat Desa Perlis (Studi Kasus: Nelayan, Umkm, Masyarakat)
3. Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Konsep Blue Economy Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Objek/Lokasi Penelitian : Kabupaten Langkat, Kecamatan Brandan Barat, Desa Perlis

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(M. Fariz Al Azhari Rokan)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Husri No. 4 Medan Telp. 061 4024867 Kode Pos 20138

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1998/HDL/SKR/MAN/FER/UMSU/10/1/2022

Nama Mahasiswa : M. Fariz Al Azhari Rokan
 NPM : 1805180001
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 Konsentrasi : Riset
 Tanggal Pengajuan Judul : 10/1/2022
 Nama Dosen Pembimbing¹⁾ :

Dr. Pravidya Hariani RS

Judul Disetujui²⁾

Analisis indikator indeks pembangunan manusia
 dan indeks Desa Membangun (studi kasus :
 kabupaten Langkat, berandani barat, Desa peris)

Disahkan oleh:
 Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Pravidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing

(Dr. Pravidya Hariani RS, SE., M.Si.)

¹⁾ Dosen Pembimbing

²⁾ Disetujui oleh Ketua Program Studi

³⁾ Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Untuk diarsipkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan foto dan unggahlah ke sistem ke-2 ini pada form online "Upload Pengajuan Judul Skripsi"